Kentingan
SALURAN SEBELAS

KENTINGAN

DETAK NURANI MAHASISWA

POLITIK INDONESIA TANPA FOMO ITU, GAK, ASIK! H.13

MAHASISWA DI AMBANG KEMEROSOTAN POLITIK H.15

KALANG KABUT PANGGUNG POLITIK

Tahun 2024 menjadi penentu, siapakah pasangan yang akan dipilih oleh Politik? Apakah aku, sesosok yang sudah sejak tahun '45 membersamainya atau Konotasi Negatif yang makin lama hanya makin merusak namanya.

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET ISSN: 1440 - 4460 / EDISI 30 TAHUN 2023

Majalah XXX/Oktober/2023

KIRIM TULISANMU!

Untuk mencicil utang pada kata-kata, redaksi menerima pembaca yang ingin mengirimkan tulisan ke saluransebelas.com

Ketentuan selengkapnya dapat dilihat di:
www.saluransebelas.com/kirim-tulisanmu/

Catatan Kentingan:

- Opini
- Surat Pembaca

Ruang Sastra:

- Puisi
- Cerpen

Resensi:

- Film
- Musik
- Buku

PENTING UNTUK DIBACA

EDISI SEBELUMNYA

Redaksi LPM Kentingan
Gd. Graha UKM UNS Lt. 2, Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Jebres, Kota Surakarta

Surel: email@saluransebelas.com
Laman: saluransebelas.com

Konotasi Negatif menjadi sesosok makhluk yang selalu bersanding dengan Politik. Mereka dipertemukan akibat adanya malafungsi dan kesalahan praktik dari Politik itu sendiri. Secara teknis, bukan Politik yang salah. Dia hanya seonggok sistem yang tercipta oleh kebutuhan manusia untuk memenuhi hasrat naluriah berupa "cara untuk mencapai suatu tujuan". Sempitnya, Politik sendiri berarti negara. Namun, pengembangan bahasa yang entah bagaimana ceritanya membuat Politik memiliki makna yang susah dijelaskan. Perlahan tingkah laku para pemegang kuasa mengganti makna Politik menjadi "cara untuk mencapai tujuan saya" dan sejak saat itu Konotasi Negatif konsisten dipertemukan dengan Politik.

Bicara soal makna Politik sepertinya tidak akan ada habisnya. Mengingat orientasi Politik sendiri sudah dirusak secara masif langsung di hadapan manusia yang tidak punya kuasa. Pemahaman yang selalu dimasukkan ke dalam kepala anak-anak sekolah dasar sepertinya sia-sia karena sangat kontradiktif dengan aslinya. Entah bagaimana cara diri ini menyikapi Politik yang ada. Entah bagaimana cara dunia ini menyikapi Politik yang ada.

Susunan angka yang terpajang di dinding bata menunjukkan tanggal main perpolitikan Indonesia kurang dari satu tahun lagi. Konotasi Negatif tentu belum tergantikan posisinya dalam menemani Politik yang masih busuk tercium oleh indra manusia. Sudah sejak beberapa tahun lalu para "ibu penguasa" menyiapkan baju-baju dan *stroller* untuk menyambut lahirnya Politik yang hebat di tahun depan. Kebersamaan Konotasi Negatif dengan Politik masih langgeng, bahkan mereka menunjukkan kedekatan yang tidak biasa. Jangan sampai pernikahan mereka menjadi awal kehancuran Politik di Indonesia.

Mahakarya luar biasa dari kaum-kaum muda Indonesia akhirnya hadir di tangan Anda. Sekumpulan prediksi, curahan hati, analogi, persepsi, tumpukan fakta dan bukti dari segala sisi, serta pemahaman filosofi telah tersaji untuk bisa membuka mata Anda dan melihat Politik tidak hanya sebagai cara, tetapi juga siapa, apa, mengapa, dan sebagainya. Majalah ini lahir sebagai jurnal bukti kecintaan Politik terhadap sosok Konotasi Negatif sehingga sampai saat ini belum ada yang menghancurkan hubungan laknat mereka. Kelahiran wujud Politik di tahun depan menjadi penentu pernikahan mereka atau malah menjadi sebuah bentuk kehancuran hubungan yang semoga akan disambut baik oleh manusia-manusia yang masih lurus akal pikirnya. Bukan tugas kami dalam memberikan pemahaman Anda untuk memaknai politik, tugas kami hanya menciptakan karya seni, tinggal bagaimana Anda memandang dan menilai makhluk problematik itu. Selamat membaca, Jagoan!

POLITICS IS THE ART OF LOOKING FOR TROUBLE, FINDING IT WHETHER IT EXISTS OR NOT, DIAGNOSING IT INCORRECTLY, AND APPLYING THE WRONG REMEDY

Ernest Benn

Majalah XXX/
Oktober/2023
Kalang Kabut
Panggung Politik

Penerbit: LPM Kentingan UNS; **Pelindung:** Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.; **Pembina:** Sri Herwindya Baskara Wijaya, S.Sos., M.Si.; **Pemimpin Umum:** Rama Mauliddian Panuluh; **Sekretaris Umum:** Yohana Natalia Lintang Respati; **Pemimpin Perusahaan:** Bagaskoro; **Pemimpin Redaksi:** Sabila Soraya Dewi; **Pemimpin PSDM:** Aslam Taqiuddin.

Penerbitan Majalah Kentingan Edisi XXX 2023: **Redaktur Pelaksana Majalah:** Faiz Aulia Rahman; **Reporter:** Siwi Widiyanti, Mia Puspita Normawati, Jasmine Aura Arinda, Rossa Putri Juliana, Nimas Ayu Rutri Arni, Aldini Pratiwi, Diah Puspaningrum, Alifia Nur Aziza, Shalsabilla Rizna Naulia Putri, Andriana Sulistiyowati, Andi Muh. Ahsan Rizal, Rohmah Tri Nosita, Salma Fitriya Nur Hanifah, Icha Salsabila, Wahyu Lusi Lestari, Kinanti Gurit Wening, Julia Tri Kusumawati, Syallom Aprinta Cahya Prasdani, Dhiazwara Yusuf Dirga Aditama, Kristian Adi Nurpranata, Sabila Soraya Dewi, Rama Mauliddian Panuluh, Heri Indrajat, Fatih Abdulbari; **Riset:** Aristri Rahma Magistra, Brigita Natalia Rose Santi, Baihaki Hakim, Orbit Varasta Prakosa; **Editor:** Dita Audina Suyanto, Revy Anestasia Sulistiyo, Lutfiyatul Khasanah, Rizky Nur Fadilah; **Fotografer:** Muhammad Faiz Fazlurrahman, Azfa Zaidan Naqi, Lutfi Fitria Tamsir; **Ilustrator:** Chandrawaty Dwiyanisufina, Anastasya Kurnianingrum, Ayra Adlina Mahanani Zahra, Falarasika Anida Paulina, Hasna Farrosah Diwany; **Penata Letak:** Raditya Putera Wirawan; **Staff Iklan:** Ardari Kusuma, Much. Ali Mukti, R. Ayyasy Nur Falah

Contents

3 **Bengkel Redaksi**

6 **Daftar Isi**

7 **Angkringan**
Mengenal Dekat Kota Impian Kelas Dunia: Nusantara

8 **Advertorial**
Kelezatan D'Qira Chicken Steak yang Tak Terkira

10 **Editorial**
Calon Mempelai Politik Tidak Jadi Menikah

12 **Fokus Utama I**
Politik Indonesia tanpa FOMO itu, Gak, Asik!

16 **Fokus Utama II**
Mahasiswa di Ambang Kemerosotan Politik

20 **Fokus Utama III**
Dua Puluh Lima Tahun, Reformasi Masih Belum Sepenuhnya Tercapai

24 **Riset**
Dinamika Pergerakan Mahasiswa dan Kebijakan Kampus: Studi Kasus Aksi Jenguk Rektorat Juni 2023

27 **Geledah Arsip**
Citra atau Jati Diri?

31 **Kolom Dalam**
Ironi Kekuasaan dalam Ranah Pendidikan

33 **Kolom Luar**
Diksi Politik, Politik Diksi

35 **Destinasi**
Jelajah Lorong Karya Selasar Ngarsopuro

38 **Photo Story**
Mangkunegaran: sebuah kisah tentang perjalanan

40 **Laporsn Khusus**
Labirin Politik Kampus: Terus Berputar Tanpa Ada Jalan Keluar

44 **Alumni yang Lulus**

45 **Sekitar Kita**
Di Balik Gerbang Kos

47 **Tren**
Ripped Jeans: Lebih dari Sekadar *Fashion Statement*

49 **Bentara**
Polemik Klenik di Panggung Politik

51 **Sosok**
Mendobrak Ruang, Mengembalikan Kepemilikan: Sebuah Pesan Sang Putri

54 **Pentas**
Panggung Klasik yang Makin Asyik

57 **Galeri Cerpen**
Sang Pendusta

60 **Galeri Puisi**
Perihal Murni

62 **Resensi Novel**
Teh dan Pengkhianat, Bukti Sejarah Tak Hitam Putih

64 **Resensi Film**
Negeri Tanpa Telinga: Film Satir Komedi Politik, Totalitas Mengkritik

66 **Resensi Musik**
Demi Masa : Catatan Nostalgia dalam Balutan Rima Berandal

68 **Catatan Kaki**
Etik dalam Taktik Politik

70 **Teka-teki Silang**

72 **Cermin**
Perangkap (Poli)Tikus

MENGENAL DEKAT KOTA IMPIAN KELAS DUNIA: KOTA NUSANTARA

Penulis: Heri Indrajat

Hai, *ol!* Di sini aku mau bahas soal Ibu Kota Negara (IKN) *nich*. Pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN kemungkinan akan dilaksanakan di awal 2024. FYI aja nih, IKN bakal mengusung tiga konsep kota (*forest city, smart city, and sponge city*) loh. Rencananya *sih* 75% luas IKN berupa ruang terbuka hijau (RTH) dengan orientasi pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan. Katanya *sih* biar julukan Kalimantan sebagai paru-paru dunia gak hilang. Sekali lagi, "katanya!"

Oh iya, kalau mau tau soal tiga konsep kota yang sudah disebutkan tadi, mungkin bisa melihat Johor (Malay), Bangalore (India), Moscow (Rusia), dan kota kelas dunia lainnya. Kebanyakan dari mereka cuman mengusulkan satu konsep ya, sedangkan Indonesia mengusulkan tiga konsep yang dispekulasikan akan menghasilkan sebuah kota hijau dengan teknologi maju dan sistem sirkulasi air terkonsep serta terkoneksi dalam satu kesatuan. Sungguh konsep yang fantastis, bukan? Gak tau sih bakal seribet apa pembangunannya.

Nah, ngomong-ngomong soal konsep pembangunan, kita gak boleh melupakan juga nih soal biaya, *xixi*. Biaya yang dibutuhkan buat IKN gak kecil loh, kata Om Owi (sapaan bersahabat Presiden Indonesia) di acara Indonesia-PEA (Persatuan Emirat Arab) Investment Forum *sih* 501 triliun. Sementara itu, Om Bambang (kepala otorita IKN) berkata biayanya sebesar 524 triliun. Biarpun begitu, aku gak mau menghujat soal nilai nominal yang inkonsisten tersebut. Itu wajar kok, soalnya IKN kan sifatnya kota spekulatif yang masih di angan-angan.

"Bukan bagaimana nih ya, tetapi pemerintah itu pengin banget keseluruhan proyek IKN ini cepat selesai, ya sekitar di 2045 lah yang mana sekitar 22 tahun lagi lo, boy."

Cara mereka buat mengejar hal tersebut ya dengan cari duit sebanyak-banyaknya agar pembangunan bisa dilakukan secara masif. Berdasarkan berita-berita sih 80% biaya dari investor. Jumlah sebegitu terlalu memaksa gak sih? Apalagi kemarin Om Owi memulai proyek IKN ini saat pandemi covid-19, kan repot ya. Ya kalau investasinya lancar, kalau seret bagaimana coba? Apa gak rugi bandar dah, *hwehwehwe*.

Terus nih ya *boy*, investornya itu bukan cuman investor Indonesia doang lo, tetapi juga ada investor asing. Kata Om Bahlil, menteri investasi, Indonesia menerima duit dari investor UEA, China, Korsel, Jepang, dan berbagai negara Eropa. Masalahnya, memang investor bakal mau menginvestasikan duitnya tanpa ada keuntungan buat mereka? Ya kagak lah, gila kali ngasih duit cuma-cuma buat negara orang. Boro-boro mengasih duit buat negara orang, kita mengasih duit buat orang membutuhkan aja susahnya minta ampun. *OKE BACK TO TOPIC*. Pertanyaannya adalah apakah investor-investor asing tersebut bakal berdampak buruk pada kondisi di Indonesia? Topik ini bisa banget sih buat dikaji ulang sama teman-teman pembaca yang keren-keren.

Oke, *next* ya. Mengutip data dari BPS Kutai Kartanegara dan Penajem Paser Utara, penduduk mereka sebagian besar hanya lulusan SD. Pertanyaannya, memang mereka bisa beradaptasi nih sama banyaknya orang berkualitas yang nantinya masuk ke sana kalau IKN sudah di pindah? Belum lagi, besok di sana bakal ada *forest city, smart city*, dan *sponge city*. Aku nih gak asumtif ya, sekarang aja orang sana dah banyak yang *insecure* karena gak bisa menyaingi para pendatang. *Haish*, boro-boro besok, sekarang aja nih pemerintah udah lebih dulu memercayai TKA (tenaga kerja asing) buat mengerjakan IKN daripada tenaga Indonesia, padahal katanya bakal melibatkan warga untuk pembangunan. Faktanya justru tingkat pengangguran di sana tertinggi nomor lima di Indonesia. Baru pembangunan aja sudah indikasi keberpihakan pemerintah sebetulnya ke mana, apalagi besok-besok *wkwk*.

Begitulah sekiranya beberapa masalah yang aku sebutin secara gamblang terkait pemindahan IKN. Sebetulnya, masih banyak materi atau masalah lain yang bisa diulik kok. Namun, semoga saja permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan tadi bisa memantik daya tarik teman-teman pembaca buat meneliti lebih lanjut ya *xixixi* karena ada banyak masalah yang perlu dikaji terkait IKN baik dari segi hukum, lingkungan, sosial, politik, dan seterusnya.

KELEZATAN D'QIRA CHICKEN STEAK YANG TAK TERKIRA

Bosan dengan makanan kantin yang itu-itu saja? Atau bosan dengan suasana kantin fakultasmu? Mau coba makan di kantin fakultas lain tapi bingung ingin ke mana? Ke D'qira Chicken Steak FMIPA yuk!!

D'qira Chicken Steak merupakan kedai yang menyediakan makanan bergizi dengan mengutamakan kualitas dan konsistensi rasa, sambil tetap ramah di kantong pembeli. Salah satu andalannya adalah hidangan utama mereka, Chicken Steak D'qira. Steak ayam dengan menggunakan bagian dada ayam tanpa tulang yang segar, D'qira Chicken Steak menawarkan hidangan yang lezat dan mengenyangkan.

Setelah sukses di cabang pertamanya yang berlokasi di kawasan Mojosongo, D'qira Chicken Steak melalui program MICARE Business Coaching (MBC) FMIPA UNS menyebarluaskan kelezatannya dengan membuka cabang di Teras Solusi FMIPA UNS. Menariknya, D'qira Chicken Steak cabang FMIPA dikelola oleh mahasiswa secara langsung. Fadia, Rizka, Syahita, dan Zahra di tengah kesibukan akademiknya masih menyempatkan untuk mengelola D'qira Chicken Steak FMIPA UNS.

Salah satu dibalik kesuksesan D'qira Chicken Steak adalah hidangan yang disajikan oleh D'qira memiliki cita rasa yang khas, seperti pada menu Chicken Steak D'qira, menu utama yang memiliki cita rasa manis dan gurih dalam setiap gigitannya. Selain itu, bagi kalian yang tidak cukup kenyang memakan Chicken Steak, D'qira masih mempunyai menu andalan lainnya yaitu Nasi Ayam Geprek yang tidak kalah lezat dan pastinya siap memadamkan kelaparan kalian semua.

Tak hanya itu, D'Qira juga menyediakan beragam pilihan menu lainnya, seperti spaghetti, ayam gunting, kentang goreng, dan *onion ring* dengan harga yang sangat terjangkau, berkisar antara Rp6.000 hingga Rp10.000. Dengan harga yang ramah di kantong, mahasiswa dapat menikmati hidangan lezat dan bergizi tanpa harus khawatir membuat kantong tipis.

D'qira yang berlokasi di Teras Solusi FMIPA UNS adalah tempat yang cocok untuk berkumpul, baik itu untuk rapat kelompok, menyelesaikan tugas, perayaan ulang tahun, atau sekadar nongkrong bersama teman-teman. Teras Solusi FMIPA UNS memiliki fasilitas lengkap, seperti WiFi yang andal, stop kontak, dan area terbuka yang nyaman memungkinkan pengunjung menikmati waktu bersantai tanpa takut lepas dari gawai dan internet. Selain itu, Teras Solusi juga tempat yang *instagramable*. Cocok buat kamu yang suka membagikan momen nongkrong dan makan bersama teman-temanmu.

Selain datang langsung ke FMIPA, tersedia cara lain untuk mendapatkan Chicken Steak D'qira. Kalian bisa memesan melalui tautan yang ada di profil Instagram D'qira, @chickensteak.dqira, yang akan mengarahkanmu ke percakapan personal melalui WhatsApp. Untuk kalian yang sibuk, tersedia juga layanan pesan antar melalui GoFood dan sejenisnya yang siap melayani melalui *outlet* Mojosongo. Lalu, untuk kamu "si paling organisasi" D'qira juga melayani pesanan dalam jumlah banyak untuk keperluan rapat atau acaramu.

D'qira Chicken Steak FMIPA UNS buka dari Senin hingga Jumat, mulai pukul 10.00 sampai 16.00 WIB. D'qira Chicken Steak adalah tempat cita rasa dan kenyamanan bertemu. *So, what are you waiting for?* Segera rasakan kelezatan D'qira yang tak terkira!

ADVERTORIAL

Ilustrasi: *Raditya Putera Wirawan*

CALON MEMPELAI POLITIK TIDAK JADI MENIKAH

Penulis: Faiz Aulia Rahman

Aku lupa kapan terakhir kali merasakan kebahagiaan dalam hidup. Penderitaan yang sudah sejak puluhan tahun aku rasakan menutupi memori kebahagiaan yang kumiliki. Kelahiranku awalnya diciptakan untuk menjadi sebuah mimpi indah bagi masyarakat Indonesia, tetapi ternyata mimpi itu hanya akan terus indah apabila kau tidak pernah bangun dari tidurmu. Agak sulit mendefinisikan siapa aku untuk era sekarang, mengingat perjalanan hidupku yang amat gelap dan penuh omong kosong memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia yang sudah tidak didukung oleh apa pun, termasuk dengan Pendidikan yang hanya mementingkan perut buncit penyakitan para penguasa. Kompleksitas kehidupan menjadikan semua yang seharusnya terjadi malah melenceng dan tidak sesuai dengan hakikatnya.

Aku mengenal dan memiliki hubungan dengan Politik sejak proklamasi berkumandang di atas tanah air tercinta ini. Kukira pertemuan kami hanya sebatas urusan kepentingan. Namun, ternyata berlanjut ke penyatuan batin dan pikiran. Sejak tahun proklamasi, hidup di negara baru ini terasa amat menyenangkan, terlebih aku dan Politik menjadi sosok yang sangat penting dalam urusan bernegara di Nusantara. Dapat kau lihat bagaimana mereka, para tokoh negara, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pemilu. Tidak ada fasilitas negara yang dimanfaatkan oleh para penguasa yang kembali mencalonkan diri di atas panggung pemilihan. Semua sama rata, mengikuti sistem dengan suka cita.

Negara ini sudah cukup nyaman untuk ditinggali dan Politik mengamini itu. Terlebih peristiwa penggusuran Nasakom di tahun '65 membuatku makin lega karena kehadirannya sempat membuat namaku terombang-ambing dibuatnya. Kepergiannya membuat namaku kembali bersinar, hingga tanpa aku sadari ternyata kebangkitan namaku hanya sebatas 'formalitas' yang tidak sesuai dengan realitanya. Negara ini mulai menjadi komedi sejak saat itu. Politik terlalu sibuk bertemu dengan para penguasa negara yang aku tidak tahu membahas apa karena aku memang tidak pernah diajak. Makin hari sikap Politik makin tidak baik. Aku sadar tidak sepenuhnya itu adalah kesalahan Politik, melainkan roda kendali kekuasaan yang dimainkan oleh penguasa ke arah yang salah. Sejak itu, aku tahu Politik sudah memiliki hubungan dengan sosok stigma penghancur nama akibat pergaulannya dengan para penguasa. Politik menjadi sosok yang tak lagi menyenangkan karena sudah berhubungan dengan Konotasi Negatif.

Banyak pemicu yang akhirnya mempersatukan mereka. Makin lama nama Politik makin busuk di telinga manusia. Salah satunya akibat 32 tahun terus berkutat dengan kehidupan yang tidak sehat; pemilu yang tidak adil, pembungkaman mengemukakan pendapat, KKN yang menjamur, sistem kepartaian yang berat sebelah, dan masih banyak lagi. Hebatnya adalah bagaimana mereka bisa tetap mengangkat namaku ketika kenyataannya apa yang mereka lakukan sangat jauh dari prinsip hidupku. Akhirnya, kejadian itu membuat namaku juga ikut tercoreng. Membuat namaku tidak lagi dianggap sebagai mimpi indah bangsa Indonesia. Konotasi Negatif senantiasa membersamai kehidupan Politik, bersamaan dengan namaku yang makin hina dibuat olehnya.

"Hingga puluhan tahun silam, tidak ada satu pun yang berubah. Hanya keadaan yang makin parah. Sosok Oligarki menjadi bintang utama pada keberlanjutan penghancuran nama baik Politik di era kini."

Kehidupan yang tidak sehat berlanjut lagi. Para penguasa menerapkan politik balas budi untuk membayar orang-orang yang telah mendukung mereka: membagi jabatan secara "adil" ke partai pendukung dan "sponsor" yang bergabung. Menyuarakan janji-janji yang membuat namaku kembali harum di telinga, tetapi tidak di realitas. Oligarki kian mencengkeram, membuat namaku makin padam. Politik dinasti yang menjamur hingga mengotori berbagai kota. Lagi-lagi namaku tetap diangkat, tetapi aku dijatuhkan. Pengaruh Konotasi Negatif kian meluas, meruntuhkan namaku yang sejak awal abad 20 menjadi mimpi indah rakyat Indonesia. Makin lama aku hanya menjadi sosok gila yang makin krisis identitas. Di mana sebenarnya para pengasuh yang seharusnya menjadikanku sebagai anak emas di negeri ini?

Saat ini, mataku dikotori oleh pemandangan sosok Politik yang menunjukkan hubungannya dengan Konotasi Negatif makin mesra. Aku tak menghendaki hubungan laknat mereka. Kita tak menghendaki hubungan laknat mereka. Tahun 2024 menjadi penentu, siapakah pasangan yang akan dipilih oleh Politik? Apakah aku, sesosok yang sudah sejak tahun '45 membersamainya atau Konotasi Negatif yang makin lama hanya makin merusak namanya. Dengan siapa calon mempelai Politik tidak jadi menikah? Apakah dukungan dari rakyat yang menyuarakan kesejahteraan lebih besar daripada dukungan penguasa yang menyuarakan keserakahan? Aku hanya bisa terduduk, menunggu kepada siapa cincin perkawinan akan disematkan oleh Politik di tahun depan. *Oh iya*, sepertinya di awal aku belum memperkenalkan diriku. Perkenalkan, aku adalah Demokrasi.

Ilustrasi: *Chandrawaty Dwiyanisufina*

POLITIK INDONESIA TANPA FOMO ITU, GAK, ASIK!

Penulis: Aldini Pratiwi

"Semua orang juga tahu, kalau politik itu dinamis. Tapi... emang boleh sedinamis ini?"

Di tengah huru-hara perpolitikan Indonesia yang 'katanya' dinamis dan tak pernah habis, muncul segudang fenomena 'lawas' yang berevolusi seolah itu 'baru', apalagi kalau bukan permainan kekuasaan dan ambisi yang kehadirannya sering kali menimbulkan lebih banyak kontroversi daripada aspirasi. Fenomena ambisi akan kekuasaan ini terjadi ketika pejabat dan politikus tak pernah tenang hatinya karena selalu dihinggapi perasaan risau atau cemas bahwa mereka akan melewatkan kesempatan emas atau termarginalkan dalam laga politik yang luar biasa sengit. Bahasa gaulnya, takut ketinggalan.

Tanpa perlu berlama-lama, mari kita sambut, inilah istilah paling beken abad ke-21, "Fear of Missing Out" (FOMO)!

Mayoritas orang tidak menyadari bahwa FOMO kini bertransformasi menjadi semacam virus yang menjangkiti kalangan para pemegang kekuasaan dan pengaruhnya, bahkan sering kali menjadi bahan perdebatan yang panas di media sosial. Sesuatu yang awalnya berada jauh di luar politik, tidak disangka-sangka sekarang justru berhasil ikut menggerogoti dunia politik dari dalam. Harus diakui, saat ini politik Indonesia telah berubah haluan menjadi area peperangan yang tidak hanya memperebutkan kekuasaan, tetapi juga ketenaran. Sebuah penelitian dalam Jurnal Psychiatry Research mengemukakan bahwa penggunaan telepon pintar dan media sosial yang bermasalah dapat memberikan pengaruh terhadap fenomena FOMO yang lebih besar pula dan hal ini dapat dialami oleh semua orang di berbagai usia maupun jenis kelamin.

Mereka, para politikus, dengan semangat gerilyanya berpacu menjaga diri untuk tetap "kekinian" dan kokoh di barisan terdepan tren viral. Ibarat kasino, FOMO dengan segala tipu muslihatnya mampu menjaring sebanyak mungkin orang dan membiarkan mereka bertaruh dengan popularitas dan eksposur yang tidak pasti. Namun, akankah obsesi terhadap popularitas ini mengaburkan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin negara? Tulisan ini akan mengulas FOMO dalam politik Indonesia serta taktik apa saja yang digunakan oleh para politikus agar tetap terlihat "kece" untuk mempertahankan dukungan publik.

Politikus Indonesia adalah Penggemar Berat Machiavelli

Salah satu bukti konkrit dari FOMO di dunia politik Indonesia adalah kompetisi sengit untuk merebut kursi kekuasaan tertinggi, seperti jabatan Ketua Umum, Menteri, Anggota Legislatif, hingga Presiden. Betul-betul selaras dengan teori "The end justifies the means" milik Machiavelli, yang artinya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, dalam konteks ini kiblatnya bukan demi kepentingan negara dan rakyat, melainkan demi kepentingan diri sendiri. Bisa dipastikan, politikus Indonesia memang penggemar berat Machiavelli, tetapi hanya di teori itu saja dan dengan arah penafsiran yang berbeda.

Memang betul, tidak ada salahnya jika setiap pemimpin atau calon pemimpin merasa harus memperkuat posisi mereka sehingga tidak akan menyianyiakan setiap peluang yang berharga. Namun, yang menjadi permasalahan adalah proses atau cara mereka untuk mendapatkan itu. Pencitraan yang berlebihan merupakan salah satu gejala FOMO dalam politikus yang ingin selalu menjadi paling terdepan. Memasang *banner* atau spanduk berupa ucapan selamat kepada tim nasional yang baru saja memenangkan penghargaan di luar negeri (tentu saja dengan proporsi foto politikus yang harus selalu lebih besar dari foto sang juara), mengundang dan memberi insentif 'hanya' kepada orang-orang yang viral (yang belum viral, harap bersabar saja), ada pula yang tidak pernah absen untuk selalu muncul di hadapan publik dan mengomentari segala hal dengan komentarnya yang dangkal, bahkan tidak berguna. Demi apa? Demi mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Apapun akan Kulakukan demi Sesuap Popularitas

Tidak hanya di dunia nyata, FOMO politikus pun ikut merambah ke dunia maya. Popularitas di media sosial adalah faktor yang paling menentukan kesuksesan seseorang dalam politik modern. Pejabat dan politikus saling sikut-sikutan untuk menjadi *trending topic* atau viral di platform media sosial. Mereka berbondong-bondong membuat konten yang menarik, sering terlibat dalam tren yang sedang *booming*, seperti *challenge*. Bahkan, mereka rela mengubah kepribadian demi membentuk citra diri yang lebih disukai oleh masyarakat. Siapa yang memiliki *followers* terbanyak di Instagram, twitnya mendapat paling banyak *likes* di Twitter, dan videonya ditonton lebih dari lima juta kali di TikTok, dialah pemenangnya.

Tidak puas sampai di situ, para politikus juga merasa sangat tertantang untuk berpartisipasi dalam acara-acara populer, baik itu di televisi atau media daring, seperti *talk show*, program hiburan, atau wawancara eksklusif. Tak jarang, ketika menghadiri acara itu, politikus dengan sengaja melontarkan komentar-komentarnya yang kontroversial agar acara-acara populer lain juga akan turut mengantri mengundangnya di acara yang berbeda. Dengan berada di berbagai acara ini, yang merupakan panggung bagi mereka, mereka berharap bisa meningkatkan eksposur dan menciptakan citra positif di mata masyarakat, bahkan mendapatkan citra negatif atau buruk di awal tidak menjadi masalah bagi mereka karena semua itu dapat ditutup rapat-rapat dan dilupakan kembali hanya dengan dua kata, "maaf" dan "klarifikasi". Bagi politikus yang FOMO ini, eksposur adalah segalanya!

Jika diamati lebih jauh lagi, FOMO ini ternyata juga sangat berpengaruh kepada cara politikus dalam menyikapi serangan atau kritik dari lawan politiknya. Karena rasa takut untuk kehilangan dukungan masyarakat, mereka memiliki tendensi untuk membalas dengan tajam dan defensif, bahkan pada keadaan-keadaan di mana kritik tersebut sebenarnya berlandaskan fakta yang sah. Reaksi emosional seperti ini sering kali lebih ditekan oleh keinginan untuk mengukuhkan citra dan ketenaran agar tidak goyah daripada berdialektika berdasarkan logika dan substansi. Bentuk permusuhan antara satu politikus dan politikus lainnya memang bukan hal yang tabu lagi, tetapi campuran dari 'bumbu' FOMO ini membuat permusuhan itu makin bergelora.

Di Balik Tawa yang Merekah, Ada Ambisi yang Membara

Sebuah survei dari *MyLife.com* menemukan bahwa 56% pengguna media sosial mengalami FOMO, dengan 48% mengatakan bahwa media sosial membuat mereka merasa kehilangan pengalaman sosial. Ditambah lagi dengan media sosial yang memiliki fitur tagar (#) yang memungkinkan pengguna untuk memberitahukan peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Misalnya saja, pada saat Reuni 212 yang dilakukan di tugu Monas. Kala itu banyak warganet yang memamerkan aktivitasnya dengan menuliskan #Reuni212, yang berhasil membuat peristiwa tersebut masuk dalam *trending topic* dan akhirnya warganet lainnya pun langsung dapat mengetahui.

FOMO juga mendorong politikus mencoba begitu keras untuk terlihat "kece" di dunia meme, contohnya di Twitter, Instagram, dan Facebook. Menurut data dari Hootsuite, Facebook merupakan tempat yang paling banyak menimbulkan FOMO (72%), kemudian disusul oleh Instagram dengan 14%, Twitter 14%, dan Pinterest sekitar 8%.

Para politikus FOMO ini, berusaha menyesuaikan diri dengan bahasa dan gaya meme yang sedang viral agar tetap relevan di mata publik. Seperti dengan sengaja membuat ekspresi atau perkataan yang *memeable* dan membiarkan cuplikan foto atau videonya tersebut menyebar di kalangan masyarakat dan menjadi meme. Politikus FOMO seperti ini akan memandang hal tersebut tidak dari sisi negatif seperti menganggap perbuatan tersebut adalah tindak pidana penghinaan, tetapi dari sisi positif berupa tambahan eksposur. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kadang kala obsesi untuk menjadi lucu dapat mengaburkan substansi dan tujuan politik yang seharusnya diprioritaskan. Kita harus bertanya, apakah kehadiran dalam budaya meme ini membawa dampak positif atau malah mengalihkan perhatian dari isu-isu esensial?

Selain itu, penggunaan meme demi membentuk citra diri seperti ini (biasanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat), juga sering kali mengaburkan kepribadian asli dan condong pada citra politikus yang tidak autentik. Hal ini dapat menyebabkan publik tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang hanya pencitraan saja. Konsekuensinya, ketidakautentikan ini dapat merusak kepercayaan dan keakraban politikus dengan masyarakat.

Meme di media sosial sekarang ini seolah telah menjadi "rahasia" terselubung para politikus untuk memunculkan citra yang lebih menarik dan lebih "trendi". Apakah meme tersebut juga menyembunyikan kebenaran dan kenyataan di balik politikus?

Menyadari FOMO dan Menemukan Keseimbangan

Menurut survei dari Indikator Politik Indonesia tahun 2021, sebanyak 64,7% anak muda menilai bahwa partai politik atau politikus di Indonesia tidak terlalu baik atau tidak baik sama sekali dalam mewakili aspirasi masyarakat. Di survei yang sama juga, menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) tergolong rendah. Dari 12 institusi yang berada dalam daftar, partai politik berada di posisi terbawah dengan kepercayaan hanya 54%.

Mungkin sudah waktunya, para politikus harus memikirkan baik-baik apakah kehadiran mereka dalam dunia politik ini hanya bersifat sementara dan berfokus pada *trending* semata tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat secara substansial atau memang berniat untuk memberikan kontribusi yang besar untuk dunia politik. Jika hanya mencari-cari eksposur viral tanpa merencanakan visi jangka panjang, mungkin eksistensi politikus hanya sekadar guyonan belaka.

FOMO dalam politik dapat mengakibatkan politikus menjadi lepas fokus pada kebijakan dan keputusan yang penting untuk masyarakat. Mereka akan selalu terkungkung dalam proses berselancar di media sosial dan popularitas daripada memikirkan akibat jangka panjang dari perbuatan mereka. Politikus harus sadar betul bahwa viralitas di media sosial tidak selamanya merepresentasikan substansi politik. Lebih esensial untuk mengarahkan semua fokus dan energi pada kebijakan dan program yang berakibat nyata bagi masyarakat, daripada hanya berusaha mencari perhatian semu di dunia maya.

Tuan dan Puan Politikus, Tolong Kembali Saja ke Akar Politik yang Sebenarnya

Dibanding sibuk mencari popularitas di media sosial yang sifatnya semu, lebih baik politikus fokus meningkatkan penghormatannya terhadap transparansi dan autentisitas dalam bersosialisasi dengan masyarakat, jujur tentang kebijakan dan program yang mereka rancang, serta terbuka dalam menerima kritik yang membangun. Jika semua itu dilakukan, pasti keyakinan publik akan jauh lebih kuat. Politikus butuh kembali ke akar politik dan menilik tujuan awal mereka dalam berkecimpung di dunia politik. Berbakti kepada masyarakat dan mengembangkan negara yang lebih baik harus menjadi asas utama dari sikap mereka.

Di ujung batu pemikiran ini, sebenarnya ada sebuah rahasia penting yang para politikus tidak ketahui, yaitu kegeniusan generasi muda sekarang yang menjadi target utama mereka. Generasi zaman ini bukan tipikal yang gampang diperalat dengan tipu daya. Dibombardir dengan berbagai macam jenis pencitraan pun tidak cukup mampu menggoyahkan keyakinan mereka. Generasi emas yang Indonesia punya sekarang ini adalah generasi bijak yang mampu melihat melampaui gempita FOMO dan memilih pemimpin yang berfokus pada visi, misi, dan kualitas kepemimpinan yang sebenarnya.

"Bisa saja mereka mampu memutarbalikkan kondisi dan membuat trending tagar #GerakanIndonesiaTanpaPolitikusFOMO. Eh!"

FOKUS UTAMA

Ilustrasi: Anastasya Kurnianingrum

MAHASISWA DI AMBANG KEMEROSOTAN POLITIK

Penulis: Diah Puspaningrum & Alifia Nur Aziza

Kampus diibaratkan sebagai sebuah miniatur kenegaraan, di mana akan ditemukan di dalamnya mereka yang bertindak sebagai lembaga-lembaga pemerintahan dan rakyat. Meskipun begitu, politik tak lagi menjadi sebuah isu yang dianggap menarik oleh sebagian atau bahkan kebanyakan mahasiswa. Dengan alasan yang bermacam-macam pula.

Sudah bukan persoalan lama ketika menjumpai sistem politik yang seakan sudah di-*setting* sedemikian rupa, golput yang makin merajalela, kemudian pada akhirnya politik akan makin terabaikan. Padahal sejatinya politik merupakan usaha untuk mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai kesejahteraan. Lantas bagaimana jadinya jika dalam keberjalanannya saja kesusahan mempengaruhi individu lain?

Nangkringnya Kotak Kosong

Menjadi jawaban pertama kami atas pertanyaan sebelumnya. Fenomena satu ini memang sudah sangat familiar terdengar, utamanya di kampus kita tercinta. Jika menelisik beberapa tahun ke belakang, UNS seakan mengalami penurunan terhadap minat partisipasi politiknya. Misalnya saja ketika pemira, lagi dan lagi menemui calon kotak kosong dan jumlah suara yang cenderung stagnan, bahkan menurun. Lembaga eksekutif seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) tampak tak lagi bergairah untuk menggaet minat mahasiswa maju sebagai pemimpin pergerakan.

Dewasa ini, kotak kosong seakan menjadi tren yang entah butuh berapa tahun lagi dapat terbasmi. Mengintip keberjalanan pemira tahun 2022, pada tingkat universitas sendiri KPU hanya berhasil menggaet masing-masing satu calon untuk ketua majelis wali amanat, presiden dan wakil presiden BEM, hingga anggota legislatif. Mau tidak mau, kotak kosong inilah yang maju menjadi pihak oposisi.

Pada tingkat fakultas, di tahun yang sama, kotak kosong juga nangkring di pemilu FISIP, FMIPA, hingga SV. Padahal pemilihan raya kini telah kembali bergerak hampir sepenuhnya luring, setelah dua tahun ke belakang terhalang oleh pandemi Covid-19. Artinya, kesempatan untuk menggaet mahasiswa juga lebih mudah dan efektif. Bahkan, di beberapa daerah pemilihan tampak menyediakan ruang untuk kampanye, uji publik, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Bahkan FISIP sesulit itu buat cari ketua presiden BEM-nya, sesusah itu, *kayak* KPU-nya aja pontang-panting cari", ungkap Khaira—bukan nama sebenarnya—panitia pemira 2021 saat kami wawancarai pada Kamis, (20/7).

Khaira juga menuturkan fenomena calon tunggal ini mungkin terjadi karena pertimbangan dari masing-masing individu untuk nantinya menjalankan tugas sebagai pemimpin mahasiswa. Selain tugas dan kendalanya yang dinilai cukup berat, menjadi presiden BEM juga perlu untuk memastikan fungsi advokasinya menyeluruh termasuk sampai ke kampus cabang. Bayangkan saja, dengan masa jabatan satu tahun secara sukarela, presiden BEM perlu menjalankan program kerja yang padat untuk mahasiswa. Mulai dari *event* berupa seminar, perlombaan, hingga diskusi publik. Belum lagi menjadi penyalur suara mahasiswa kepada petinggi kampus yang bisa muncul sewaktu-waktu. Meskipun presiden BEM dibantu oleh kementerian di dalamnya, tetap saja seluruh program kerja menjadi tanggung jawabnya.

Meskipun staff BEM UNS seakan tak kehilangan peminat dengan banyaknya jumlah pendaftar setiap tahunnya, tak dapat disangkal bahwa untuk mencalonkan diri menjadi presiden pun memerlukan banyak koneksi. Sebut saja dalam hal administrasi pencalonan, pendaftar perlu untuk melampirkan scan kartu mahasiswa pendukung setidaknya 5,0% kartu mahasiswa dari pemilih di fakultas asal paslon dan 2,0% kartu mahasiswa dari pemilih di setiap fakultas lainnya. Dari sini dapat dilihat bahwa kaderisasi menjadi peranan yang cukup penting untuk naik ke lembaga-lembaga pemerintahan kampus.

Opsi yang lebih menjanjikan pun membuat mahasiswa kembali menyusun skala prioritas. Misalnya, program seperti Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka yang dinilai lebih jelas akan membantu mahasiswa setelah lulus dari bangku perkuliahan. Mulai dari terjun langsung ke dalam dunia profesi, mendapatkan pengalaman kerja, hingga pengembangan *softskill* oleh pusat karir, pun masih diberi bantuan biaya hidup. Manfaat yang ditawarkan ini tentu berbeda dengan menjadi presiden BEM yang tak selalu bersinggungan dengan pekerjaan dan tanpa bayaran. Pengembangan diri, relasi, dan pengalaman menjalankan pemerintahan mungkin benar didapatkan. Namun, kini banyak mahasiswa yang lebih berorientasi pada hal-hal yang sifatnya transaksional dan menguntungkan, sehingga kembali lagi hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan.

"Saya melihat fenomena kotak kosong ini menunjukkan kurangnya minat atau kesadaran mahasiswa terhadap lingkungan fakultas atau universitas. Mereka cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap adanya pemira", ucap Adnan, salah satu mahasiswa FKIP.

Jumlah Suara yang Alakadarnya

Senin (19/6), kami menemui Zahra dan Farhan—bukan nama sebenarnya—mahasiswa program studi Sosiologi angkatan 2022. Menjadi mahasiswa di tahun pertama tampaknya membuat Zahra kurang peduli dengan politik kampus. Menurutnya, ia butuh waktu

untuk dapat memposisikan dirinya dengan benar dalam ranah politik kampus.

"Tahun ini gak ada kontribusi ke pemira, kan masih maba, masih meraba-raba politik kampus *kayak* gimana", ungkapnya. Berbeda dengan Zahra, Farhan masih sempat menyumbangkan suaranya dalam pemilu fakultas, meskipun pemilu universitas tak sempat ia kunjungi karena samar terdengar.

Fase yang dialami Zahra dan Farhan ini juga acapkali dialami mahasiswa baru lainnya. Kenyataannya, banyak mahasiswa yang celingak-celinguk masih mencoba memahami "apa *sih* lembaga-lembaga pemerintahan kampus ini?". Dari sini, tak sedikit yang akhirnya enggan berpartisipasi dalam pemilu, sejalan dengan ketidaktahuan mereka.

Dalam salah satu tulisan saluransebelas.com terhitung jumlah golput dalam pemilu universitas selalu di atas 50% sejak 2019. Rincinya dalam tiga tahun berturut, sebanyak 54,25%, 58,16%, dan 72,13%. Pun halnya dengan pemilu fakultas mengalami kesulitan yang hampir sama. Jumlah mahasiswa golput yang terus meningkat ini seakan menunjukkan kian meredupnya politik mahasiswa.

Berdasarkan laporan Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2022, skor budaya politik Indonesia masih cenderung rendah yaitu sebesar 4,38 dari skala 10. Beberapa hal yang mungkin mempengaruhi adalah ketidakpuasan terhadap sistem politik, dominasi kelompok tertentu, hingga beban akademik yang tinggi. Pada akhirnya, mahasiswa memilih untuk acuh tak acuh terhadap kerja politik di sekitarnya.

"Kalau di lingkungan kampusku, memang masih ada orang-orang yang tertarik dengan dunia politik, tetapi kalau melihat setiap acara diskusi di fakultasku, antusiasme mahasiswa terhadap isu-isu politik itu masih rendah, *sih*", ujar Farhan.

Blusukan Panitia hingga Timses

Miris jika melihat jumlah perolehan suara pemira yang nyatanya tiap tahun menunjukan adanya penurunan, bahkan munculnya kotak kosong. Terlepas dari hal lain yang mempengaruhi, SDM dalam kepanitiaan pemira tentu memiliki andil besar di dalamnya. Sebuah konten edukasi mengenai pemira yang disampaikan melalui media publikasi seperti Instagram nyatanya sangat penting, terutama bagi mahasiswa awam. Lantas bagaimana kita mengetahui siapa yang menjadi calon dan perubahan apa yang dibawakan, jika informasi tersebut sangat minim? Tentu ini merupakan tugas PR panitia pemira agar informasi mengenai pemira tersebar dan diketahui oleh tidak hanya mahasiswa di kampus bersangkutan, namun semua elemen di kampus tersebut.

"Sumpah, itu susah. Pertama, itu PR buat KPU-nya, panitia pemilihannya, dia mungkin gak bisa nge-*branding kayak gak* kuat nge-*branding*, tata cara votenya gimana. Kadang kalau sebagai panitia hanya *ngasih* infografis *doang*, tata caranya gini, gini, dalam bentuk pamflet atau jarkoman, itu menurutku kurang mengedukasi", tutur Khaira.

Khaira melanjutkan bahwa perlu adanya konten edukasi pemira dalam bentuk video, teaser, ataupun video pendek di aplikasi TikTok, mengenai tata cara *voting*. Dibandingkan dengan menyebarluaskan informasi melalui jarkoman ataupun pamflet, menurutnya informasi dalam bentuk video lebih mudah ditangkap dan dipahami oleh para mahasiswa. Selain itu, blusukan panitia hingga ke fakultas-fakultas ataupun himpunan untuk melakukan *door to door* juga dirasa perlu dilakukan.

Sedikit *tricky* ketika mencari suara, mengingat beberapa pemira di UNS pada tahun 2022 melawan kotak kosong. Pemikiran seperti, *"Aku rasah nyoblos ae, pasti wes menang"*, *"Halah paling yo menang, rasah di coblos menang,"* tampaknya juga harus membuat timses paslon bekerja ekstra agar memperoleh suara yang pantas agar paslon mereka menang. Bentuk kampanye yang dilakukan juga tentunya berbeda, pun euforia di dalamnya.

Mahasiswa Perlu Berpolitik

Buta politik maupun acuh tak acuh terhadap kehidupan politik harusnya menjadi sebuah hal yang "haram" bagi para pengemban julukan *agent of change*. Bahkan, kata mahasiswa sendiri seperti sudah lekat dengan kata politik, meskipun nampaknya beberapa waktu ke belakang ini tidak sedemikian eratnya. Dr. Sunny Ummul Firdaus sebagai Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas) LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) mengungkapkan kepada kami pentingnya partisipasi mahasiswa dalam politik kampus. Menurutnya, peran dan partisipasi mahasiswa dalam politik kampus sangat penting karena akan memberikan banyak dampak yang signifikan terhadap pengembangan kampus.

"Dengan adanya keterlibatan dalam politik kampus, mahasiswa dapat mempengaruhi kebijakan akademik dan peningkatan kurikulum khususnya bagi kebiasaan mahasiswa", ungkap Sunny dalam wawancara pada Senin, (17/07).

Timbulnya fenomena kotak kosong hingga menurunnya jumlah perolehan suara pada pemira merupakan sebuah indikasi adanya penurunan minat berpolitik mahasiswa. Hal ini mungkin saja tidak terlepas dari pengaruh panas dingin dalam politik nasional. Meskipun begitu, denyut politik dalam darah mahasiswa harus tetap menjadi hal yang penting untuk diakomodir dengan baik. Kesadaran berpolitik mahasiswa harus tetap terjaga karena mereka membawa potensi besar untuk melakukan perubahan positif dan menciptakan dampak yang nyata.

"Jangan takut untuk menyuarakan pendapat Anda dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Tidak lupa, jangan lewatkan kesempatan untuk memberikan suara Anda dalam pemilihan mahasiswa, pemilihan umum, atau proses pengambilan keputusan di kampus. Partisipasi Anda dalam memilih dan memberikan masukan akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan dan perwakilan yang Anda inginkan", pesan Sunny kepada mahasiswa pada akhir sesi wawancara dengan LPM Kentingan.

DUA LIMA TAHUN, REFORMASI MASIH BELUM SEPENUHNYA TERCAPAI

Penulis: Shalsabilla Rizna Naulia Putri & Andriana Sulistiyowati

Genap seperempat abad Indonesia menjejaki era reformasi. Masih teringat jelas tahun 1998 lalu bagaimana tumbangnya Orde Baru (selanjutnya disebut Orba). Demokrasi rakyat sukses merobohkan rezim Orba yang telah menduduki kursi panggung kepemimpinan 32 tahun lamanya. Tentunya reformasi yang diusung diharapkan membawa perubahan yang signifikan dalam lanskap politik Indonesia.

Era reformasi 1997/1998 diasumsikan sebagai era kebebasan di mana publik menuntut transparansi dalam segala bidang juga melakukan pembenahan-pembenahan di tubuh pemerintahan. Sebagai masa transisi menuju sistem politik yang lebih demokratis dan liberal, disertai dengan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah secara langsung, dan munculnya banyak partai politik. Pada era reformasi juga telah membawa amandemen konstitusi yang mengatur kebebasan berekspresi, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum di Indonesia. Namun, apakah 25 tahun reformasi di Indonesia benar-benar membawa dampak yang menggembirakan?

Sepak Terjang Masa Reformasi 25 Tahun Terakhir

Tanpa terasa perjalanan reformasi telah mencapai usia 25 tahun per 21 Mei 2023 lalu. Jika diibaratkan manusia, tentu reformasi sudah berada pada fase dewasa. Namun, tidak memungkiri reformasi yang lahir sebagai "bayi" dari perjuangan seluruh tanah air, kini tidak seperti yang telah diharapkan. Bukannya tumbuh dengan sehat dan tangguh, reformasi justru penuh cacat dari segi fisik maupun psikis. Apa jadinya jika reformasi penyakitan ini tidak ditangani dan makin membusuk serta mati akhirnya?

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Reza Ode Kirasa, Ketua HMI Cabang Surakarta Komisariat FH UNS, yang menyatakan bahwa reformasi masih belum maksimal dijalankan terkait enam tuntutan tahun 1998. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Axel Raphael Pandjaitan, anggota GMNI FH UNS, yang selanjutnya mengatakan supremasi hukum tidak tercapai terlihat dari banyaknya "mafia hukum".

Sebagai wujud keresahan sosial, reformasi membawa cita-cita besar masa depan Indonesia. Mengingat tuntutan reformasi untuk memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan, antara lain: Amandemen UUD 1945; penghapusan Dwifungsi ABRI; penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah); mewujudkan kebebasan pers; dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Namun, mewujudkan harapan besar masyarakat melalui reformasi bukanlah perkara yang mudah.

Mengenai persoalan hak asasi manusia (HAM), pada tahun 2023 Presiden Joko Widodo meluncurkan program penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat di Indonesia, terdapat 12 kasus pelanggaran berat, yaitu Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Talangsari Lampung 1989, Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh 1989, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999. Kasus lainnya Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Simpang KKA Aceh 1999, Wasior Papua 2001-2002, Wamena Papua 2003, dan Jambo Keupok Aceh 2003. Program penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Dikabarkan bahwa penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat ini realisasikan sejak akhir Juni.

Pada kasus pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pemerintah meluncurkan aksi pemberantasan korupsi tahun 2023-2024 pada 20 Desember 2022 lalu. Aksi pemberantasan korupsi tahun 2023-2024 melibatkan 76 kementerian dan lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten dan kota. Aksi tersebut terdiri dari 15 poin untuk mencegah tindakan korupsi, tetapi realitas di Indonesia saat ini tindak pidana korupsi masih marak terjadi. Hal tersebut terjadi tidak hanya dari lembaga pemerintahan, bahkan sampai institusi pendidikan. Bisa kita sebut salah satu kasus besar yang terjadi seperti kasus Bos produsen minyak goreng Palma, Surya Darmadi, yang merugikan negara hingga Rp78 triliun. Mega korupsi lainnya yaitu Asabri yang ditaksir mencapai Rp27 triliun. Ada pula Jiwasraya dengan kerugian negara mencapai Rp17 triliun. Sudah seperti tren, ternyata salah satu Kampus Besar di Solo pun tak ingin terlewat, dengan kerugian sebesar Rp57 miliar.

"PR besar menghapuskan KKN di Indonesia butuh kerjasama dari berbagai pihak dan juga komitmen kuat baik dari masyarakat, mahasiswa, juga para pemegang kuasa," tutur Axel guna mengupayakan peminimalan KKN.

Sementara itu, di bidang demokrasi jika merujuk pada riset indeks demokrasi yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia masih tergolong demokrasi cacat *(flawed democracy)* dengan capaian skor 6,71 pada tahun 2022. Merangkum dari riset EIU terdapat beberapa indeks demokrasi Indonesia yang dinilai sangat baik, yaitu fungsi pemerintah, partisipasi politik, proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, otonomi personal dan hak individu. Meskipun beberapa aspek demokrasi Indonesia dinilai tinggi, ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dan menjadi tantangan bagi Indonesia, termasuk kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak berserikat dan berorganisasi, supremasi hukum, dan budaya politik. Empat aspek itu yang menjadi PR penting untuk Indonesia menjelang tahun 2024 dalam melaksanakan pesta demokrasi besar, yakni pemilu nasional pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga Pilkada yang akan dilaksanakan serentak. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi.

Apa Kabar Demokrasi Era Reformasi Indonesia Saat Ini?

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, demokrasi dibuka seluas-luasnya di Indonesia. Rakyat bebas berpendapat dan banyak politikus mendirikan partai politik maupun berlomba-lomba dalam pemilihan. Negara demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, artinya kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Salah satu aspek penting dalam negara demokrasi adalah kebebasan berpendapat

FOKUS UTAMA

Foto: *Azfa Zaidan Naqi*

yang berarti rakyat memiliki hak untuk mengutarakan pendapat mereka tanpa takut akan represi atau pembatasan yang tidak sah.

Tuntutan reformasi masih relevan dalam konteks keadaan demokrasi di Indonesia saat ini. Reformasi birokrasi, sebagai salah satu tuntutan reformasi, bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik serta meminimalisir tindakan korupsi. Pelaksanaan reformasi birokrasi membutuhkan komitmen dan implementasi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik juga menjadi tuntutan penting dalam upaya memperkuat demokrasi di Indonesia.

Pemilu 2024 akan menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebagai warga negara, rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin. Dengan menggunakan hak pilihnya, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Selain itu, rakyat juga dapat menjadi calon pemimpin dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari kecurangan adalah prasyarat penting untuk membangun demokrasi yang kuat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan demokrasi di Indonesia. Rakyat memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan dan pengambilan kebijakan di tanah air.

Namun, masih sering menjadi masalah bahwa pemilu di Indonesia tidak luput dari praktik kecurangan. Meskipun KPU telah melakukan upaya untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2024, masih terdapat beberapa kasus kecurangan yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Kasus kecurangan tersebut berupa manipulasi suara, intimidasi, atau penggunaan uang untuk mempengaruhi pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengatasi praktik kecurangan pada pemilu.

Untuk mengatasi praktik kecurangan pada pemilu diperlukan adanya lembaga pengawas yang independen dan profesional. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi keberjalanan pemilu dan menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keberjalanan pemilu menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Masyarakat dapat menjadi saksi dalam penghitungan suara dan melaporkan jika terdapat kecurangan dalam pemilu.

Suara masyarakat yang terbatasi, bahkan di ruang akademik; kerapnya represi pada mereka yang kritis dan peka terhadap kekuasaan; KKN yang seolah olah sudah seperti lahan budidaya jamur; serta kekuasaan yang disalahgunakan, "*power tend to corrupt*". Riuh dunia demokrasi sudahlah lebih dari cukup untuk menjelaskan bagaimana 25 tahun ini reformasi diwujudkan.

DINAMIKA PERGERAKAN MAHASISWA DAN KEBIJAKAN KAMPUS: STUDI KASUS AKSI JENGUK REKTOR UNS JUNI 2023

Penulis: Tim Riset LPM Kentingan

Dinamika perpolitikan tidak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Dinamika yang muncul terjadi dalam kehidupan berdemokrasi. Dinamika politik tidak hanya dalam lingkup nasional, namun dapat juga mewarnai politik kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam politik kampus dapat berupa aspirasi yang ditujukan untuk memperbaiki sebuah sistem yang kurang baik. Di dalam kampus itu sendiri terdapat generasi intelektual yang diharapkan sebagai saluran aspirasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mahasiswa sebagai salah satu unsur dari kampus dapat memberikan kontribusi dalam iklim politik di kampus. Isu yang terjadi dalam lingkungan kampus UNS mempengaruhi dinamika politik kampus.

Berangkat dari dinamika yang terjadi, Tim Riset LPM Kentingan melaksanakan riset mengenai fenomena yang terjadi dalam internal kampus Universitas Sebelas Maret untuk menyajikan analisa dari sumber yang diperoleh untuk mengetahui bagaimana dinamika pergerakan mahasiswa dan kebijakan kampus dalam kasus Aksi Jenguk Rektor UNS. Riset kualitatif ini akan membahas bagaimana keterlibatan mahasiswa sebagai bagian dari unsur kampus dalam menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal kampus.

Hasil riset ini diperoleh sumber data dari wawancara dan observasi, yang dilaksanakan dalam jangka waktu pada tanggal 11-16 Juli 2023. Hanif, narasumber penelitian ini, merupakan seorang menteri Aksi dan Propaganda BEM UNS 2023. Wawancara terhadap narasumber dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang kemudian disampaikan beberapa pertanyaan dengan jenis pertanyaan terbuka. Kemudian dari sumber data tersebut dihimpun dan dianalisis, yang kemudian memberikan hasil riset yang diambil dari pandangan narasumber dan riset data kualitatif yang dituangkan dalam bentuk paragraf.

Komunikasi dan Aspirasi Mahasiswa dalam Merespons Kebijakan Kampus

BEM universitas memiliki peran sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa dan pengelola atau lembaga universitas, dalam arti lain BEM berperan sebagai perwakilan dari mahasiswa untuk menyalurkan keresahan, saran dan aspirasi kepada lembaga universitasnya sebagai wujud cinta dan kepedulian terhadap kesejahteraan kampus secara umum.

Dalam lingkup UNS sendiri, Hanif yang merupakan seorang menteri Aksi dan Propaganda sekaligus menjadi narasumber wawancara kami mengatakan bahwa dalam penyampaian aspirasi yang mereka lakukan, langkah yang paling pertama adalah dengan **mengumpulkan keresahan dari para mahasiswa UNS dari adanya kebijakan kampus yang bersifat merugikan.** Metode pengumpulan tersebut yaitu dengan mengadakan konsolidasi terbuka dengan mengundang seluruh mahasiswa UNS untuk menginventarisir keresahan-keresahan mahasiswa.

Setelah menginventarisir keresahan mahasiswa, Hanif juga mengatakan dalam wawancara bahwa mereka sebagai lembaga eksekutif akan **membuka audiensi kepada pihak kampus**. Audiensi biasanya dipakai oleh mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mahasiswa. Apabila dari audiensi tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, maka mahasiswa akan melaksanakan **aksi sebagai simbol ketidakpuasan terhadap kebijakan kampus.**

Sosialisasi Kebijakan Kampus

Kami juga mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana kampus melakukan sosialisasi mengenai kebijakan yang dibuat. Dalam hal ini, **narasumber menjelaskan bahwa kampus belum melakukan sosialisasi dalam bentuk apapun kepada mahasiswa.** Lebih jauh, pihak kampus juga tidak mengundang pihak BEM dalam kapasitasnya sebagai perwakilan mahasiswa mengenai sosialisasi kebijakan kampus.

Sebagai konsekuensi dari uraian jawaban di atas, maka dapat diketahui bahwa kampus tidak melakukan sosialisasi apapun kepada mahasiswa ataupun perwakilannya terkait dengan kebijakan yang diambil, khususnya pada kebijakan yang diajukan sebagai isu utama aksi jenguk kampus pada 8 Juni 2023. Berdasarkan hal ini, terdapat indikasi bahwa pengetahuan mahasiswa terhadap kebijakan kampus didasarkan pada pengalaman mahasiswa pada saat kebijakan tersebut telah terealisasikan. Dapat diindikasikan pula bahwa mahasiswa mempunyai peran yang **tidak signifikan** pada proses pengambilan kebijakan kampus

.

Respons Kampus terhadap Aspirasi Mahasiswa

Menilik kembali pada aksi bertajuk "Jenguk Rektorat" yang dilakukan oleh mahasiswa UNS pada hari Kamis, 8 Juni 2023 yang bertujuan untuk mengajukan beberapa tuntutan. Adapun beberapa poin tuntutan tersebut adalah transparansi atas proses penerimaan mahasiswa baru, mengembalikan kebijakan jaket almamater yang sudah termasuk dalam UKT karena melanggar Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017, meminta pihak kampus untuk memperbaiki layanan birokrasi serta sarana dan prasarana kampus, menyegerakan pencairan dana reward prestasi, dana delegasi serta dana kegiatan yang sebelumnya telah dijanjikan.

Lebih jauh, mahasiswa juga menuntut agar pihak kampus ikut andil dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dengan membuat peraturan terkait dengan kasus tersebut serta menerapkan Permendikbud tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus secara tegas. Pelaksana Tugas Wakil Rektor IV, Irwan Trinugroho, memberikan respons dengan mengatakan bahwa pihak rektorat menerima aspirasi dari mahasiswa dan akan memilah mana yang akan ditindaklanjuti. Untuk kasus kekerasan seksual di kampus dirinya mengatakan bahwa sudah ada Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Sehingga untuk segala bentuk kasus kekerasan seksual sudah masuk dalam ranah Tim Satgas PPKS. Meskipun begitu, akhir dari aksi tersebut ditutup dengan rasa kekecewaan mahasiswa diakibatkan oleh tidak ada pihak rektorat yang mau untuk menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan tuntutan diatas.

Berdasarkan uraian di atas, kami melakukan analisis komparatif mengenai respons pejabat kampus terhadap kondisi yang terjadi. Sejauh ini, **nyatanya tidak ditemukan adanya progres yang tegas mengenai apakah aspirasi mahasiswa benar-benar dipilah untuk dipertimbangkan.** Meskipun demikian, realisasi dari tuntutan mahasiswa tersebut utamanya dalam **penerapan Permendikbud tentang kekerasan seksual terwujud dengan Tim Satgas PPKS yang berupaya untuk melibatkan mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam permasalahan tersebut.** Upaya yang dilakukan berupa membuka *open recruitment* anggota serta *volunteer* Satgas PPKS dari pihak mahasiswa. Pada tanggal 12 Juni 2023 Satgas PPKS UNS menerima kunjungan dari Kementerian Kesetaraan Bersama, Kedirjenan Perlawanan Kekerasan Seksual BEM UNS untuk membahas potensi untuk berkolaborasi bersama memberantas kasus kekerasan seksual di kampus.

***

Dinamika politik yang selalu mewarnai kehidupan mencerminkan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara demokrasi. Politik kampus yang terjadi dengan melibatkan berbagai unsur, mendukung untuk mengawasi dan memperbaiki sistem yang ada. Riset yang dilakukan memperoleh hasil bahwa adanya peran dari mahasiswa sebagai penghubung menyampaikan keresahan dan aspirasinya yang dilakukan dengan mengadakan konsolidasi terbuka, membuka audiensi kepada pihak kampus, bahkan melaksanakan aksi. Adanya penyampaian keresahan dan aspirasi tersebut menurut narasumber hingga saat ini pihak kampus belum melakukan sosialisasi kepada mahasiswa ataupun perwakilan dalam bentuk apapun. Tuntutan yang diajukan pada Kamis, 8 Juni 2023 mendapat tanggapan dari Pelaksana Tugas Wakil Rektor IV Irwan Trinugroho. Namun, rasa kecewa tetap menyelimuti dikarenakan tidak adanya pihak rektorat yang menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan tuntutan yang disampaikan. Salah satu tuntutan yang direalisasikan adalah dengan membuka *open recruitment* anggota serta *volunteer* Satgas PPKS untuk melibatkan mahasiswa.

Dengan adanya persoalan yang terjadi, pihak kampus diharapkan untuk lebih memperhatikan langkah maupun output nyata sebagai wujud kampus benar-benar mempertimbangkan aspirasi dari mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa dalam mengambil langkah pergerakannya dalam bentuk audiensi sebaiknya harus melalui kajian yang lebih mendalam dan matang. Mahasiswa yang memiliki peran sebagai *agent of change, guardian of value, iron stock, moral force,* dan *social control,* dapat menjadi acuan dalam melakukan politik kampus yang berkualitas, serta menciptakan sebuah sistem untuk menjadi lebih baik dan tercipta komunikasi yang baik agar tidak ada pemikiran yang negatif dari sebelah pihak.

AKSI JENGUK REKTORAT UNS JUNI 2023

Poin tuntutan mahasiswa :

- Transparansi atas proses penerimaan mahasiswa baru
- Mengembalikan kebijakan jaket almamater yang sudah termasuk dalam UKT
- Ikut andil dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus
- Memperbaiki layanan birokrasi serta sarana dan prasarana kampus
- Mencairkan dana reward prestasi, dana delegasi serta dana kegiatan yang telah dijanjikan.
- Melakukan transparansi mengenai UKT dan RKAT

RESPONS REKTORAT ?

Tidak adanya progres yang tegas mengenai apakah aspirasi mahasiswa benar-benar dipilah untuk dipertimbangkan. Meskipun demikian, realisasi dalam penerapan Permendikbud tentang kekerasan seksual terwujud dengan Tim Satgas PPKS yang berupaya untuk melibatkan mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dengan rekruitmen anggota dan volunteer dari pihak mahasiswa

Dengan adanya persoalan yang terjadi, pihak kampus diharapkan untuk lebih memperhatikan langkah maupun output nyata sebagai wujud kampus benar-benar mempertimbangkan aspirasi dari mahasiswa.

Selanjutnya, mahasiswa dalam mengambil langkah pergerakannya dalam bentuk audiensi sebaiknya harus melalui kajian yang lebih mendalam dan matang.

Sumber : Wawancara dan observasi, 11-16 Juli 2023. dengan narasumber, Hanif, menteri Aksi dan Propaganda BEM UNS 2023

CITRA ATAU JATI DIRI?

Penulis: Mia Puspita Normawati

Pemilu 2024 tinggal menghitung bulan. Berbagai lapisan masyarakat sudah mulai membicarakannya, terutama dari pihak partai-partai yang akan ikut andil dalam perhelatan akbar lima tahun sekali ini. Salah satu hal yang sedang digembar-gemborkan ialah penyebaran berita dan *personal branding* dari masing-masing tokoh politik yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden Indonesia pada tahun 2024 mendatang.

Tak seperti dahulu yang mana suasana akan makin memanas setiap menjelang pemilu dengan adanya saling sindir dan serang dalam membentuk citra diri, dewasa ini terdapat beberapa perbedaan yang cukup kontras. Dimulai dengan penggunaan media sosial yang makin marak hingga konten-konten menarik yang digunakan para tokoh politik. Pers tidak lagi menjadi satu-satunya media untuk mendapatkan informasi yang membahas mengenai para tokoh politik.

Perbedaan ini bisa dilihat dalam tulisan di majalah Kentingan edisi 2015, pada masa itu politik nasional jauh dari jangkauan pers mahasiswa. Politik kala itu sangat dinamis dan pers mahasiswa tidak memiliki akses yang leluasa untuk bisa menjamah sumber informasi. Kala itu, pers mahasiswa paling *banter* hanya bisa membuat "opini mahasiswa" ihwal politik nasional. Mahasiswa kesulitan dalam mendapatkan data valid mengenai informasi politik, bisa pun harga yang harus dibayar sangatlah besar.

Berbeda dengan sekarang, tak sulit mendapatkan informasi mengenai berita politik terbaru. Sudah banyak bertebaran kabar burung di dunia maya atau dunia media sosial yang sedang marak-maraknya digunakan oleh berbagai kalangan. Jika pada majalah Kentingan edisi 2019 membahas tentang Youtube yang menjadi sarana penyebaran konten berbentuk video sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan, pada tahun 2023 ini terdapat Instagram yang menggeser eksistensi Youtube. Dengan berbagai fitur tambahan yang bisa digunakan menjadikan Instagram sangat *user friendly*.

Gubernur Jawa Barat saat ini, Ridwan Kamil, memiliki akun Instagram pribadi yang berisi konten tentang kinerja selama menjabat sebagai gubernur. Konten tersebut dikemas dalam bentuk video pendek dengan *backsound* instrumen yang cenderung datar dan memiliki tempo seragam. Informasi yang disajikan masih seputar Jawa Barat hingga keseharian Ridwan Kamil sebagai gubernur.

Begitu pun dari akun Instagram pribadi Ketua Umum Partai Gerindra yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, terlihat sedikit berbeda. Kesan elegan dan estetik menghiasi *feeds* yang ditampilkan. Keseluruhan konten berisi foto dengan *angle* proporsional serta *caption* baku, tetapi masih nyaman dibaca anak muda. Sedikit sekali konten video dalam akun Instagram-nya. Kegiatan yang diabadikan adalah kegiatan Prabowo dalam mengunjungi daerah-daerah di Indonesia atau kegiatan partai Gerindra dalam menjalankan program kerja.

Sedangkan pada akun Instagram Gubernur Jawa Tengah yang juga sudah diresmikan sebagai bakal calon presiden 2024 dari partai PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, jauh lebih beragam. Konten yang disajikan lebih bervariasi mulai dari foto, video panjang, hingga *reels*. Berbeda dengan akun Ridwan dan Prabowo, akun Instagram milik Ganjar jauh lebih terlihat kekinian. Dimulai dalam penggunaan *backsound* lagu-lagu *western*, K-Pop, hingga J-Pop menghiasi konten-kontennya. Perjalanan dinas, *blusukan* dengan warga, promosi lokasi wisata daerah Jawa Tengah, konten olahraga, hingga konten romantis bersama istri tak luput dalam menghiasi akunnya. Bahkan, baru-baru ini, Ganjar juga mengunggah video mengenai tips dan trik untuk pasangan *long distance relationship* (LDR), hal yang sangat erat kaitannya dengan generasi zaman sekarang.

Tak hanya mengenai hal-hal yang berbau konten serius, ada juga konten humor yang diunggah. Humor sekarang tak pandang bulu, semua lapisan masyarakat bisa menjadikan humor sebagai bahan konten dalam akun media sosialnya, dari masyarakat umum hingga pejabat sekelas gubernur pun bisa menggunakannya sebagai bentuk pendekatan diri kepada masyarakat. Hal ini pernah menjadi bahasan fokus utama majalah Kentingan tahun 2012 yang tertulis "Diakui atau tidak humor menjadi kebutuhan yang sejajar dengan sandang pangan. Kesejajaran itu tampak pada tingkat 'pemakaian' humor. Adanya ketegangan dan kelucuan seperti 'Yin-Yang' kehidupan yang seimbang sehingga kadar tegang manusia harus dilumerkan dengan kelucuan. Hal semacam ini yang kemudian menjadikan humor sebagai katarsis."

Apa yang dilakukan oleh para tokoh politik Indonesia kini bukan hal baru lagi, hanya saja media yang digunakan berbeda dengan dahulu. Ketika dahulu penggunaan baliho dan spanduk-spanduk besar di pinggir jalan raya cenderung mendominasi, kini cukup dengan menggunakan sosial media sudah mampu menjadi ajang memperkenalkan diri kepada masyarakat.

Dari sekian banyak akun dan juga konten yang ada, sudah menjadi rahasia umum bahwa apa yang tersaji bukanlah murni dari diri pemilik akun. Terdapat tim admin sosial media yang melakukan riset, produksi konten, dan *editing* hingga akhirnya dinyatakan layak untuk diunggah dalam akun sosial media para tokoh tersebut.

Segala sesuatu di dunia ini pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Begitu pula penggunaan sosial media sebagai bahan *personal branding* tokoh politik Indonesia. Sisi baik dari adanya kemudahan sosial media memberikan kemudahan dalam memoles citra diri agar tampak menawan dan menarik perhatian warganet. Namun, sudah barang tentu itu adalah hal yang sengaja dibuat dan dipilih untuk ditampilkan kepada khalayak umum. Kita sebagai masyarakat umum yang tidak bersinggungan langsung dengan mereka tak mudah mengenali mana yang merupakan citra diri dan mana yang menjadi jati diri dari calon boneka partai ini.

Pemilu 2024 tinggal menghitung bulan, suasana akan mulai terasa memanas. Media sosial akan menjadi padang "kurusetra" antek-antek dan simpatisan fanatik para calon presiden yang akan ditempurkan. Kita sebagai masyarakat yang melek teknologi harus pandai wawas diri dan bersiap dalam menghadapi arus informasi yang akan makin banyak dan beragam. Dengan mengetahui cara bermain para tokoh politik beserta timnya, menjadikan kita selangkah lebih siap untuk menguak citra diri dan mengetahui jati diri dari para tokoh politik ini.

Ilustrasi: *Hasna Farrosah Diwany*

Kentingan

Ada Isu Apa Hari Ini?

Kami mengajakmu untuk menyuarakan kegelisahan seputar kampus dalam wadah suara mahasiswa, wadah pemikiran yang berarti.

Sampaikan suaramu dalam **Bank Isu LPM Kentingan** dengan mengakses pranala berikut:

uns.id/FormBankIsuLPMKentingan

saluransebelas.com saluransebelas saluransebelas

IRONI KEKUASAAN DALAM RANAH PENDIDIKAN

Penulis: Sabila Soraya Dewi

Bicara tentang keterkaitannya, memang benar bahwa pendidikan tidak pernah bisa benar-benar lepas dari politik. Pasalnya, politik negara berperan besar dalam menentukan arah pengembangan pendidikan. Sebaliknya, pendidikan pun menjadi pilar penting dalam melestarikan arah kekuasaan negara. Sejalan dengan pendapat Michael Apple dalam *Education and Power*, kebudayaan politik negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Di Indonesia sendiri, pendidikan menjadi hak dasar yang diberikan kepada seluruh warga negara. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Selain itu, tertulis pula dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" dan ayat (2) yang berbunyi: "Setiap negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai."

Idealnya, antara pendidikan dan politik (atau kekuasaan) harus mampu bersinergi secara positif untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu menghasilkan generasi masa depan yang cerdas dan bermoral. Akan tetapi, realitanya tidak seindah itu. Makin ke sini, ranah pendidikan malah menjadi ladang untuk berebut kekuasaan dan meraup uang. Dalam konteks perguruan tinggi, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia saat ini, mengeluarkan perubahan peraturan terkait perubahan perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbasis Hukum (PTN-BH) pada tahun 2020. Dituliskan dalam peraturan tersebut bahwa diberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi perguruan tinggi negeri untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Perguruan tinggi yang tergolong sebagai PTN-BH mendapatkan hak lebih untuk mengatur urusan kampusnya sendiri, tidak terkecuali masalah keuangan. Pemberian fleksibilitas ini tentu menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu pendapat yang diamini lumayan banyak kalangan adalah tingginya kemungkinan komersialisasi pendidikan. Melonjaknya uang pangkal dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester menjadi hal yang telah marak terjadi belakangan ini.

Tidak perlu jauh-jauh. Lihat saja kasus di kampus tercinta kita (Universitas Sebelas Maret) saat ini. Terhitung tiga tahun sejak UNS bertransformasi menjadi PTN-BH, kita sudah bisa melihat banyak perubahan yang terjadi. Kita mulai saja dari yang paling mencolok, yaitu bangunan mewah yang akrab disebut sebagai Tower UNS. Sebagai mahasiswa angkatan 2020—tahun yang sama dengan berubahnya UNS menjadi PTN-BH—keberadaan tower nan megah itu kadang kala masih saya anggap sebagai halusinasi belaka. Pasalnya, kemegahan tower tersebut sangatlah bertolak belakang dengan kenyataan sarana dan prasarana yang ada di tiap fakultas. Kemudian, yang tak kalah mencengangkan lagi adalah naiknya biaya pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri, yang tadinya berada di angka Rp350.000, naik menjadi Rp500.000 (diatur dalam Keputusan Rektor UNS Nomor 428/UN27/HK/2023). Tentu angka tersebut bukanlah sesuatu yang bisa ditanggungbanyakkalangan. Terlebihlagi, tidakadaketerangan tertentu mengapa biaya pendaftaran ini naik cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa biaya ini akan naik lebih mahal lagi, bahkan bisa mencapai angka jutaan.

Bukannya mau suuzan, tetapi kebebasan pengaturan arus perputaran uang yang dipegang oleh kampus sendiri tentu meningkatkan kemungkinan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Jabatan-jabatan di posisi manajemen suatu kampus tentu akan

SABILA SORAYA (PEMIMPIN REDAKSI LPM KENTINGAN 2023)

menjadi 'rebutan' bagi para oknum. Mending apabila jabatan tersebut diperebutkan atas dasar alasan mulia, yaitu untuk membawa kampus menjadi lebih bermartabat sebagai pencipta generasi berprestasi. Namun, apa jadinya bila perebutan tersebut terjadi atas dasar alasan yang lain?

Kacaunya Prosesi Pilrek

Tahun 2023 (seharusnya) menjadi tahun final kepemimpinan Jamal Wiwoho sebagai Rektor UNS. Dan memang begitu. Setelah melalui proses seleksi berkas yang panjang, para calon rektor baru telah diperkenalkan ke publik sejak Oktober tahun lalu. Ketiga calon tersebut adalah Sajidan, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Hartono. Pada 11 November 2022—hari pemilihan rektor oleh MWA (Majelis Wali Amanat)—Sajidan terpilih menjadi rektor baru masa bakti 2023–2028. Dari sinilah kejanggalan-kejanggalan mulai terjadi.

Sejak Sajidan resmi terpilih menjadi rektor baru, muncul tagar-tagar yang menyebarkan isu kecurangan seperti #RektorUNSCurang, #TolakSajidan, #SajidanCurang, #SajidanTidakPantas, sampai #SajidanMainBusuk. Tagar tersebut disebarkan secara spam oleh akun-akun buzzer anonim di Twitter dan Instagram, dilengkapi foto Sajidan yang terpampang di mana-mana. Tentu kampanye ini membuat siapa pun mengernyitkan dahi. Seperti yang kita tahu, prosesi pemilihan rektor sepenuhnya dilakukan oleh MWA. Yang mengetahui alur dan jalannya pemilihan rektor tentu, *ya*, orang-orang MWA. Mahasiswa dan orang awam lainnya hampir bisa dibilang tidak ada keterlibatannya, tetapi mengapa kampanye ini ditujukan ke publik? Mengapa laporan tersebut tidak langsung ditujukan ke pihak yang berwenang?

Tidak berhenti di situ. Hanya selang beberapa hari sebelum pelantikan rektor terpilih, Menteri Nadiem Makarim tiba-tiba mengeluarkan peraturan yang membekukan MWA UNS dan memerintahkan pelantikan rektor dibatalkan. Tidak ada alasan spesifik yang dituliskan. Hanya keterangan bahwa MWA UNS dianggap telah melanggar peraturan yang ada. Yang membuat situasi lebih panas lagi, MWA UNS langsung menanggapi Permen tersebut dengan mengeluarkan siaran pers dengan judul bombastis: "Perampokan Kedaulatan, Peraturan Batal Demi Hukum". Pada intinya MWA UNS menolak untuk dibekukan dan akan tetap melantik rektor baru terpilih pada tanggal 11 April 2023. Percekcokan antara Mendikbudristek dan MWA UNS ini sontak mengundang kegaduhan di antara civitas academica, terutama mahasiswa. Isu pilrek menjadi gosip hangat di antara mahasiswa, bahkan BEM UNS sampai mengeluarkan *reels* dengan judul "Kemendikbud: Pembegal Otonomi Kampus" dan kajian berjudul "Perampasan Otonomi Kampus". Postingan tersebut pun viral, bagaikan menjadi platform *lambe turah*-nya mahasiswa UNS, karena semua mahasiswa dari berbagai fakultas dan angkatan berlomba-lomba membeberkan opininya di sana.

Bak sinetron, drama pemilihan rektor UNS terus berlanjut tiada habisnya. Melalui Surat Keputusan Kemendikbud Ristek Nomor 29985/RHS/M/08/2023, Menteri Nadiem Makarim mencopot jabatan gelar profesor dua Guru Besar UNS: Hasan Fauzi, mantan Wakil Ketua MWA UNS, dan Tri Atmojo, mantan Sekretaris MWA UNS, pada tanggal 26 Juni 2023. Pencopotan itu dilakukan atas dasar bahwa kedua pejabat tersebut telah melanggar disiplin peraturan di UNS. Situasi makin panas ketika Hasan Fauzi menanggapi bahwa ia tidak melakukan pelanggaran apa pun, hanya melaporkan kepada menteri mengenai adanya dugaan korupsi sebesar 57 miliar di UNS. Sampai saat kolom ini ditulis, kasus masih berlanjut dan belum menemukan titik terang.

Terkenal Bukan karena Prestasi

Entah harus bangga atau malu. Nama kampus tercinta kita ini akhirnya terpampang di mana-mana—di media besar nasional, bahkan sampai ke acara TV—tapi bukan prestasi atau inovasi yang dihasilkan civitas academicanya, melainkan karena huru-hara para oknum yang saling menyalahkan. Bukan masalah siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi sebagai sebuah institusi pendidikan, terjadinya masalah serunyam ini tentu sangat disayangkan. Para petinggi sebuah institusi pendidikan yang idealnya bekerjasama memberikan pengabdian terbaik untuk mencerdaskan bangsa, malah saling "cekcok". Yang lebih sedih lagi, mahasiswa hanya bisa menghela nafas menyimak keributan yang ada, sembari berharap masalah-masalah ini tidak akan mempengaruhi proses pembelajaran.

Apabila ada nominasi "Kampus dengan Isu Pemilihan Rektor Terdahsyat", maka mungkin UNS sudah menempati peringkat pertama. Bukannya sok naif tentang politik, tetapi saya rasa semua masalah ini seharusnya bisa dihindari. Esensi sebuah universitas adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bukannya terdistraksi oleh hal lain seperti kasus yang sedang terjadi saat ini. Meskipun rasanya hanya akan berakhir menjadi angan-angan belaka, saya tetap berharap situasi UNS bisa membaik dan kembali(?) kondusif. Jangan sampai kepercayaan mahasiswa—dan khalayak umum—hilang sepenuhnya kepada kampus. Jangan hanya mahasiswa saja yang dituntut untuk terus mencetak prestasi. Pejabat kampus juga harus terus menjaga citra baik kampus, bukannya malah memicu gosip yang menjadi bulan-bulanan masyarakat.

DIKSI POLITIK, POLITIK DIKSI

Penulis: Fatih Abdulbari

Belum lama, aku bertemu seorang akademisi yang tiba-tiba berkata, "Saya pilih Anies, karena dia akademisi dan sempat menjadi rektor", meskipun sebenarnya aku tidak bertanya sama sekali. Belakangan, aku sedikit kagum dengan cara beliau mengucapkan kata-kata itu tanpa seolah terdengar memihak, yang sedikit-banyak membuatku tak awas dengan terucapnya kalimat politis dari topik yang tengah diangkat. Bagaimana menjelaskannya ya, bagiku kalimat itu keluar dengan *smooth* sekali, lancar jaya.

Sejujurnya aku punya persepsi yang agak menghormat pada si akademisi. Aku tahu karya-karyanya, tahu apa yang ia perbuat untuk publik. Penghormatan itu sedikit banyak membuatku agak buta dan "kecolongan" ketika ia mengucapkan kalimat tadi. Tapi caranya menyampaikan kalimat itu perlu dipuji, dengan sebelumnya disisipi sedikit humor, satir dan ironi.

Aku tentu tak mau berpolitik, apalagi kampanye meminta pembaca memilih pilihanku yang berwarna putih (baca: coblos bagian putihnya saja, golput), hanya saja peristiwa itu mengingatkan pada hal-hal lain. Beberapa kali, meski tidak sering, aku menonton acara-acara politik di TV yang menampilkan banyak politisi nasional. Pernah sekali, belum lama, aku dijebak seorang kawan untuk datang ke acara diskusi yang di tengah jalan berubah menjadi acara kampanye seorang capres. Bodohnya, aku tidak menyadari beberapa politisi yang hadir dalam diskusi tersebut sebagai pembicara jelas-jelas berafiliasi langsung pada salah satu calon.

Dibandingkan dengan gaya penyampaian sang akademisi yang kutemui, ucapan mereka jadi amat urakan. Saling lempar cacian, sindiran, argumen yang diucapkan ber-ulang-ulang sampai jadi basi, mengangkat suara sampai serak, dan seterusnya. Iklim politik kita seolah tak mengenal konsep penghalusan kata, apalagi menggunakan humor, satir, dan ironi. Semuanya hanya berteriak, suara mana yang paling keras, seolah makin keras makin benar. Menjemukan, menyebalkan.

Kita ingat George Orwell pernah berujar, "Bahasa politik dirancang untuk membuat kebohongan terdengar jujur dan pembunuhan menjadi dihormati". Bahasa memainkan peranan besar dalam politik sebagai sebuah alat peraih dan pengontrol kekuasaan. Bagaimana tidak, kita menilai seorang calon pemimpin, visinya, moralitas, dan seterusnya lewat sarana bahasa. Seorang politisi atau pemimpin yang cerdas juga akan terus menggunakan bahasa untuk mempertahankan kuasanya.

Tentu kita ingat, orang semacam Barack Obama bisa memikat banyak sekali warga Amerika melalui pidato-pidatonya. Kita belakangan juga melihat bagaimana Donald Trump yang menjaring kemenangan lewat diksi-diksi populis, juga kerap berkelit dari tuduhan ini dan itu lewat pemilihan diksi yang (sepertinya) dipikirkan serius. Bahasa ada di sana, ia merangkul sekaligus bisa memecah-belah.

Artinya politik tak mungkin berjalan tanpa bahasa. Penggunaan bahasa, pemilihan diksi, satir, humor, serta metafora tak mungkin dihasilkan dari pikiran dangkal yang tidak punya pengalaman-pergulatan intelektual. Intelektualitas tidak sekadar *njedul* dari eksplorasi literatur, melainkan juga lewat pencarian, penelaahan serta pergelutan atas bahasa. Kita bisa mengukur atau menilai kadar intelektualitas

FATIH ABDULBARI (PENULIS BUKU)

seseorang dari caranya berbahasa.

Dalam serial drama Amerika yang sangat populer *House of Cards* (2013-2018), bisa kita lihat bagaimana bahasa digunakan dengan sangat baik dalam politik. Frank Underwood yang diperankan Kevin Spacey sangat menjaga serta menata bahasanya di depan kawan dan lawan politik, di saat yang sama ia juga menggunakan bahasa untuk mempengaruhi, mengancam, meraih simpati, dan seterusnya hingga bisa meraih posisi puncak sebagai presiden. Meski memang berupa sebuah kisah fiksi, kita bisa menangkap secara konseptual bagaimana bahasa digunakan dalam politik praktis.

Konon katanya, di masa Orde Baru, jika rapat dengan Presiden Soeharto dan kemudian ia berkata, "Apa perlu begitu?", artinya ia tidak setuju dengan rencana atau usulan yang sedang dibahas. Perlu kecerdasan untuk mengucapkannya tanpa terdengar tak setuju, dan perlu kecerdasan pula untuk menangkap maksud dari kalimat sederhana itu. Tentu kita tahu bahwa Soeharto menganggap diri sebagai raja Jawa yang berpolitik dengan cara khas tertentu, lewat pintu belakang, lewat penggunaan diksi konotatif, dan seterusnya.

Maka politik sebenarnya adalah masalah diksi. Seberapa sering di beranda-beranda media sosial kita melihat kutipan-kutipan dari tokoh terkenal? Atau seberapa sering kita melihat politisi mengutip kutipan itu untuk memperkuat argumennya? Seberapa kita awas pada diksi-diksi serta wacana yang diucapkan politisi di TV dan media sosial? Apakah kita terpengaruh atau bahkan menjadi amat senang, atau justru sebaliknya malah jadi amat benci?

Di sisi lain, seperti kata Orwell, diksi juga digunakan untuk menutup-nutupi, untuk membohongi, mengadu domba, untuk menjadi pembenaran atas kesalahan atau ketidakmampuan. Bahasa tidak *innocent* secara asali, ia penuh dengan generalisasi yang menutupi realitas. Kekurangan inilah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berpolitik.

Bahasalah yang dalam kisah di awal tadi membuatku tidak awas bahwa dia sedang berkampanye. Cara cerdas si akademisi untuk mengolah diksi dan penyampaian kebahasaan membuatku terpapar pada wacana kampanye politik secara langsung, yang jauh-jauh hari sebenarnya sudah kucoba tuk hindari sebisa mungkin.

Pengalaman berbeda ketika menonton politisi lewat TV atau secara langsung yang kuanggap menjemukan itu, juga lahir dari konteks dasar yang sama: bahasa. Meski bosan dan jemu, aku menangkap kejemuan itu berasal dari retorika yang diucapkan berlebihan tanpa adanya usaha untuk mengolah diksi. Wacana berulang yang kemungkinan besar adalah "pesanan" ketua partai itu sebenarnya menunjukkan kualitas intelektual politisi-politisi yang sedang kita tonton. Singkatnya, mereka kuanggap tak punya kemampuan kebahasaan sehingga hanya mampu membeo.

Bahasa, seperti yang kita bahas di atas, juga memiliki kuasa untuk menutupi, berbohong, menyampaikan diksi konotatif. Aku secara pribadi bukan penganut paham Machiavellian dalam politik yang menganggap politik hanya masalah kekuasaan. Bagiku politik adalah masalah kepentingan, dan kepentingan itu tersalurkan lewat pertarungan bahasa. Jika begitu, kita perlu awas pada setiap kata yang terucap dari mulut setiap orang. Apa kepentingannya?

Maka kita bisa menganalisis sendiri politik praktis dalam keseharian. Misalnya, ada seorang rektor sebuah universitas dengan agak terbata membaca teks (yang kalau melihat dari keterbatasan beliau dalam membaca, teks seperti tidak ditulis sendiri) berkata, "Menghimbau agar legowo", kepada dua profesor yang baru saja dicopot dari jabatannya serta lembaganya baru saja dibubarkan sepihak sembari si rektor sendiri bersembunyi di balik bahu dan kuasa seorang menteri. Lantas perlu kita tanyakan: ada apa? Apa kepentingannya? Apa ada yang ditutupi?

Tentu hal ini hanya misalnya.

JELAJAH LORONG KARYA SELASAR NGARSOPURO

Penulis: Siwi Widiyanti

Seni merupakan keahlian dalam mengolah sebuah karya yang bermutu serta mengandung nilai-nilai estetika sehingga dapat dinikmati dan dirasakan secara masif oleh indra-indra yang dimiliki manusia. Tahukah kalian, hanya dengan menikmati sebuah karya seni sebenarnya sudah cukup membantu penyegaran tubuh dari pikiran yang jenuh *lho*, sehingga otak akan jauh lebih siap untuk kembali fokus menjalankan rutinitas sehari-hari. Dilansir dari World Economic Forum, sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan dalam *Journal of Nutrition, Health, and Aging*, menunjukkan bahwa selain kesehatan fisik, kesehatan pikiran juga perlu dijaga. Dengan melakukan *refreshing* atau penyegaran otak secara berkala dapat mengurangi risiko stres penyebab turunnya kesehatan yang dapat berujung pada kematian. Sangat mencengangkan, bukan?

Keinginan untuk menghilangkan kepenatan pikiran dengan *refreshing* ringan tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam pada akhirnya mengantarkan langkah saya menuju selasar Ngarsopuro atau lebih tepatnya di Jl. Diponegoro, Keprabon, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Tempat yang dahulu hanyalah sebuah jalan pedestrian biasa layaknya jalanan di Kota Solo, tetapi sejak tahun 2020 jalan sepanjang 110 meter tersebut disulap menjadi panggung bagi para penggiat seni atau artisan dari berbagai daerah untuk memamerkan hasil tangannya. Seni yang disajikan bagi para pengunjung sangat beragam, mulai dari seni tari, seni rupa, seni kriya, hingga seni musik. Tak cukup sampai di situ, pengunjung dapat membeli hasil karya para artisan sebagai oleh-oleh, bahkan mengikuti pelatihan atau *workshop* yang diselenggarakan oleh masing-masing artisan, *lho*. Banyak sekali kegiatan serta pengalaman unik yang bisa pengunjung dapatkan di sini. *Yap*, di mana lagi kalau bukan di Solo Art Market, panggung kreatif yang hidup dari proses para artisan yang bertumbuh dalam ruang publik dengan pesona arsitektural Kota Solo. Bernuansa estetik dengan latar kemegahan Pura Mangkunegaran, Solo Art Market sukses menjadi wadah interaksi para penggiat seni dengan para penikmat seni dari berbagai wilayah di Indonesia hingga turis mancanegara. Tak hanya berjejeran karya seni para artisan, sepanjang jalan pedestrian Ngarsopuro pun dihiasi lampu-lampu jalan serta tempat duduk yang tak kalah estetik dan *instagramable*. Ruang lingkup tempat diselenggarakannya Solo Art Market ini memang sangat strategis karena selain lokasi yang sangat mudah dijangkau, berdekatan pula dengan tempat ibadah serta stan-stan makanan kuliner keprabon.

Setibanya di lokasi, pengunjung akan disambut dengan jajaran karya seni yang beragam, seperti resin *art*, boneka rajut, lukisan kanvas, ukiran kayu, hingga berbagai produk dari kain *ecoprint*. Kemudian, ada juga karya unik yang jarang ditemui, seperti ukiran di atas sandal karet menjadi berbentuk layaknya lukisan timbul. *Workshop* yang ditawarkan pun beragam, mulai dari melukis dengan media batu dan kain, membuat gelang dari manik-manik, hingga membuat kerajinan tanah liat. Di setiap minggunya, pertunjukan yang ditampilkan–selain karya seni dari para artisan–sangat beragam. Berdasarkan keterangan salah satu artisan di sana terkadang ada penampilan *live music* atau pertunjukan tari. Bahkan, pernah ada pelatihan men-

Foto: *Azfa Zaidan Naqi*

genai seni mengambil gambar yang baik layaknya fotografer profesional. Sangat menarik, bukan? Selain menjadi sarana *refreshing*, Solo Art Market juga memberikan edukasi bagi pengunjung yang tentunya akan menambah wawasan serta pandangan baru terhadap seni.

Menurut informasi yang diperoleh, terselenggaranya *event* ini sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Solo dan sekitarnya. Dengan menyediakan fasilitas bagi para artisan tak hanya menaikkan taraf ekonomi masyarakat, *event* ini juga menjadi sarana pengenalan kebudayaan yang ada di Kota Solo melalui karya seni yang disajikan. Pernyataan tersebut diamini oleh Bapak Ginda Ferachtiawan, S.E., M.Si. selaku anggota DPRD Kota Surakarta bagian Komisi Ekonomi Daerah bahwasannya pengadaan *event* Solo Art Market ini menjadi salah satu bukti upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan wadah serta sarana edukasi bagi warga khususnya Solo Raya agar lebih kreatif, inovatif, dan mandiri. Selain itu, harapannya apabila warganya aktif dan banyak sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan akan memacu para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya di Kota Solo. Dari pernyataan beliau, jelas bahwa pengadaan *event Solo Art Market* dapat dipandang pula sebagai politik atau strategi untuk menaikkan pendapatan asli daerah di mana dana yang terkumpul dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat sehingga tidak akan bergantung lagi kepada dana alokasi pemerintah pusat. Lalu, apakah tujuan tersebut benar-benar tercapai setelah kurang lebih 2,5 tahun berjalan?

Tanggapan pertama datang dari seorang artisan asal Kota Solo bernama Nadia yang memiliki produk berupa akrilik *art* dan bunga-bunga kering dengan *brand* Gemati, setelah empat kali menggelar karyanya di Solo Art Market, Kak Nadia mulai mendapatkan alternatif lain untuk mengenalkan produknya kepada khalayak umum. "Kalau aku karena kebanyakan *gift box* atau *frame*, lebih ke *branding* karena mungkin harganya lumayan ya, tetapi lumayan juga untuk yang 20.000-an dan 10.000-an laku." Selanjutnya, Kak Nadia memaparkan bahwa untuk dapat membuka lapaknya di Solo Art Market ini harus melewati beberapa tahapan, seperti pendaftaran dan pengecekan keorisinalitasan karya para artisan sehingga mutu serta kualitas karya yang disajikan benar-benar terjamin.

Selanjutnya, tanggapan lain datang dari artisan sekaligus penikmat seni alias pengunjung, Kak Mega, yang memiliki *brand* Living in Summer, berpendapat bahwa dengan adanya *event* Solo Art Market sangat membantu menambah pemasukan karena memang para penggiat seni diberikan ruang untuk bertemu dengan pembeli yang sudah pasti memiliki minat dengan karya seni. Selain itu, dengan berkumpulnya artisan dari berbagai daerah dan beragam pula karya yang dibawakan dapat menjadi referensi untuk inovasi produk-produknya. Kemudian, apabila dari kacamata pengunjung ia menuturkan "Karena aku perempuan ya, Mbak, perempuan itu kayaknya lebih boros daripada laki-laki, di sini tuh *support* gitu, banyak yang lucu-lucu, banyak yang kreatif-kreatif jadi bisa buat *refreshing* karena aku kan Senin sampai Sabtu itu ngantor, jadi *event* ini *worth it* banget buat pelancong dari luar kota yang pengen bawa oleh-oleh dan gak cepet basi, seperti makanan." Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama Pemerintah Kota Surakarta mengadakan event ini sudah tercapai meski belum sepenuhnya. Manfaat lain dari terselenggaranya *event* ini juga tercapai, seperti menjadi sarana wisata bagi turis lokal maupun luar negeri yang ingin memanjakan matanya dengan karya seni yang unik dan menarik.

Nah, bagaimana? Sudah terbayang kan bagaimana keseruan menjelajahi lorong seni di selasar Ngarsopuro ini. Bagi kalian yang tertarik untuk berkunjung, jangan lupa menyisihkan uang jika ingin membawa pulang karya-karya para artisan yang pastinya unik dan *aesthetic*. Ingat, Solo Art Market hanya ada setiap hari Minggu *lho*, tepatnya pada minggu pertama dan minggu ketiga di setiap bulannya, mulai dari pukul 09.00–17.00 WIB. Jadi, tunggu apa lagi? Mari habiskan akhir pekan bersama di Solo Art Market!

Foto: *Azfa Zaidan Naqi*

MANGKUNEGARAN: SEBUAH KISAH TENTANG PERJALANANAN

Reporter: Muhammad Faiz Fazlurrahman

Siapa yang tidak kenal dengan kota Surakarta? Pasti banyak di antara kita yang tentu sudah tidak asing lagi mendengar nama kota ini. Kota Surakarta atau lebih sering disebut Kota Solo merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki banyak sekali keunikan dan cerita di dalamnya. Mulai dari kulinernya yang menggoyang lidah, hingga keramahan warganya yang membuat makin betah. Tak hanya itu, Kota Surakarta juga identik dengan sejarah. Kita bisa menemui beberapa tempat yang memiliki sejarah panjang di Kota Surakarta ini, salah satunya adalah Pura Mangkunegaran.

Pura Mangkunegaran merupakan tempat pemerintahan dari Kerajaan Mangkunegaran itu sendiri. *Yap*, benar, Anda tidak salah membaca. Kota Surakarta pada zaman dahulu dikuasai oleh dua kerajaan, yakni Kasunanan dan Mangkunegaran. Nama Pura berasal dari bahasa jawa yang artinya istana atau kerajaan. Pura Mangkunegaran juga menjadi salah satu dari beberapa tempat di Kota Surakarta yang menjadi pusat kebudayaan dan kesenian, serta tempat untuk menyimpan berbagai koleksi berharga dari pemerintahan kerajaan zaman dahulu, seperti barang-barang peninggalan Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mangkunegaran itu sendiri.

Pura Mangkunegaran dibangun pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Pangeran Samber Nyawa, yang kelak akan menjadi KGPAA Mangkunegara I atau raja pertama dari Mangkunegaran yang memerintah dari tahun 1757–1795. Sebenarnya, pada zaman dahulu di Kota Surakarta hanya ada 1 kerajaan, yakni Keraton Kasunanan. Pada zaman tersebut, kondisi wilayah Nusantara masih dikuasai oleh Belanda, dalam hal ini adalah VOC. Karena hal tersebut, pemerintahan kerajaan pada waktu itu bekerja sama dengan VOC untuk beberapa kepentingan. Melihat hal ini, Raden Mas Said tidak terima karena ia merasa bahwa masyarakat menjadi tertindas dengan adanya VOC, ditambah dengan sikap kerajaan yang justru bekerja sama dengan VOC makin memperkeruh keadaan. Puncaknya adalah Raden Mas Said melakukan pemberontakan dan ingin memisahkan diri bersama para pengikutnya dari keraton Kasunanan. Perlawanan Raden Mas Said ini terus bergulir sampai akhirnya pada 17 Maret 1757 terjadilah Perjanjian Salatiga yang memisahkan Keraton Surakarta (Kasunanan) dengan Mangkunegaran.

Gambar 1: Tampak Depan Pura Mangkunegaran
Muhammad Faiz Fazlurrahman
LPM Kentingan

Gambar 2: Ruang Pertemuan Pura Mangkunegaran
Muhammad Faiz Fazlurrahman
LPM Kentingan

Namun, lama-kelamaan VOC makin menunjukkan taringnya di bumi Nusantara, dari waktu ke waktu kekuatan dan kekuasaan VOC makin meluas. Hal ini menyebabkan para raja-raja berikutnya dari Mangkunegaran tidak bisa dengan leluasa untuk melaksanakan pemerintahannya, mereka mau tidak mau harus bekerja sama dengan VOC dalam beberapa hal. Menanggapi hal tersebut, pada masa pimpinan Mangkunegara 2, beliau membangun pasukan kerajaan sebagai sistem pertahanan, agar orang-orang dari VOC tidak bisa berbuat sewenang-wenang. Kemudian pada masa pimpinan Mangkunegara 3 mulai dibangun sebuah kantor administrasi untuk mengurus berbagai keperluan dari Mangkunegaran. Puncak kejayaan dari Mangkunegaran adalah saat dipimpin oleh Mangkunegara 4, beliau berhasil membuat Mangkunegaran menjadi sebuah kerajaan yang disegani. Di samping itu, beliau juga mempunyai banyak bisnis seperti pabrik gula dan perkebunan teh. Tak hanya itu, pada masa kepemimpinan Mangkunegara 4 beliau juga turut andil dalam menciptakan berbagai tembang-tembang jawa dan memperluas bangunan Mangkunegaran menjadi 10 hektar. Kemudian, pada kepemimpinan Mangkunegara 8 yang memimpin di era kemerdekaan, terjadi perubahan pada pemerintahan Mangkunegaran. Karena bertepatan dengan momen kemerdekaan negara Indonesia, Mangkunegaran lantas mengambil sikap dengan bergabung menjadi bagian dari NKRI. Sejak saat itu, kekuasaan Mangkunegaran tidak lagi mencakup berbagai daerah, namun hanya sebatas di dalam lingkup wilayah kerajaan saja.

Gambar 3: Pendhapa Ageng Mangkunegaran
Muhammad Faiz Fazlurrahman
LPM Kentingan

Di Pura Mangkunegaran ini kita bisa melihat berbagai peninggalan dari kerajaan pada zaman dahulu, sekaligus bisa belajar banyak tentang sejarah. Tak hanya itu, kita juga bisa belajar mengenai kebudayaan yang ada di Kota Surakarta maupun kebudayaan yang ada di Mangkunegaran itu sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, Mangkunegaran mulai bertransformasi dan mengikuti arus perkembangan zaman. Di bawah kepemimpinan Gusti Pangeran Haryo (GPH) Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo sebagai Mangkunegara X, beliau berhasil menarik minat para generasi muda untuk bisa mengunjungi Mangkunegaran. Tak hanya itu, di bawah kepemimpinannya, beliau berhasil membuang stigma tentang kesan kuno dan monoton ketika mengunjungi tempat bersejarah seperti Mangkunegaran. Berbagai acara seperti konser musik, bazar, dan acara-acara lain yang identik dengan anak muda sering diadakan di Pura Mangkunegaran, hal ini lantas menarik minat dari para generasi muda dan menghidupkan kembali Pura Mangkunegaran melalui berbagai kegiatan.

Foto: Lutfi Fitria Tamsir

LABIRIN POLITIK KAMPUS: TERUS BERPUTAR TANPA ADA JALAN KELUAR

Penulis: Jasmine Aura & Rossa Putri

"... membawa Universitas Sebelas Maret (UNS) menuju World Class University tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan. Untuk kerja besar tersebut diperlukan adanya sinergi yang saling menguatkan, dukungan yang sepenuh hati, serta kekompakan dan kebersamaan dari semua pemangku kepentingan ...."

Penggalan kalimat dengan kesan motivasi di atas disampaikan oleh Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., dalam acara peringatan dua tahun pemberian status PTN-BH di Ballroom Gedung UNS Tower Ki Hadjar Dewantara, Kamis (6/10/2022). Hingga kini menapaki seribu hari, UNS tidak henti-hentinya mendulang decak kagum. Berbagai prestasi sering ditorehkan di kancah nasional maupun internasional. Data terbaru menyebutkan bahwa UNS berhasil memperoleh skor Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 91,81% dengan indeks sangat baik dari Mendikbud Ristek sekaligus menyabet peringkat ketiga kategori Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atas Kinerja Anggaran terbaik.

Akan tetapi, ada disparitas antara prestasi tersebut dengan fakta di lapangan. Nama besar UNS menjadi pembicaraan hangat di kala Mas Menteri, Nadiem Makarim, tiba-tiba membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) UNS melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret. Hal ini juga berimbas pada pembatalan hasil pemilihan Rektor UNS periode 2023–2028. Tidak berhenti di situ, popularitas UNS kembali naik karena dugaan korupsi dilayangkan kepada pihak rektorat yang melibatkan dana senilai lebih dari Rp34 miliar. Isu ini menjadi salah satu pemicu perang internal antar pemangku jabatan yang tidak dapat dihindarkan. Berbagai pertanyaan pun muncul atas kejadian yang terkesan mendadak ini. Bukankah UNS merupakan lembaga pendidikan yang otonom? Apa yang sebenarnya terjadi?

Gagalnya Gelaran Pelantikan Rektor

Tidak ada asap, jika tidak ada api. Sebuah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan awal mula situasi *kebakaran* ini terjadi. Tepat sepekan setelah dilaksanakannya Rapat Pleno MWA mengenai Penetapan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2023–2028, komentar-komentar bernada negatif terkait agenda krusial tersebut mulai menghiasi linimasa media sosial. Terdapat tulisan, gambar, bahkan video yang hampir semuanya mendiskreditkan posisi rektor terpilih. Tak cukup sampai di situ. Huru-hara lain mulai tercium kala Inspektorat Jenderal (12/2022) ditugaskan langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk datang dan melakukan investigasi terhadap proses pemilihan rektor yang diduga terdapat unsur kecurangan dalam pelaksanaannya. Kasus ini makin menarik ketika pihak MWA mengaku sama sekali tidak mengetahui kehadiran Irjen tersebut dan letak kesalahan mereka.

"Katanya melanggar disiplin. Disiplin mengenai apa? MWA tidak tahu, padahal yang dilakukan oleh MWA hanya menjalankan perintah PP nomor 56 tahun 2020," jelas seorang narasumber yang menolak untuk disebutkan identitasnya.

Jika benar bahwa terdapat suatu "penyakit" di dalam tubuh MWA, bukankah Kementerian sebagai dokter seharusnya segera menyampaikan "nama penyakit" tersebut beserta obat untuk menunjang "kesembuhan" pasiennya?

Ketika kondisi dirasa sudah kembali aman untuk "berkegiatan", di bulan Januari hingga Maret, MWA mulai mempersiapkan hal-hal yang kiranya dibutuhkan dalam pelantikan rektor bulan April mendatang. Ketua MWA, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Marsekal (Purn.) Hadi Tjahjanto, mengundang seluruh panitia pelantikan yang telah dibentuk untuk beraudiensi di Jakarta (15/3/23). Mereka berharap bahwa agenda besar tersebut tetap mampu terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Namun, secara tiba-tiba Prof. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. mengundang seluruh pimpinan kampus dan fakultas untuk menghadiri sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Organ dan Peraturan Internal di Lingkungan Universitas Sebelas Maret pada Senin (3/4/23). Terbitnya peraturan itu sangat mengejutkan karena dari MWA sendiri merasa tidak pernah diajak berkoordinasi sebelumnya oleh pihak rektorat.

Mengenai Permendikbud Ristek tersebut, ada empat poin pertimbangan dikeluarkannya reglemen itu: pertama, mendikbud Ristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi, kedua, peraturan Majelis Wali Amanat sebagai peraturan internal di lingkungan Universitas Sebelas Maret tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketiga, majelis Wali Amanat sebagai salah satu organ di lingkungan Universitas Sebelas Maret dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam membentuk Peraturan Majelis Wali Amanat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penataan, dan keempat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tiga pertimbangan sebelumnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Poin-poin pertimbangan itulah yang kemudian melahirkan enam ketetapan yang salah satunya berbunyi: **"Hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS untuk masa bakti 2023–2028 dibatalkan**. Hal tersebut

dilakukan dengan pertimbangan adanya peraturan MWA UNS yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dilakukan proses pelantikan Rektor Universitas Sebelas Maret, **dinyatakan tidak sah karena telah dibatalkan.**"

Buntut Panjang Pembekuan MWA UNS

Upacara pelantikan rektor terpilih periode 2023–2028 terpaksa gagal digelar. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Organ dan Peraturan Internal di Lingkungan Universitas Sebelas Maret pada pokoknya mengatur mengenai pembekuan MWA UNS, pembatalan hasil pemilihan rektor periode 2023–2028, dan pencabutan sejumlah peraturan MWA, bagaikan momok mengerikan yang siap menjegal setiap kebijakan MWA. Perolehan status Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) seharusnya sudah cukup membuat UNS lepas dari bayang-bayang Kementerian dalam urusan internalnya. Namun, sepertinya UNS terlalu "mencintai" kementerian sebagai induknya sehingga tidak menggunakan hak otonomi secara penuh atau memang ada kepentingan lain yang membuat "Kampus Ultraman" ini tidak bisa menjalankan tata kelola secara menyeluruh?

Jika kita menilik pasal demi pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang PTN-BH UNS, tidak pernah ada ketentuan yang memuat hal terkait celah intervensi dari kementerian terhadap urusan internal UNS. Kecuali terjadi hal tertentu seperti menurut Pasal 25 Ayat (2) dan (3) PP No. 56/2020, yaitu apabila MWA tidak dapat membuat keputusan atas konflik antarorgan di UNS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka penyelesaian diserahkan kepada Menteri. Menurut Samael *(nama disamarkan)* tidak pernah ada kejadian berarti sepanjang Januari–Maret. Hal ini yang menjadi alasan MWA untuk tetap mempersiapkan upacara pelantikan Rektor terpilih Periode 2023–2028 pada 11 April 2023 nantinya. Namun, persiapan ini harus sia-sia mana kala terbit Surat Keputusan berkedok Peraturan Menteri, Jumat (31/3).

Membahas sedikit mengenai legalitas, Permendikbud Ristek No. 24/2023 jelas melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5C UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019. Peraturan Menteri **harus** memuat materi hukum yang mengikat secara umum, abstrak, dan berlaku terus menerus. Artinya subjek dari sebuah "Peraturan" adalah khalayak banyak bukan tertentu. Seperti yang kita ketahui, norma atau poin yang terkandung dalam Permendikbud Ristek No. 24/2023 merupakan materi "Keputusan" yang menitikberatkan pada subjek tertentu, yakni MWA dan berlaku "sekali selesai". Dalam substansinya juga tidak dijumpai "Bab Ketentuan Umum" yang lazim ada pada Peraturan Menteri. Singkatnya, Permendikbud Ristek No. 24/2023 ini cacat formil karena tidak memenuhi asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, mengulik salah satu poin pertimbangan Permendikbud Ristek No. 24/2023 mengenai Kewenangan Kemendikbud untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nyata bertentangan dengan Pasal 2 dan 3 Ayat (1) PP No. 56/2020. Dijelaskan bahwa "UNS ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom." Kemudian, "UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UNS." Dilihat dari segi mana pun dengan diundangkannya Permendikbud Ristek No. 24/2023, maka Menteri Nadiem Makarim telah melakukan **perbuatan melawan hukum** karena membentuk sebuah aturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi—dalam hal ini hierarki Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari Peraturan Menteri—sehingga Permendikbud Ristek tersebut *harus dicabut* demi tercapainya asas kepastian hukum.

Dugaan Korupsi Rp34 Miliar oleh Rektorat

Praktik korupsi dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi memang bukan hal yang baru. Seleksi masuk jalur mandiri perguruan tinggi negeri menjadi sarang empuk untuk "tikus kantor" memperoleh pundi-pundi "di bawah meja". Banyak cara bisa dilakukan, mulai dari suap penerimaan mahasiswa baru, penggelapan dana sumbangan pengembangan sarana dan prasarana, dsb. Bagaimana dengan Almamater tercinta kita? Sialnya, UNS tidak dapat kabur dari ancaman ini. Dugaan korupsi senilai lebih dari Rp34 miliar dituduhkan menyusul serentetan skandal UNS sepanjang tahun 2023. Hasil audit dari Komite Khusus mengungkapkan adanya potensi fraud (kecurangan) yang bersumber dari penggunaan dana untuk belanja di luar RKAT UNS tahun 2022. Nampaknya, dana ini merupakan anggaran yang tidak disetujui MWA.

Selanjutnya, kabar terbaru dilansir dari *Tribun News* pada Selasa (25/7), M. Khairil Ibadu (eks anggota MWA-UM) menyatakan adanya pelanggaran mengenai kuota pendaftaran jalur mandiri yang telah ditetapkan, yakni sejumlah 50%. Data ini ia peroleh dari survei yang dilakukan oleh BEM UNS pada 2021 silam. Hasil dari survei ini menyatakan bahwa pada tahun 2021 total mahasiswa jalur mandiri mencapai 56% dari total keseluruhan mahasiswa baru. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri Pasal 6 Ayat (6) "Daya Tampung mahasiswa seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pada PTN badan hukum ditetapkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung seluruh Program Studi". Hal ini sejalan dengan kecurigaan salah seorang alumni UNS, Dr. Taufan Maulamin, mengisyaratkan adanya indikasi suap penerimaan mahasiswa baru di UNS. "Ini akan menjadi kasus kedua yang akan diungkap KPK," terangnya.

Pengurus Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia (APPERTI) pusat dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Taufan Maulamin, mengungkapkan adanya masalah dalam tata kelola keuangan UNS serta mendesak agar dilakukan audit investigasi. Beliau juga mengungkapkan bahwa sudah seharusnya UNS mengganti investigator publik yang sudah tiga tahun mengaudit keuangan UNS. "Padahal batasan hanya boleh 2 tahun," ujarnya, dikutip dari Sumbawanews.com, Rabu (03/05)

Gelar yang Terpaksa Ditanggalkan

Perseteruan yang terjadi di antara para pemangku kebijakan rasanya tidak serta-merta membuat anjlok citra World Class University ini. Terlihat dari 58.695 pendaftar Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2023 yang memilih UNS sebagai tempat melanjutkan pendidikan mereka. Melalui siaran konferensi pers SNPMB BPPP (20/6/23), jumlah tersebut berada di urutan keempat terbanyak setelah Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia. Hal ini makin diperkuat dengan Bisnis Digital—salah satu program studi baru milik UNS—menjadi jurusan terketat kelima yang kursinya diperebutkan oleh banyak orang. Sutanto, selaku Direktur dari Direktorat Reputasi, Akademik, dan Kemahasiswaan UNS, pun mengaku bahwa huru-hara yang terjadi tidak berpengaruh pada minat pendaftar. "Malah makin banyak yang mendaftar. Yang keterima di UNS juga skornya tinggi-tinggi. Sejauh ini tidak ada pengaruh yang signifikan," ujarnya.

Sayangnya, gejolak politik kampus ini masih terus bergulir ke arah yang makin ruwet. Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, secara mengejutkan memberikan sanksi kepada dua mantan petinggi MWA berupa pencabutan gelar guru besar. Hal ini digadang-gadang sebagai buntut atas pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 yang di dalamnya terdapat pasal mengenai penyalahgunaan wewenang.

"Kami dituduh *abuse of power* hanya karena berkirim surat ke Menteri (sesuai perintah PP 56/2020) melaporkan hasil pemilihan rektor pertama dan tentang situasi yang terjadi di UNS, yaitu adanya konflik pribadi yang bisa memengaruhi sauna UNS, dan kami mengusulkan kepada Menteri solusinya terhadap hal tersebut," ungkap Hasan Fauzi.

Mengutip dari laman *tempo.co*, mantan Wakil Ketua MWA UNS tersebut tidak terima bahwa hal itu dikategorikan sebagai sebuah penyalahgunaan wewenang. Baginya, para pimpinan MWA ini hanyalah menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya. Selain melayangkan keberatan kepada Kemdikbud Ristek, Hasan Fauzi juga akan membawa perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Sudah mengajukan keberatan ke Kementerian dan segera ke PTUN."

***

Hingga laporan ini ditulis, pergulatan kepentingan di antara para pemangku singgasana di UNS makin memanas. MWA tengah melakukan gugatan Hak Uji Materi (HUM) di Mahkamah Agung (MA) dan jajaran rektorat masih setia menanggapi satu per satu "ocehan" mahasiswa terkait banyaknya kasus yang akhir-akhir ini menjerat kampus. Meskipun sudah mengadakan audiensi dengan berbagai pihak, tetapi nyatanya hasil yang didistribusikan kepada para khalayak masih menimbulkan banyak tanda tanya. Undang-Undang mana yang sebenarnya dilanggar? Kesalahan seperti apa yang sebenarnya dilakukan? Bagaimana klarifikasi atas tuduhan korupsi yang tengah menyeruak? Lagi dan lagi. Jangan sampai kemelut ini merugikan banyak lapisan, terutama mahasiswa yang kerap kali menjadi sosok "rentan". Sudah saatnya dalang-dalang di balik pertunjukan menampakkan diri dan menyelesaikan problematika ini. Spanduk-spanduk yang dibentangkan besar semestinya berisi rentetan prestasi, bukan malah pertanyaan mengenai kasus korupsi. Satu kalimat yang harus dengan keras digaungkan: almamater tercinta kita perlu diselamatkan!

DI BALIK GERBANG PINTU KOS

Penulis: Nimas Ayu

Kehidupan mahasiswa yang merantau tak jauh dari sebutan anak kos. Memulai untuk hidup mandiri mengejar kehidupan yang lebih baik. Daerah indekos mudah ditemui di sekitar lingkup kampus. Dengan ukuran ruang kurang lebih 3x4 meter, ruang kecil tersebut menjadi tempat para penghuni beristirahat dari lelahnya kehidupan. Kamar kecil dengan sekat yang sempit berisi perabotan sederhana merupakan tempat yang mewah bagi mahasiswa, sebagai tempat pulang setelah beraktivitas seharian penuh. Dari kamar kos inilah mahasiswa mulai berproses, belajar, dan berpikir.

Di dalam kos tentu mereka bertemu dengan tetangga kos yang sama-sama merantau untuk menuntut ilmu, jauh dari rumah. Tidak segan mereka berteman dan hidup seperti saudara. Di ruang bersama kos, mereka berkumpul dari mengobrol santai. Kadang juga berdiskusi tentang kuliah. Di sinilah tempat mereka menyahutkan buah pikiran kritis, diskusi kuliah, bahkan rapat kecil-kecilan untuk menyampaikan opini dalam organisasi, tak jarang juga kerja kelompok yang dilakukan tiap akhir bulan.

Awal dari sejarah-sejarah hebat, bahkan bermula dari ruang kecil kos. Bercermin dari tahun perjuangan sebelum Indonesia merdeka, tokoh-tokoh hebat memikirkan negara di ruang kecil yang disebut kamar kos. Di masa mudanya, Bapak Proklamasi Indonesia, Ir. Soekarno, bersama teman-temannya pun pernah merasakan menjadi anak kos. Di sini mereka berusaha mencari semangat hidupnya untuk memperjuangkan nasib bangsa. Tempat awal mula Soekarno dan teman-temannya memulai belajar berpolitik. Indekos milik Hadji Oemar Said Tjokroaminoto menjadi tempat Soekarno dan teman-temannya tinggal selama pendidikan yang ditempuh ketika di Hogere Burger School Surabaya.

Kamar kos milik HOS Tjokroaminoto, walau dianggap kecil dan kotor, berhasil melahirkan tokoh-tokoh penting. Tinggal bersama dengan 3 pemikiran ideologi yang berbeda, Soekarno dengan jiwa nasionalismenya, Semaun dengan pemahaman komunis, dan Kartosuwiryo dengan jalan Islamisnya yang kental. Diskusi mereka yang menjadikan perbedaan justru satu hal akhirnya mendekatkan.

Tidak jauh berbeda dari sekarang, dalam satu kos terdiri dari berbagai anak-anak fakultas yang berbeda, dari daerah yang berbeda, dan dari pemikiran yang berbeda. Mereka hidup bersama-sama menjadikan sebuah perbedaan sebuah jalan baru untuk menjalin persaudaraan.

"Di kos ini tidak hanya diisi mahasiswa, tetapi juga beberapa yang sudah bekerja. Mereka merantau dari daerah yang lumayan jauh untuk mencari satu tujuan yang sama. Yang sudah pasti untuk hidup yang lebih baik," jelas Muhadi, pemilik kos Sumber Rezeki. Sebagai pemilik kos yang sudah lebih dari 10 tahun, Muhadi menjelaskan di kos inilah para mahasiswa mengajak temannya untuk sekadar mengerjakan kerja kelompok, kadang beberapa juga ada yang ramai-ramai datang mengerjakan praktik tugas kuliah. Oleh karena itu, walaupun kos dianggap tempat yang sepele, tetapi banyak hal terjadi di dalam ruang kecil tersebutlah yang menjadi besar. Ialah tempat belajar kecil, bak ruang rapat yang menampung segala gagasan kritis pemikiran penghuninya.

Lingkungan Kos dan Permasalahannya

Seperti layaknya hidup pribumi yang berdampingan dengan para penjajah belanda. Kata kos merupakan serapan dari frasa bahasa belanda *"in de kost (zijn)"*. Ketika Belanda masih menguasai Indonesia, indekos merupakan gaya hidup yang mewah dari budaya Eropa, khususnya Belanda. Diartikan sebagai "makanan sehari-hari" yang menjadikan masyarakat pribumi bisa menumpang hidup dengan keluarga Belanda dengan membayar sejumlah uang. Mereka tinggal di kos untuk belajar dan bersekolah dengan harapan nantinya bisa meraih pendidikan yang cukup dan hidup mandiri. Makna dari kos inilah yang sering disebut sebut terutama bagi anak rantau yang tinggal di kos untuk menempuh pendidikan di luar kota. Harapannya, ketika mereka kembali pulang ke kampung halaman, mereka bisa menjadi pribadi yang membawa ilmu dan bermanfaat bagi orang lain.

Menjadi anak kos bukan berarti selalu mudah hidupnya. Mereka memang mendapatkan kebebasan, tetapi pada saat yang sama dituntut untuk menjaga dirinya sendiri. Bahkan, tak jarang timbul ancaman di sekitar lingkungan kos, bisa saja dari luar atau bahkan dari dalam kos sendiri. Mengandalkan akses media sosial, para mahasiswa menyampaikan keluh kesahnya sebagai anak rantau, terutama di sekitar kampus UNS daerah gerbang belakang, kebanyakan para anak kos tinggal.

Dilihat dari postingan *menfess* di Twitter, beberapa anak kos mengalami pengalaman merugikan mulai dari perilaku *catcalling*, pencurian, bahkan kehilangan sepeda motor. Hal ini menjadi ancaman yang menimbulkan rasa was-was bagi mahasiswa yang tinggal di kos.

Dari laman Twitter berbagai permasalahan dapat tersampaikan ke Wali Kota Surakarta, Gibran

Foto: *Lutfi Fitria Tamsir*

Rakabuming Raka. Dikutip dari *detik.com*, Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan fokus menjaga kasus kriminal di sekitar kampus UNS. "Beberapa hari ini akan fokus *ngawasi* kos-kosan sekitaran UNS ya, *kok kejadiane okeh banget neng kono, ora mudeng aku*. Mulai begal, ini (pencurian), pemerkosaan, juga UNS *kabeh*, hati-hati ya," papar Gibran. Tidak sampai disitu akun BEM UNS juga menyampaikan aspirasi terbukanya melalui laman Instagram untuk Wali Kota Surakarta yang ditanggapi dengan baik.

Seperti analisis pendekatan sistem politik menurut David Easton, suatu sistem juga terdiri dari subsistem. Dalam sistem politik juga terdapat prinsip alokasi nilai-nilai sosial *(the authoritative allocation of social value)*. Terdapat *input* berupa tuntutan atau dukungan yang melalui proses *konversi* sistem politik dan berubah menjadi *output* keputusan atau kebijakan. Implikasi hal di atas sama dengan yang terjadi saat ini. "Benar ada patroli setiap hari yang dilakukan, di mana ada kos yang kehilangan itu didatangi oleh Polres, tetapi sebenarnya dari daerah sini sudah aman karena setiap sudut sudah ada CCTV," terang Sartini, calo indekos gang Kabut.

Hal tersebut menguatkan pernyataan dari penghuni kos gerbang belakang. "Daerah kos ku aman sih, untuk patroli ada seminggu ini dilakukan," imbuh Inggit Maharani, mahasiswa Pengelolaan Hutan, penghuhi kos Gang Surya Utama.

Kasus-kasus di atas menjadi bukti bahwa sistem politik juga bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari mahasiswa. Anak kos hanya sebutan sementara bagi mereka yang ingin tumbuh menjadi lebih baik. Kamar kos kecil bisa melahirkan seorang pemimpin. Perjuangan mereka sebagai anak kos merupakan awal dari pengalaman menuju kemenangan.

RIPPED JEANS: LEBIH DARI SEKADAR FASHION STATEMENT

Reporter: Andi Muh.Ahsan Rizal

Celana satu ini mungkin adalah yang paling spesial di antara celana-celana lainnya. Bagaimana tidak, *ripped jeans* adalah satu-satunya celana yang memiliki "hak istimewa" dalam dunia *fashion*. Ketika seseorang menggunakan celana berbahan lain, misalnya *chino*, pasti akan lebih sedap dipandang apabila celana tersebut dalam kondisi bersih, rapih, dan tampak baru. Namun aturan ini tidak berlaku terhadap *ripped jeans*. Adanya robekan dan tampilan yang makin usang, justru membuatnya makin terlihat keren. Diantara banyaknya variasi model jeans lainnya seperti *skinny jeans, baggy jeans, straight jeans, bell bottom jeans,* dan *high waist jeans, ripped jeans* hingga kini tampaknya masih menjadi salah satu tren yang paling banyak diminati oleh kalangan muda, baik itu dari generasi *millennial* hingga *alpha*. Mudah sekali bagi kita untuk menjumpai barisan penggemar celana berbahan denim ini pada *event-event casual*. Bisa dibilang, *ripped jeans* masih dipandang sebagai sebuah tren fashion yang relevan di tahun 2023 ini.

Nyaris tidak ada orang yang tidak kenal dengan celana denim yang punya ciri khas sobek-sobek ini. Dalam salah satu tulisannya di laman 10 Hills Studio, Rohan Agarwal bahkan menuliskan kalimat ini: "Kecuali Anda telah hidup di bawah batu, Anda telah melihat prevalensi (penyebaran) jeans robek yang luas dalam mode". Sobekan, lubang, atau goresan pada *ripped jeans* biasanya diaplikasikan pada bagian lutut atau paha. Variasi sobekan ini juga terus berkembang seiring zaman dan disesuaikan dengan tren yang berlaku pada masa itu. Menyebarluasnya tren *ripped jeans* ke seluruh dunia memang hampir tak terbendung. Seakan-akan *ripped jeans* menjadi sebuah *fashion item* wajib yang harus dimiliki setiap orang yang ingin tampil *trendy*. *Ripped jeans* kerap kali dipandang sebagai sebuah fashion statement dari orang-orang berjiwa bebas. Tentu pandangan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ada cerita menarik di balik perjalanan berpuluh-puluh tahun *ripped jeans* mengarungi derasnya arus dunia *fashion*.

Sejarah Awal

Tidak ada yang tahu pasti siapa penemu dari genre *jeans* satu ini. Namun, banyak yang percaya kalau *ripped jeans* terinspirasi dari kalangan kelas pekerja yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini menyebabkan mereka tak punya cukup uang untuk membeli *jeans* baru untuk menggantikan jeans lama yang mereka miliki. Jadilah *jeans* tersebut dipakai hingga usang dan sobek-sobek. Melansir dari Zerookata, *ripped jeans* pertama kali dipopulerkan sebagai *fashion item* pada era 50-an. Era ini memang menjadi era yang penting dalam sejarah fashion. Ini adalah zaman di mana orang-orang mulai menaruh perhatian pada cara berpakaian, memandangnya sebagai sebuah keindahan yang mencerminkan identitas dan karakteristik seseorang. Pada masa itu banyak sekali bermunculan ide dan tren baru yang belum pernah ada sebelumnya, dan *ripped jeans* pun tidak ketinggalan untuk mencuri perhatian pasar. *Ripped jeans* yang sebelumnya hanya dipandang sebagai celana usang, menjelma menjadi sebuah *fashion statement*. Orang-orang memandangnya sebagai sebuah simbol pemberontakan terhadap generasi sebelumnya yang memiliki nilai-nilai berbeda, juga sebagai perlawanan terhadap aturan yang mengekang. Beberapa nama terkenal punya andil besar dalam memperkenalkan *ripped jeans* pada masa itu, salah satunya adalah aktris terkenal Amerika, Marilyn Monroe.

Berlanjut ke tahun 60-an di mana budaya *hippie* mulai marak-maraknya di Amerika Serikat, *ripped jeans* menjadi manifestasi dari hidup sederhana, cinta damai, dan anti perang. Hal tersebut didasarkan pada filosofi hidup kaum *hippie*, sebuah kultur yang muncul di Amerika pada pertengahan 60-an. Pada era 70-an, *ripped jeans* mulai merambat ke kultur lain. Sebuah kultur yang lahir di London, Inggris, yaitu *punk*. Anak-anak *punk* yang lahir dari kalangan kelas pekerja di Inggris, memegang teguh ideologi perlawanan terhadap tatanan hidup yang mengekang. Lebih jauh, *punk* juga dipandang sebagai sebuah sikap politik yang menentang penguasa.

Ripped jeans menjadi atribut wajib bagi orang-orang yang bersandar pada ideologi ini. Selain sebagai sebuah ideologi, *punk* juga menjadi sebuah genre dalam musik. Sebuah aliran yang berciri khaskan musik yang keras, lirik yang berisi unek-unek terhadap hal-hal duniawi, dan personilnya yang berpakaian mengikuti filosofi *punk*. Ciri ketiga bisa kita temukan pada Sex Pistol, salah satu band *punk* terkenal asal Inggris. Mereka menggunakan *ripped jeans* sebagai simbol untuk menyuarakan ideologi *punk* Inggris yang mengecam status quo dan pemerintahan yang kolot.

Sebuah Gerakan Anti Fashion

Puncak dari popularitas *ripped jeans* adalah pada tahun 80-an dan 90-an. Di tahun-tahun itu, grup musik terkenal beraliran *punk rock* seperti Green Day dan Nirvana menjadi dalang di balik makin menjamurnya tren *ripped jeans* di kalangan umum. Dalam setiap konsernya, *band-band* ini tak lupa mengenakan *ripped jeans* sebagai "pakaian dinas" mereka. Hal ini bukan tanpa alasan, mereka sebenarnya sedang

Foto: Azfa Zaidan Naqi

mengkampanyekan sebuah gerakan bernama *anti fashion*. Pada waktu itu, band-band musik kerap kali manggung dengan pakaian serba kulit dengan warna yang nyentrik. Sedangkan band-band beraliran punk rock enggan untuk mengikuti tren tersebut, dan memilih manggung dengan pakaian yang lebih nyaman. Layaknya yang digunakan para penggemar mereka ketika menghadiri konser, baju kaos dan *ripped jeans*.

Ripped jeans makin berjaya berkat naiknya tren *grunge fashion*. *Grunge fashion* merupakan sebuah cerminan dari sikap *anti fashion*. Gaya ini pertama kali muncul di Seattle, Washington, dengan mengadopsi penampilan dari kultur *grunge*, *punk*, dan *underground*. Beberapa barang yang kerap digunakan pada genre ini adalah kemeja flanel, *ripped jeans*, sepatu boots, dan aksesori seperti kupluk, kacamata hitam, serta gelang berbahan kayu atau besi. *Grunge fashion* kemudian menjadi sangat digemari masyarakat umum yang berasal dari luar skena ini. Gaya ini bahkan sampai ke kalangan publik figur dan artis pop papan atas seperti Madonna. Hingga saat ini, *grunge fashion* telah menyebar luas ke seluruh dunia dan menjadi sebuah genre fashion yang tak lekang oleh waktu.

Created by The Poor, Stolen by The Rich

Sayangnya, ada satu ironi yang menodai sejarah sukses *ripped jeans* selama berpuluh-puluh tahun. Ironi itu adalah para kapitalis yang mengambil kesempatan dari kepopuleran *ripped jeans*, dan menjualnya dengan harga mahal. Kita bisa mengunjungi *marketplace* atau datang langsung ke *mall* dan melihat *brand-brand fashion* ternama menjual *ripped jeans* seharga jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Fear of god, Off-White, Diesel, dan Balmain adalah beberapa produsen *ripped jeans* yang dikenal mampu membandrol produk mereka dengan harga selangit. Proses produksi yang rumit dan lama menjadi alasan mereka berani menaruh harga mahal pada produk mereka. Beberapa produk diakui dibuat langsung dengan tangan yang memerlukan keterampilan tinggi (*hand made*) atau dengan mesin laser berteknologi tinggi.

Created by the poor, stolen by the rich adalah ungkapan yang dirasa mampu mencerminkan realita *ripped jeans* saat ini. Meskipun sebenarnya *ripped jeans* dengan harga selangit ini punya pasarnya sendiri, hal itu tak bisa menampik fakta bahwa para produsen telah berpaling dari sejarah *ripped jeans* yang berasal dari kalangan ekonomi kelas bawah. Barang yang dulunya digunakan sebagai sarana berekspresi para kelas pekerja yang tak mampu, kini menjadi "mainan" kaum borjuis yang hidup serba berkecukupan. Meroketnya harga *ripped jeans* yang di pasaran, pada akhirnya mengakibatkan sebagian penggemarnya lebih memilih untuk membuat *ripped jeans* mereka sendiri, dengan merobek serta memakai celana *jeans* mereka secara berkala hingga usang, dan mendapatkan *looks* yang ideal.

Pada akhirnya, sejarah panjang *ripped jeans* membawa kita pada fakta bahwa ia lebih dari sekadar barang untuk bergaya dan *fashion statement*. Kisah *ripped jeans* adalah kisah pertarungan ideologi antara yang miskin dan yang kaya, yang muda dan yang tua, serta yang modern dan yang kolot. Sebuah bukti perlawanan kelas pekerja yang menolak tunduk atas aturan mengekang yang dibuat oleh para penguasa. Keberadaan *ripped jeans* menunjukkan pada kita bahwa rakyat kecil tetap bisa "bersuara" di tengah segala keterbatasan mereka. Keberadaannya juga mampu mewakili kebebasan berekspresi yang makin lama makin dibatasi. Tentu bagi orang-orang yang memahami sejarahnya, *ripped jeans* selamanya akan menjadi representasi dari ideologi hidup yang takkan pernah redup.

POLEMIK KLENIK DI PANGGUNG POLITIK

Penulis: Rohmah Tri Nosita

Pesta demokrasi yang menghiasi setiap lima tahun sekali melahirkan perang politik bagi masing-masing politisi. Berbagai jalan dilakukan demi menduduki kursi pemerintahan. Mulai dari menginvasi papan iklan hingga blusukan di kawasan perkampungan. Ada pula terobosan unik guna menarik suara kawula muda dengan menerjunkan admin partai politik di media sosial. Namun, sebagaimana Indonesia yang lahir dari rahim animisme dan dinamisme, kepercayaan terhadap hal mistis masih eksis. Tak ayal klenik turut dipilih menjadi teknik untuk memenangkan politik. Lantas, masihkah klenik menyelimuti dunia politik?

Wujudkan Keinginan di Petilasan Kasunanan

Tanah bekas Kerajaan Pengging, tepatnya di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, terdapat mata air yang tak hanya menyimpan nilai historis tapi juga kental akan unsur mistis. Umbul Sungsang, begitulah nama yang dikenal masyarakat luas. Umbul Sungsang diselimuti mitos bahwa apabila ada yang melakukan ritual kungkum di sana maka hajat mereka akan menjadi nyata.

"Kungkum" dalam bahasa Indonesia berarti "berendam". Biasanya ritual kungkum ini dilakukan setiap malam Jumat Pahing. Namun, tidak menutup kemungkinan ada pula yang datang di malam-malam lain.

"Tidak merujuk ke Jumat Pahing, setiap hari pun ada. Tapi orang-orang di sini katanya sakralnya malam Jumat Pahing," jelas Handi, penjaga loket masuk Umbul Sungsang, saat diwawancarai LPM Kentingan pada Senin (17/7).

Tak jauh dari lokasi Umbul Sungsang, yakni di sebelah barat Masjid Ciptomulyo, terdapat makam Raden Ngabehi Yosodipuro, pujangga Keraton Kasunanan Surakarta. Jumat Pahing dianggap sakral sebab pada hari itulah Raden Ngabehi Yosodipuro lahir. Biasanya para peziarah akan datang untuk melakukan Upacara Sanggaran (ritual untuk mengetahui apakah hajat yang dimiliki akan terkabul atau tidak). Upacara Sanggaran biasanya disertai dengan tirakatan, semedi, dan bermalam di makam.

"Habis tirakat kungkum di sini. Kalau orang-orang jauh itu pasti ada yang datang minta pesugihan, ada yang minta anaknya lagi mau masuk apa biar diterima gitu kan ada," ungkap Soleh, juru parkir di Umbul Sungsang (17/7).

Ritual ini turut dilakukan oleh mereka yang hendak meraih posisi/jabatan tertentu. Misalnya, hendak menjadi lurah atau jabatan lain yang lebih *wah*. Umbul Sungsang kerap dijadikan opsi sebagai jalan untuk meraih posisi. Meskipun tak secara gamblang menceritakan siapa saja yang datang, Ketua RT setempat, Timbul, membenarkan bahwa memang ada yang datang dari kalangan politikus.

Dituntun Dukun, Strategi Raih Posisi

Berbicara mengenai klenik, kurang afdol rasanya jika tidak membahas wajah di balik praktik klenik. Ibarat dua sisi mata uang, dukun dan klenik menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan. Kemampuannya yang dianggap sakti dan mumpuni lantas membuat orang-orang mengadu nasib kepada mereka. Entah yang hanya sekadar bertanya bagaimana peruntungannya, atau yang sampai rela mencoba ritualnya.

Seperti yang dilihat langsung oleh Windi Wahyuningtyas, seorang warga Sidoarjo. Ia menuangkan secuil ingatan masa kecilnya dalam artikel yang dimuat di Mojok.co berjudul "Pilkades dalam Ingatan Saya, Cucuk dan Dukun adalah Kunci Kemenangan".

"Saya pernah melihat tim pendukung seorang calon lari bertelanjang kaki mengelilingi balai desa. Mereka juga biasa menaruh sesuatu di balai desa sesuai instruksi dari sang dukun," tulisnya.

Fenomena klenik telah menghiasi panggung politik dari masa ke masa, bahkan sejak zaman Presiden Soekarno. Entah pergi ke dukun untuk dapat nasihat, mendapat jimat, atau bersemedi di tempat keramat. Masyarakat di Indonesia banyak yang masih percaya, meski zaman sudah berbeda. Pada pemilu terakhir, yakni 2019 silam, Saeun Muarif menceritakan bahwa ia memiliki teman yang menggunakan jasa klenik untuk mengiringi langkahnya menuju kursi pemerintahan.

"Kebetulan saya punya teman yang sedang maju ikut bertarung dalam memperebutkan kursi di parlemen sebagai calon anggota DPRD di Provinsi Jawa Timur. Katanya ada 27 pelaku klenik yang ditemui," ungkapnya dalam artikel yang dimuat di Mojok.co berjudul "Dalam Politik, Jangan Percaya Dukun 100% jika Tidak Mau Kecewa".

Sejumlah 27 pelaku klenik tersebut mengatakan bahwa temannya akan mendapatkan kursi di pemerintahan. Namun, nahas temannya harus menelan pahitnya kekalahan. Menurut Saeun, apa yang dilakukan temannya itu tidaklah rasional. Mengingat jika seseorang menjadikan dukun sebagai profesi, barang tentu kebahagiaan konsumen yang akan dipolitisasi. Walau tak bisa digeneralisasi, tapi masuk akal karena mereka pun butuh sesuap nasi.

"Jika kita pakai akal rasional, sudah bisa dipastikan semua dukun yang kita datangi akan mengatakan kita menang, tujuannya apa? Agar kita senang dengan ramalan tersebut, dan tidak segan-segan kita kasih uang

kepada dukun itu dengan jumlah lebih," tulisnya.

Manuver Klenik di Dunia Politik

Panggung politik memberi ruang bagi calon terpilih untuk melayangkan propaganda kepada calon pemilih. Mereka berhak menebar jala dan menjaring sebanyak-banyaknya suara. Sebagaimana yang disampaikan oleh pakar hukum, Sunny Umul Firdaus, bahwasanya calon pengisi kursi pemerintahan boleh melakukan kampanye melalui berbagai media komunikasi. Tentunya dengan memperhatikan beberapa hal, misalnya keselarasan antara apa yang digaungkan dengan harapan dan kebutuhan rakyat.

"Namun, perlu diingat bahwa dalam beberapa kasus, terutama di tingkat lokal atau daerah tertentu, masih ada kepercayaan atau praktik mistis yang terkait dengan pemilihan umum. Beberapa individu atau kelompok mungkin mempraktikkan ritual mistis, seperti dukun atau doa supaya mendapatkan dukungan atau kemenangan dalam pemilu," tambahnya saat diwawancarai LPM Kentingan pada Rabu (19/7).

Guna memperoleh kursi di pemerintahan, para calon berlomba-lomba membangun jembatan yang menghubungkan mereka menuju tempat yang didambakan. Entah dengan sibuk mengampanyekan visi, misi, plus janji-janji. Ada pula yang seolah-olah *nyidat* (dalam bahasa Indonesia berarti menempuh jalan yang lebih dekat) dengan mengandalkan hal-hal berbau keramat.

Pada dasarnya, penggunaan cara mistis sendiri tidak diatur secara resmi dalam sistem pemilu. Sunny mengatakan bahwasannya pemilihan umum di Indonesia diatur oleh hukum. Regulasi yang berlaku menekankan pada prinsip-prinsip demokratis, prosedur yang transparan, serta persaingan politik yang adil. Penggunaan cara mistis dalam pemilu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada persaingan politik yang adil, kesetaraan suara, dan proses yang transparan.

"Perlu dicatat bahwa dalam konteks politik dan pemilu, praktik-praktik mistis atau supranatural tidak didasarkan pada logika dan bukti empiris yang dapat diuji secara ilmiah. Pemilu seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, persaingan yang sehat, dan keadilan. Oleh karena itu, penggunaan praktik-praktik mistis atau supranatural dalam pemilu dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," pungkasnya.

Foto: *Azfa Zaidan Naqi*

MENDOBRAK RUANG, MENGEMBALIKAN KEPEMILIKAN: SEBUAH PESAN SANG PUTRI

Penulis: Salma Fitriya Nur Hanifah

History has been written by the victors.
–Winston Churchill

Gusti Raden Ajeng Koes Moertiyah, yang dikenal sebagai Gusti Kanjeng Ratu Wandansari, dan lebih dikenal lagi sebagai Gusti Moeng merupakan Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat, sekaligus anak ke-25 dalam urutan keturunan Sri Susuhunan Pakubuwana XII. Beliau lahir di Surakarta, 1 November 1960. Gusti tumbuh dalam kultur Islam yang kuat. Sosok yang paling berperan dalam pertumbuhan Gusti adalah Ibundanya, Kanjeng Raden Ayu Pradapaningrum. Ibu sepanjang kehidupannya, menurunkan moral beragama dan kebudayaan kepada Gusti. Kultur Islam pada saat masa pertumbuhan Gusti sudah kental dan ditanamkan untuk seluruh keturunan Pakubuwana. Islam pada masa itu dibarengi dengan pertumbuhan adat dan budaya yang sudah berkembang di Keraton, salah satunya seni tari. Seni tari merupakan warisan utama untuk Gusti dan keturunan lainnya. Tarian dalam hal ini sangat diprioritaskan untuk dijaga eksistensinya di dalam Keraton Kasunanan Hadiningrat. Dalam perjalanan Gusti di dalam keluarga Keraton Kasunanan, mengalami banyak gejolak. Pada tahun 70-80-an, disaat Gusti memasuki masa remajanya, sejarah mengatakan bahwa di tahun tersebut merupakan perkembangan Islam liberal di Indonesia. Sayap kiri berkembang pesat dan banyak menimbulkan dinamika yang berkembang.

Kembali lagi ke dasar bahwa sejarah ditulis bagi ia yang menang. Bahkan bisa dikatakan sejarah selalu berbeda sudut pandang dari setiap orang. Begitu juga dengan sudut pandang keluarga Keraton Surakarta Hadiningrat. Dalam ketiga belas pergantian kepemimpinan, Keraton Surakarta Hadiningrat dinilai sebagai pemilik kekayaan yang ada di Indonesia. Perkembangan budaya dan kekayaan milik Keraton Kasunanan dinilai pesat karena sebagai tonggak ekonomi dan pemerintahan sejak 1700-an. Yang membedakan adalah kondisi kedaulatan dan yurisdiksinya. Ada beberapa momentum yang menjadi keterbalikan kondisi kejayaan Keraton Kasunanan ini. Menarik ke belakang disaat Gusti belum lahir, 1945, merupakan momentum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun hal tersebut ternyata tidak selalu berbuah baik bagi semua pihak, terutama dalam kalimat yang tertuang dalam proklamasi: "*Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.*" Hal tersebut menandakan bahwa apa yang sedang berjaya saat itu akan disingkirkan dan dialihkan dalam satu kesatuan yang berbentuk Republik. Konstitusi dibentuk, produk hukum memakai produk Belanda, dan adaptasi sistem hukum dari berbagai negara ke Indonesia. Semua tertuang dalam kertas baru, aturan baru, dan undang-undang baru. Penggaris bawahan kata, "*...dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.*" Dinilai kurang memberikan keleluasaan untuk para penguasa khususnya para raja untuk mengalihkan dan melakukan rekapitulasi secara administrasi atas hak dan kekayaan yang masing-masing mereka miliki. Hal ini tentu saja menuai banyak problematika, karena secara tidak langsung sama saja dinilai sebagai perebutan hak dari kerajaan oleh pemerintah dengan dalih tidak adanya perjanjian tertulis dan ketidak berlakuan atas hal tersebut.

Momentum tersebut merupakan titik balik keruntuhan kerajaan-kerajaan besar yang saat itu masih berjaya dan dibarengi dengan meninggalnya para raja yang saat itu memerintah serta tidak adanya pergeseran kekuasaan secara deklaratif yang buntutnya adalah konflik internal. Hal yang paling dirugikan atas pengalihan sistem dan bentuk negara ini adalah ketika apa yang dimiliki oleh Keraton Kasunanan adalah bukan miliknya. Dalam tafsiran, Keraton Kasunanan tidak berhak atas kekayaan tersebut karena dinilai tidak memenuhi syarat secara tertulis. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah dengan mudah masuk dan mengintervensi apa yang menjadi persoalan di dalamnya, dengan mudah menawarkan banyak perjanjian untuk saling menjaga harta benda kekayaan secara wilayah untuk dapat dipinjamkan dan digunakan oleh negara untuk perkembangannya. Dalam kondisi polemik yang berkembang saat itu dan banyak hal dibumbui dengan ditunggangginya dengan sebuah kepentingan, Gusti Moeng remaja ditinggal dengan wafatnya Kanjeng Raden Ayu Pradapaningrum, Ibundanya. Pada masa itu hal yang sudah tertanam dalam Gusti Moeng remaja adalah bagaimana ia dapat hidup di dalam Keraton Kasunanan dengan segala kondisi yang ada saat itu. Karena bagi Gusti Moeng, ia hanya punya Ibu, Bapak adalah *waliyullah*, ia adalah milik Allah seorang, Pakubuwono XII hidup untuk Keraton Kasunanan, rakyatnya, dan pertanggung jawabannya terhadap Allah. Dalam polemik yang terjadi mengenai kekayaan, kebudayaan,

Foto: *Lutfi Fitria Tamsir*

Foto: *Lutfi Fitria Tamsir*

pergantian kekuasaan, juga banyak dicampur adukkan dengan unsur politik. Tidak sedikit pihak yang dengan mudahnya memberikan apa yang dimiliki oleh dinasti untuk dapat ditukar sebagai keuntungan pribadi. Pencampuran niat ini menjadikan susahnya mempertahankan kedaulatan penuh Keraton Kasunanan di hadapan negara.

Setelah kepergian Ibundanya, Gusti Moeng melanjutkan hidup dan pendidikannya. Dinasti Keraton Surakarta Hadiningrat adalah prioritasnya, menjaga segalanya dengan penuh perjuangan dikala kedaulatan Keraton Kasunanan sudah berkurang sejak bergabungnya Keraton Kasunanan dengan pemerintah. Kendati begitu, tidak semua hal berjalan mulus, tidak semua pihak memiliki rasa yang sama untuk menjaga Keraton, tidak semua ingin mencurahkan miliknya untuk menjaga Keraton untuk tetap memiliki kedaulatan dan Yurisdiksi yang utuh. Konflik pergantian kekuasaan banyak terjadi. Penolakan dari berbagai pihak atas niat tersebut banyak ditemui. Perjuangan tersebut membuat Gusti Moeng dalam posisi yang tidak baik. Entah berapa orang yang akan mendukungnya. Bentuk perjuangan hal tersebut dinyatakan dalam bentuk berdirinya Lembaga Dewan Adat (LDA). Proses panjang dilalui Gusti Moeng untuk dapat memberikan ruang eksistensi LDA terhadap khalayak publik. Tidak jarang LDA mendapat julukan sebagai *"Anthek Londo"*. Hal-hal seperti ini yang memicu akar konflik karena perbedaan dalam menuliskan sejarah. Seperti halnya yang selalu diutamakan oleh Gusti Moeng, tujuan utama dalam keberjalanan LDA adalah keadilan dan pengembalian apa yang menjadi milik Keraton Kasunanan ke tempat semula. LDA sendiri sudah memiliki legalitas melalui Putusan PN Surakarta Nomor 211/Pdt.P/2020/PN Skt Tanggal 16 Oktober 2020 yang ditetapkan dalam Pasal 3 yang berbunyi, "Menetapkan menurut hukum Perkumpulan Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat merupakan subyek hak yang sah yang dapat mewakili kepentingan hukum Pewaris Dinasti Mataram Keraton Surakarta Hadiningrat."

Dalam proses keberjalanan LDA, menimbulkan banyak pertentangan dan gesekan dengan berbagai pihak. Hal tersebut yang menjadikan mengambil hak yang telah diambil oleh orang lain adalah suatu hal yang berat. Tidak semua pihak merasa bahwa mereka satu tujuan dengan LDA. Dan tidak semua menganggap LDA menguntungkan mereka. Banyak faktor yang harus dihadapi LDA dalam menjalankan tujuannya. Dalam prakata terakhir Gusti Moeng atas wawancara sore itu adalah, "Saya hanya ingin apa yang menjadi milik Dinasti, tetap menjadi milik Dinasti yang sah dan diakui secara legalitas untuk dapat saya turunkan sebagai warisan."

PANGGUNG KLASIK YANG MAKIN ASYIK

Penulis: Icha Salsabila

Diculiknya Sinta secara paksa oleh Rahwana menuju Kerajaan Alengka membawanya jauh dari Sri Rama. Diutuslah wanara bernama Anoman untuk merebut kembali Sinta. Namun, dalam perjuangannya menjalankan utusan banyak tantangan yang harus dihadapi Anoman.

***Foto:** Lutfi Fitria Tamsir*

Sepenggal cerita pertunjukan wayang orang bertajuk "Anoman Obong" yang digelar pada Senin, 26 Juni 2023 di Gedung Wayang Orang Sriwedari, Surakarta. Pengunjung mulai memasuki ruangan pada pukul 19.30 WIB setelah tiket dicek oleh portir. Setelah itu, pengunjung dapat duduk di tempat yang telah disediakan. Pertunjukan dimulai pada pukul 20.00 WIB hingga 22.00 WIB. Memasuki waktu pertunjukan, seluruh pencahayaan ruangan dimatikan, lalu dibuka dengan nyanyian *tembang* Jawa yang diiringi seperangkat musik gamelan yang indah didengar. Dilanjutkan dengan pertunjukan wayang orang. Sang pemain bersiap membawa penonton untuk menikmati alur cerita yang disajikan. Pertunjukan kali ini disutradarai oleh Nur Diatmoko, S.Sn.

Menariknya, ada sebuah babak berjudul "Garagara" yang tak pernah absen dari setiap pertunjukan. Babak ini merupakan waktu jeda sebelum cerita inti kembali dimainkan. Sebagai ruang komedi, "Garagara" diperankan oleh Punakawan. Tak hanya melucu dan mencairkan suasana, namun juga mengajak penonton untuk berinteraksi secara langsung.

Pada dasarnya wayang orang atau biasa disebut *wayang wong* merupakan pertunjukan wayang yang diperankan oleh manusia. Wayang orang ini mengkombinasikan antara seni tari, musik, dan drama. Lakonnya menceritakan kisah-kisah yang diambil dari Mahabharata dan Ramayana. Karakter yang dibawakan oleh para pemain mampu diperagakan dengan epik dan penuh penghayatan. Setiap adegan dapat memukau mata penonton yang memenuhi seisi gedung. Hal ini didukung dengan riasan dan kostum pemain yang menyesuaikan karakter aslinya. Bahasa yang digunakan dalam pertunjukan adalah bahasa Jawa, tetapi penonton tetap dapat menikmati keseluruhan alurnya dengan membaca layar proyektor yang menampilkan naskah cerita berbahasa Indonesia.

Wayang Orang Sriwedari sendiri telah aktif sejak tahun 1911, namun pertunjukan ini baru dikomersialkan pada tahun 1922. Pertunjukan ini mengalami pasang surut penonton dalam perjalanannya selama 113 tahun. Seiring dengan perkembangan zaman, pengurus gedung Sriwedari mulai membenahi dan melakukan banyak inovasi untuk meningkatkan minat masyarakat pada kebudayaan Jawa. Mulai dari perbaikan sarana prasarana, seperti penambahan kursi yang lebih nyaman digunakan, pemasangan proyektor untuk naskah cerita, dan pemasangan pendingin ruangan yang menjadikan penonton betah dalam menikmati pertunjukan. Pertunjukan wayang orang diadakan enam hari dalam sepekan, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional, dengan judul yang berbeda di setiap harinya. Tiket masuknya pun cukup terjangkau, hanya sebesar Rp10.000,00 dengan durasi kurang lebih dua jam pertunjukan.

***Foto:** Lutfi Fitria Tamsir*

Selain itu, pengurus juga melakukan regenerasi dengan menjangkau pemuda-pemudi di Surakarta. Regenerasi pemain berkisar di usia 25 hingga 35 tahun dengan dasar kemampuan seni tari dan pemahaman terhadap wayang orang itu sendiri. Hal ini dilakukan agar wayang orang tetap terjaga kelestariannya secara turun temurun. Teknis pementasan wayang orang ini dilakukan secara *rolling* peran antar pemain. Pemilihan karakter juga didasarkan pada kondisi fisik pemain. Misalnya, pemain berbadan besar akan dijadikan sebagai raja atau raksasa. *Chemistry* dari setiap pemain juga telah menyatu, sehingga lebih banyak dilakukan spontanitas atau improvisasi pada dialog pemain, namun tidak lepas dari arahan sutradara.

Koordinator Pementasan Wayang Orang Sriwedari, Didik Wibowo menjelaskan bahwasanya jumlah penonton dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan. Terlebih beberapa tahun belakangan ini penonton didominasi oleh anak muda, mulai dari pelajar hingga mahasiswa. Tak hanya itu, banyak tamu dan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung dan menikmati pertunjukan. Sehingga, terus perlu adanya inovasi-inovasi untuk menarik minat masyarakat lebih banyak lagi. Seluruh upaya publikasi informasi mengenai jadwal wayang orang telah dilakukan, mulai dari penggunaan media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Berkenaan dengan hal tersebut, Didik menambahkan bahwa hal ini tak lepas dari peran pemerintah Surakarta pada eksistensi Wayang Orang Sriwedari. "Dukungan Pemerintah Surakarta sudah baik mencakup dari penggajian karyawan, pendanaan sarana prasarana, dan semua kebutuhan sehari-hari mulai kebutuhan pemain hingga penonton. Kami merasa sangat diperhatikan. Sehingga, yang kami lakukan adalah tetap berfokus dalam melestarikan dan merawat wayang orang tanpa perlu merisaukan jumlah penonton," ungkap Didik.

Salah seorang pengunjung juga terkesan ketika menonton Wayang Orang Sriwedari. "Saya baru pertama kali ke sini dan ini membuat saya bernostalgia pada pertunjukan drama tradisional yang saya tonton sejak kecil. Ternyata gedungnya cukup besar serta terdapat fasilitas pendingin ruangan yang cukup. Jika dilihat tadi, peminatnya pun cukup banyak dari berbagai usia lebih dari yang saya duga," tutur Andreas.

"Harapan saya pertunjukan budaya ini bisa makin berkembang dan makin dikenal oleh masyarakat umum khususnya pemuda-pemudi agar budaya ini bisa dilestarikan hingga anak cucu kita nanti," tambahnya.

Pertunjukan kali ini ditutup dengan istimewa. Saat itu, turut hadir komedian Srimulat yakni Tri Retno Prayudati yang akrab disapa Nunung dan Waldjinah sang maestro keroncong Indonesia untuk ikut menonton pertunjukan. Suasana terasa hangat ketika keduanya serasi dalam menyanyikan lagu "Walang Kekek" ciptaan Waldjinah sendiri. Selepas penutupan, tirai merah pertunjukan ditutup pertanda usainya pentas malam itu. Pertunjukan yang menawan.

SANG PENDUSTA

Penulis: Kinanti Gurit Wening

Ilustrasi: *Anastasya Kurnianingrum*

Kuliah itu mahal! Banyak hal yang harus dikorbankan. Barangkali tanah warisan, perabotan, pun perhiasan milik emak belum cukup untuk membayar lunas biaya masuk dan biaya kuliah. Oleh karenanya, masih perlu mencari pinjaman di bank atau tuan tanah di kampung.

Aku tahu. *Ah*, bukan hanya tahu, aku terlampau sadar bahwa kuliah itu mahal. Hanya untuk mengisi formulir masuk saja harus membayar. Tidak masalah kalau ada jaminan pasti diterima, kalau tidak? emak bisa marah, naik pitam seharian mengomel, dan berujar, "Tak balik modal!"

Kuliah adalah impianku sejak lama. Aku yang kerap dinobatkan sebagai siswa berprestasi, kata orang tentulah berpeluang besar untuk mendapatkan beasiswa, meski demikian bukankah seleksi untuk mendapat beasiswa pun sama susahnya seperti menembus gerbang kampus?

Aku gundah, impianku untuk bisa melanjutkan kuliah kupendam seorang diri. Biarlah. Aku toh masih punya cukup waktu untuk bersiap, sebelum menyampaikan angan-angan itu pada emak.

Bapak meninggal dua tahun lalu dalam kecelakaan lalu lintas di depan Stasiun Gopek. Beberapa pengendara motor, termasuk bapak menjadi korban. Nahas, bapak meregang nyawa. Petaka itu bukan akibat kecerobohan bapak yang nekat menerobos palang rel kereta, misalnya. Namun, *yah*, sudah garisan takdir. Itulah saat nahas bapak.

Bapak sosok yang bertanggung jawab, ia mengajariku banyak hal tentang kehidupan dan akan selalu menjadi panutanku. Gaji bapak sebagai tukang antar koran dan majalah di sebuah agen hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur dan biaya sekolah. Namun, entahlah bagaimana, bapak selalu punya dana khusus untuk membelikan aku buku bacaan maupun majalah. Itulah yang membuat masa kecilku cukup bahagia. Aku merasa lebih keren karena punya banyak koleksi buku, tidak seperti teman sepermainanku.

Setelah Bapak pergi, hidup kami tidak sama lagi. Emak yang semula ibu rumah tangga, harus merelakan tenaganya habis untuk bekerja serabutan demi menyambung hidup kami

GALERI

Adikku tinggal bersama paklik nun jauh di sana. Syukurlah ada yang berkenan mengurusnya. Sedangkan aku? Aku di sini menemani emak sembari terus memutar otak untuk mencari pekerjaan sampingan yang bisa anak sekolah lakukan. Dalam hidup macam ini, jelas aku tak kuat hati untuk bicara pada emak tentang keinginanku melanjutkan kuliah.

"Emak sudah masak. Selepas sarapan, tolong bantu jemur pakaian ya," ujar emak, sebelum menghilang dari balik pintu rumah kami.

Suara bel sepeda kesayangannya terdengar. Ah, pasti dia sedang beramah-tamah dengan para tetangga.

Belum sempat aku beranjak, terdengar seseorang berseru menyebut namaku. Tanpa ba-bi-bu aku keluar. Aku terkejut oleh kehadiran Pak RT beserta seseorang yang asing bagiku.

"Selamat pagi, Jagat! Kami tidak mengganggu tidurmu kan?" sapa Pak RT.

Aku mempersilakan mereka duduk di kursi serambi rumah seraya menggeleng dan tersenyum. "Tidak, Pak."

"Begini, Gat. Saya dapat tugas dari Pak Kades untuk mencari setidaknya satu warga yang berstatus siswa sekolah yang kesulitan membayar biaya pendidikan. Ada program baru dari pemerintah bagi siswa yang lulus sekolah menengah atas seperti kamu. Nah, apakah kamu ingin kuliah? Kalau tidak, tawaran ini saya alihkan pada orang lain," ujar Pak RT.

Aku terkejut bukan main. Kabar gembira itu bak petir yang menyambar di siang bolong. Siapa sangka Tuhan menjawab kegelisahanku dalam tempo sangat cepat? Aku berusaha menahan diri, tidak berteriak girang. "*Anu*, persyaratannya apa saja, Pak?"

"*Halah*, Gat, persyaratan apa yang kau risaukan? Tidak ada yang sulit. Lulus ujian masuk nanti, kamu hanya perlu menjaga nilai akademik tetap bagus. Sudah, itu saja. Yang lain hanya persyaratan administratif, seperti salinan KTP dan kartu keluarga," terang Pak RT.

"Kalau boleh tahu, kamu ingin masuk jurusan apa dan di kampus mana, Jagat?" Kali ini yang bertanya bukan Pak RT, melainkan pria yang aku yakini utusan dari pemerintah desa.

"Saya tertarik masuk Fakultas Hukum atau Politik di Universitas Tribuwana Tunggadewi, Pak," ucapku.

Mereka berdua mengangguk-angguk.

"Ya sudah. Giatlah belajar untuk persiapan ujian ya, Jagat. Sudah tahu kan apa saja yang diujikan? Maaf, saya kurang tahu info soal itu, Gat. Pokoknya kalau ada apa-apa, datang saja ke rumah supaya bisa saya bantu," kata Pak RT sembari mengisyaratkan pada pria di sampingnya untuk beranjak. "Kami pamit dulu ya, tolong jangan lupa sampaikan kabar ini pada emakmu."

Begitulah, syukur aku lolos seleksi masuk perguruan tinggi. Segala kebutuhan untuk kuliah, seperti biaya kuliah per semester, uang bulanan, serta tempat tinggal sudah diurus pihak kelurahan. Yang ter-penting aku juga sudah mengantongi izin dan restu emak. Sehari sebelum aku meninggalkan desa, ada undangan dari Pak RT ke acara syukuran yang diadakan warga. Katanya, inilah perayaan khusus bagi orang pertama dari Desa Waringin yang mampu menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Ucapan selamat mengalir dari orang-orang yang hadir. Tak jarang mereka menyelipkan amplop untuk uang saku dan berdoa supaya ilmuku kelak berguna bagi orang-orang kecil. Sama sepertiku, orang-orang kecil yakni warga desa juga punya mimpi. Namun tidak semua memiliki nasib seberuntung aku yang bisa menggapainya.

"Belajar yang benar, Jagat. Kamu harapan bagi masyarakat di sini. Kami percaya, kelak ilmu yang kamu peroleh bermanfaat bagi semua orang", kata Pak RT.

***

Aku mengenang masa muda penuh ambisiku seraya bersandar pada kursi empuk di kantor. Semilir angin dari pendingin ruangan membuatku sedikit mengantuk, tetapi kedua mata enggan terpejam. Gegap-gempita kampanye pemilihan umum membuat energiku terkuras habis, lantaran aku harus pergi dari satu tempat ke tempat lain, menghadiri konferensi pers, rapat partai, dan masih banyak lagi. Ketua partai mencalonkan aku sebagai kandidat gubernur tahun ini. Tentu aku enggan menolak kesempatan besar itu.

Masuk lingkaran politik tak pernah terbayang dalam benakku. Pada masa lalu, aku hanya seorang anak dari sebuah desa kecil. Beruntung, aku bisa mengenyam pendidikan di universitas yang dekat dengan pusat pemerintahan. Aku menghabiskan empat tahun masa studi, fokus menyerap banyak ilmu, dan membangun relasi. Sesekali aku juga bergabung dengan kelompok mahasiswa yang terjun ke jalanan untuk melakukan demonstrasi. Maka ketika emak dan para tetangga tahu, bocah desa ini sukses menjadi bupati atau menjadi bagian dari orang-orang yang berkuasa, mereka senang bukan main. Ada banyak harapan supaya aku benar-benar berpihak pada rakyat kecil.

Ah, sebentar lagi waktu makan siang. Aku merapikan meja yang penuh berkas, bersiap meninggalkan ruangan menuju ke kantin. Namun belum sempat beranjak dari kursi, Sarah, sekretarisku, memberi tahu salah seorang utusan partai datang untuk membicarakan sesuatu. Aku mempersilakan masuk.

"Selamat siang, Pak Jagat. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda," ucapnya.

"Tidak masalah, Pak. Ada yang bisa saya bantu?"

Ia mengeluarkan map cokelat dari tas ransel dan menyerahkannya padaku.

"Lawan politik kita dalam pemilihan gubernur punya nama lebih besar ketimbang bapak, hal itu membuat ketua partai khawatir. Beliau memerintahkan untuk mengeluarkan anggaran guna dibagikan agar masyarakat memilih Anda."

Aku mengerutkan dahi. "Bukankah uang dilarang dalam peraturan pemilihan umum?" tanyaku.

"Kami berjanji itu tidak diketahui pusat. Silakan, tanda tangan di sini, Pak", ujar utusan partai itu sambil menunjuk satu kotak dengan jari telunjuk, mengarahkan aku membubuhkan tanda tangan di kertas yang ia bawa.

Aku bimbang. Haruskah? Bukankah ini akan menyakiti hati masyarakat? Bukankah kebohongan ini bakal membuatku dihantui rasa bersalah dan dosa besar sepanjang hayat?

Aku alpa. Aku lupa apa yang terjadi setelah itu. Maaf, maaf, aku telah mengingkari janji.

"Keluar! Mana gubernur pendusta itu?"

"Mana gubernur yang berjanji memihak rakyat kecil? Keluar!"

"Keluar! Kami akan menghukum pendusta yang melukai kepercayaan rakyat!"

Sayup-sayup terdengar seruan orang-orang yang demonstrasi di depan pintu gerbang kantorku. Entahlah, aku tidak tahu siapa mereka.

Tubuhku melemas, aku tak ubahnya daging tanpa tulang. Di depan mataku muncul bayangan orang-orang yang dulu mendukung perjalanan hidupku. Emak, Pak RT, para tetangga. Mereka rakyat kecil.

Dan aku? Akulah sang pendusta!

Semarang, 1 Juli 2023

Ilustrasi: *Ayra Adlina M. Z*

PERIHAL MURNI

Penulis: Wahyu Lusi Lestari

Kukira kau sisi bumi paling murni
Memberikan wawasan yang halal dan haram
Menggaungkan toleransi tak sebatas ngaji
Tak mempermasalahkan tempat sembahyang dan keputusan pribadi

Kukira kau sisi bumi paling murni
Menciptakan aturan demi kenyamanan
Membuat putusan untuk keadilan
Bukan malah menjualbelikan pasal buatan

Kukira kau sisi bumi paling murni
Menjejelkan materi segala dimensi
Yang membuat kami mengerti bahwa tiada yang asli murni
Bahwa kongkalikong tak kenal tempat untuk disinggahi

Makanlah dulu, sebelum berkelahi dengan pikiran
Minumlah dulu, sebelum tersedak berita lain berlalu-lalang
Tak ada sisi murni disini
Hanya tersaji kata-kata yang diisi amunisi

TEH DAN PENGKHIANAT, BUKTI SEJARAH TAK HITAM PUTIH

Reporter: Julia Tri Kusumawati

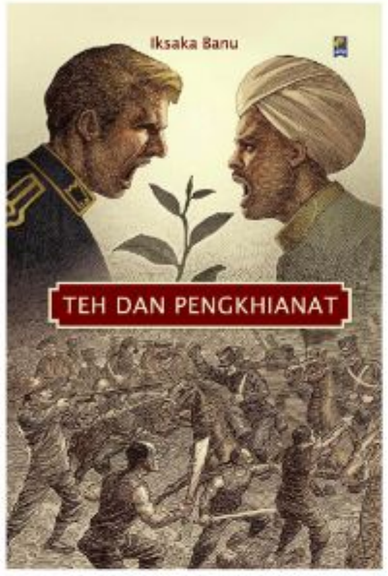

Teh dan Pengkhianat oleh Iksaka Bumi.
Diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia,
Terbit dan Cetakan April 2019. Berisi 164 halaman.

Narasi yang tertuang dalam buku-buku sejarah Indonesia selalu terulang dalam pola yang sama—yang terjajah dan yang dijajah. Kata demi kata dijalin untuk mendapatkan visualisasi zaman saat pribumi dan orang-orang Eropa, terutama Belanda, saling berkonflik dan menodongkan senjata ke arah satu sama lain. Kekerasan dan penderitaan yang dihasilkan pada zaman itu tak hilang meski sudah lebih dari tujuh dekade Indonesia berdiri menjadi bangsanya sendiri. Buku teks yang jadi dasar pembelajaran siswa secara jelas menekankan betapa kejamnya penjajah dan betapa heroiknya kaum pribumi. Para pahlawan itu berani menantang orang-orang yang mencoba merebut tanah air..

Namun, bila ditelisik lebih dalam lagi, semua sejarah yang tertuliskan tidak sesederhana itu. Apabila seseorang mau melihat sebuah kejadian tanpa meromantisasi kaumnya sendiri, spektrum sejarah tidak sejelas membedakan mana langit dan mana bumi. Memangnya ada bagian dari dunia yang hanya seperti papan catur saja, hitam dan putih? Satu pertanyaan muncul di benak saya, apa mungkin sekelompok orang yang jumlahnya tak terhitung itu bisa dimasukkan dalam satu kategori?

Novel *Teh dan Pengkhianat* karya Iksaka Banu ibarat angin yang berhembus di tengah gersangnya gurun. Buku-buku bergenre fiksi sejarah sudah banyak beredar di pasaran, buku ini tak hanya membahas sebuah sejarah dengan menarasikannya, tetapi juga mengemasnya dalam genre fiksi yang mampu menarik orang awam untuk membacanya. Hal yang menurut saya membuat novel *Teh dan Pengkhianat* ini menonjol adalah perspektif yang dibawakannya. Seperti karya Iksaka Banu lainnya yang bertajuk *Semua untuk Hindia*, novel ini adalah kumpulan cerpen yang berlatar pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, tetapi lebih banyak menggunakan tokoh Belanda sebagai perantara untuk menyampaikan narasinya.

Mengikuti alur dari satu cerpen hingga cerpen berikutnya, pembaca akan dibawa untuk melihat sejarah Indonesia melalui sebuah sudut pandang baru. Cerpen yang ada di dalam novel ini berjumlah tiga belas. Masing-masing cerita didongengkan oleh Iksaka Banu melalui narasi cerita yang menarik. Rangkaian narasinya tidak menggambarkan pengkotakan sejarah menjadi dua kubu saja. Apa yang disampaikan pun tidak menghitamputihkan tokoh-tokoh yang ikut andil dalam masa kolonialisme. Kalimat demi kalimat yang terjalin mematahkan rasisme yang sudah tertanam dalam diri, merombak lagi apa sejarah yang sudah terlalu disederhanakan sehingga mengagungkan kaum sendiri dan mengecap semua penjajah sebagai iblis.

Bukan maksud untuk mengutuk sejarah yang mengajarkan heroiknya pahlawan-pahlawan Indonesia, apa yang disampaikan memang digunakan sebagai pupuk untuk membangkitkan nasionalisme. Namun, apa artinya nasionalisme tanpa kemanusiaan? Melalui cerpen-cerpen yang disampaikan Iksaka Banu dalam novel ini, maka kita akan dibuat untuk berpikir lebih luas, memandang sejarah dalam sebuah kacamata baru yang tidak dangkal. Menyadari bahwa tidak semua orang Belanda itu titisan iblis dan tidak semua orang pribumi sesuci malaikat.

Cerpen pertama yang membuka novel ini berjudul "*Kalabaka*", mengangkat kisah di balik pembantaian orang di Banda Naira oleh para tentara Belanda. Narasi ini dibawakan dari sudut pandang Hendriek Cornelis Adam, seorang mantan schutterij yang merangkap menjadi juru tulis dan asisten pribadi dari seorang letnan laut. Hati nuraninya sebagai manusia belum mati ketika melihat orang-orang Banda yang tak bersalah dibantai satu per satu, meskipun statusnya sendiri berada di deretan orang-orang Belanda. Lantas ia melawan gubernurnya waktu itu, meski pada akhirnya akibat perbuatannya itu, ia harus menerima hukuman mati.

Dalam cerpen ketiga yang juga menjadi judul dari novel ini, "*Teh dan Pengkhianat*", mengangkat cerita tentang konflik dari buruh-buruh Tiongkok dengan pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan dilakukan karena gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan pemberian hukuman yang berlebihan. Untuk meredam buruh-buruh Tiongkok tersebut, pemerintah Hindia Belanda justru mengutus kaum pribumi. Orang yang diutus merupakan sosok yang dulunya menjadi musuh bebuyutan mereka pada saat perang, tetapi berbalik mendukung Belanda demi mendapat uang. Sosok tersebut adalah Alibasah Sentot Prawirodirjo, yang merupakan tangan kanan dan mantan jendral Perang Diponegoro.

Cerpen lain memiliki tema yang berbeda pula, contohnya dalam "*Tegak Dunia*" yang menggambarkan fanatisme buta. Tokoh dalam cerita ini adalah Kapten Van de Vlek beserta keponakannya, Jan. Bahasan utama dalam cerpen ini adalah paham yang disebarkan oleh para pemuka agama yang menyatakan bahwa bumi itu datar. Kapten Van de Vlek yang notabene adalah seorang kapten kapal, disebut menyebarkan paham yang bertentangan dengan sabda Tuhan ketika menjelaskan kepada keponakannya tentang globe, tiruan bumi yang berbentuk bulat. Betapa fanatiknya para pemuka agama itu sehingga bukti-bukti yang sudah terpampang jelas diabaikan demi membentuk narasi kebenaran versi mereka sendiri.

Mendekati waktu saat Indonesia merdeka, cerpen "*Indonesia Memanggil*" menunjukkan jasa dari mereka yang tidak pernah disebutkan namanya. Cerita ini menjelaskan tentang serikat pekerja pelabuhan Australia. Mereka adalah tahanan politik Indonesia yang dibawa Belanda, kebanyakan merupakan anggota komunis yang memberontak pada tahun 1926. Setelah mendengar berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, mereka memboikot pelayaran dari kapal-kapal Belanda yang membawa amunisi senjata ke Jawa dengan cara mogok kerja besar-besaran. Apabila tindakan itu tidak mereka lakukan, tentu kemerdekaan Indonesia tidak bisa berjalan selancar yang seharusnya.

Masih banyak cerita lain yang dituliskan Iksaka Banu dalam novel ini. Contohnya "*Variola*" yang menceritakan ketika pihak Belanda membantu mencari vaksin dari wabah kolera yang melanda Hindia Belanda kala itu. Ada pula "*Belenggu Emas*" yang menceritakan tentang Cornelia, seorang perempuan Belanda, dan kekagumannya terhadap seorang wanita Minang bernama Rohana Kudus. Berkat perempuan pribumi itu, Cornelia belajar arti kebebasannya yang sesungguhnya dan melepas belenggu emas yang menjeratnya selama ini.

Sejarah tidak pernah hitam putih, tidak bisa dicap benar dan salah hanya dari satu sudut pandang saja. Banyak sisi yang bisa ditelusuri untuk mengungkap sejarah sebagaimana adanya. Iksaka Banu tidak meromantisasi sejarah, serta tidak membangun narasi berdasarkan persepsi penuh rasisme yang menjadikan sejarah begitu sederhana sehingga bisa disimpulkan sebagai hitam dan putih.

Sebagai penutup, saya akan mengutip ucapan dari Napoleon Bonaparte, "*History is the version of past events that people have decided to agree upon,*". Sejarah yang sudah dituliskan dalam buku dan yang diajarkan di dalam kurikulum siswa hanyalah satu sudut pandang dari beribu sudut pandang yang lain. Dengan membaca novel ini, mungkin seperti saya, orang akan mempertanyakan kembali apa yang sebenarnya sudah mereka pelajari selama ini. Namun, dengan begitu orang juga akan mampu untuk melihat sejarah dengan perspektif yang lebih luas dan tidak dangkal.

NEGERI TANPA TELINGA: FILM SATIR KOMEDI POLITIK, TOTALITAS DALAM MENGKRITIK

Reporter: Syallom Aprinta Cahya Prasdani

Negeri Tanpa Telinga, disutradarai dan diproduseri oleh Lola Amaria, ditulis oleh Lola Amaria dan Indra Trenggono, editor Aline Jusria, dirilis 14 Agustus 2014

Negeri Tanpa Telinga, film ini tayang pada tahun 2014 merupakan film yang menyuarakan kritik serta keresahan mengenai keadaan politik di Indonesia. Film ini disutradarai sekaligus di produseri oleh Lola Amaria. Naskah film Negeri Tanpa Telinga ini pun ditulis oleh Lola Amaria bersama Indra Trenggono. Negeri Tanpa Telinga menggambarkan politik sebuah bangsa dan hubungannya dengan uang, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan urusan ranjang.

Film Negeri Tanpa Telinga dibuka dengan Naga (Teuku Rifnu Wikana) sebagai tokoh utama sebagai seorang tukang pijat panggilan. Ada adegan ketika Naga berada di sebuah ruangan bersama seorang dokter spesialis THT. Uniknya, Naga tersebut tidak mengeluhkan sakit, sebaliknya ia menginginkan dokter Sangkakala (Landung Simatupang), yang juga merupakan teman dekatnya, untuk membuat telinganya tuli.

Kemahiran Naga dalam menyembuhkan penyakit dengan pijat refleksi membuat Naga memiliki banyak klien, tidak hanya dari kalangan rakyat biasa, seperti tukang ojek dan tukang becak, klien yang dilayani Naga juga berasal dari kalangan artis, pejabat politik, sampai jurnalis. Oleh karena itu, mau tidak mau, secara tidak sengaja, Naga sering mendengar percakapan-percakapan para pejabat politik dan koleganya. Suatu hari, ia mendengarkan percakapan pemimpin Partai Martobat, Piton yang diperankan oleh Ray Sahetapy, hendak mencalonkan diri menjadi presiden. Piton berusaha mengumpulkan dana dengan cara kotor dibantu Menteri Joko Ringkik (Rukman Rosardi), Marmood (Tanta Ginting) sebagai bendahara partai, dan selingkuhannya, Tikis yang diperankan oleh Kelly Tandiono, seorang perempuan pelobi yang juga merupakan anggota dewan. Mereka berusaha mengatur tender proyek Wisma Kayangan dengan cara suap-menyuap.

Film Negeri Tanpa Telinga tidak hanya menyorot sudut pandang politik pemerintahan dari kasus suap-menyuap dalam wujud uang saja, tetapi juga transaksi menggunakan tawaran seks dan urusan ranjang. Diceritakan dalam film ini, perempuan dijadikan alat rayuan dan bayaran yang dijanjikan. Naga pun menjadi saksi mengenai transaksi-transaksi ini. Ia bahkan memijat sang pelobi ulung, Tikis, yang kelelahan setelah melakukan "lobi" dengan para rekan anggota dewannya.

Selain Partai Martobat, partai Amal Syurga yang dipimpin oleh seorang ustadz bernama Etawa (Lukman Sardi), juga mengatur tender impor daging yang dimanipulasi untuk kepentingan dan keuntungan partainya. Tokoh Ustaz Etawa digambarkan sebagai "sentilan" kepada para pemuka agama di Indonesia yang memang pada kenyataannya tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan citra salehnya untuk terjun di ranah politik. Kesalehan ini menjadi cadar dan kedok untuk menutupi perbuatan-perbuatan di baliknya. Tidak hanya korupsi, Ustaz Etawa dan kawan-kawannya juga digambarkan sebagai pemuka agama yang sering main perempuan, gemar dugem, dan hobi konsumsi hal-hal yang dilarang agama.

Tidak hanya mengandung satiran kepada pejabat politik, film Negeri Tanpa Telinga juga menyoroti kasus artis yang hanya ikut-ikutan saja menjadi wakil rakyat. Artis dalam film ini digambarkan sebagai pejabat yang sebetulnya secara bibit, bebet, dan bobot kurang cocok untuk menjabat gelar wakil rakyat. Serupa dengan pemuka agama yang memanfaatkan citranya, artis hanya memanfaatkan ketenarannya untuk menggaet hati publik. Pada akhirnya, kursi wakil rakyat diduduki oleh mereka yang sebenarnya tidak terlalu paham, bahkan peduli dengan kepentingan rakyat. Banyak dari mereka yang hanya memanfaatkan reputasi kemudian melakukan korupsi, sementara kepentingan rakyat? hanya menjadi bualan tanpa aksi. Hal ini makin menggambarkan dengan baik realitas kehidupan politik di Indonesia, *bukan?*

Lewat film Naga Tanpa Telinga, sepertinya penonton dapat dengan mudah menangkap apa yang digambarkan dalam film. Sutradara sekaligus produser film, Lola Amaria, berani memotret dengan lumayan gamblang lika-liku kehidupan politik di Indonesia. Ia juga berani memberi nama partai yang mirip dengan partai politik yang hidup di Indonesia, hanya saja tetap ditambahkan aksen komedi dalam penamaannya. Selain melalui penamaan partai, plot genre komedi juga berusaha dipertahankan dengan cara penyisipan dialog-dialog yang mengundang gelak tawa.

Sayangnya, sulit mempertahankan genre komedi dalam film bertemakan politik seperti ini. Menurut pengakuan sang editor, Aline Jusria, untuk mempertahankan genre komedi film ini sempat dilakukan pembongkaran ulang plot cerita agar film ini tidak membosankan. Contohnya, ketika bawahan Ustaz Etawa mendengar kabar bahwa salah satu rekannya tertangkap karena ketahuan perihal kasus impor daging. Bawahan tersebut malah berceletuk bahwa ia sudah bertawakal dan berikhtiar supaya korupsi yang mereka lakukan tidak ketahuan. Selain itu, komedi juga dihadirkan melalui peran Marmood. Pada proses memerankan peran ini, Tata Ginting membuat suaranya seperti perempuan yang melengking, tetapi agak serak. Meskipun demikian, usaha-usaha ini sepertinya sudah diantisipasi oleh penonton, sehingga kurang menggelitik perut.

Terlepas dari kurang berhasilnya genre komedi yang disajikan, film Negeri Tanpa Telinga secara berani memvisualisasikan realita kehidupan politik yang terjadi di Indonesia secara eksplisit. Totalitas dari pemain-pemain juga pantas mendapatkan pujian, terutama Kelly Tandiono pemeran Tikis, sang pelobi ulung. Kelly dengan totalitas berani tampil hanya dalam busana bikini dan melakukan adegan cinta dengan beberapa laki-laki. Selain itu, peran Naga juga dimainkan dengan baik oleh Teuku Rifnu, terlihat dari logat medok dan perilakunya yang sangat mencerminkan orang desa. Karena keberanian film Negeri Tanpa Telinga dan totalitasnya pemainnya, film ini patut diacungi dua jempol. Harapannya film-film seperti Negeri Tanpa Telinga kembali diproduksi dan selalu diapresiasi supaya menjadi pelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia mengenai kehidupan politik pemerintahan di negeri ini.

DEMI MASA: CATATAN NOSTALGIA DALAM BALUTAN RIMA BERANDAL

Penulis: Dhiazwara Yusuf Dirga A

Demi Masa, dibawakan Morgue Vanguard X Doyz. Dirilis tahun 2018 oleh Grimloc Records

Tahun 2018 menjadi tahun yang cukup memekakkan bagi sebagian orang, sekaligus menggembirakan bagi sebagian lainnya. Banyak media berpretensi menjadi corong informasi perihal kotak suara, elektabilitas, afiliasi politik, pencitraan, dan berbagai hal lain yang memuakkan. Panggung dramaturgi politik masif dimainkan pada senjakala tahun itu. Banyak seniman yang turut tanggap dan urun tangan dalam menyikapi persoalan ini. Sebagian hadir dengan karya-karya terbarunya, sebagian pula turut mengkritik dengan malu-malu di balik cuitan sarkasme tak berarah. Namun, dari sudut terpinggirkan, dengan tangan dingin sang maestro, seluruh memori tersebut lantas ditangkap dalam larik rima sakralis, oleh pelopor hip-hop tanah air cum penulis asal Kota Kembang, Morgue Vanguard (MV) *as known as* Ucok "Homicide" alias Herry Sutresna, beserta MC kenamaan asal ibukota, Doyz melalui persembahan album *Demi Masa* (2018).

Demi Masa bukan sebatas repertoar musik belaka, ia lebih dari itu. Sebuah memoar tentang suara-suara para kaum marginal dari sisi yang terabaikan. Tak bisa dimungkiri, MV yang memegang peran krusial dalam dapur penulisan lirik dan isian musik, menyajikan baris rima yang tak hanya keras dan menyalak, tetapi juga bertabur dengan bunyi-bunyian estetis ala *boombap* 90-an. Sanjungan dan apresiasi juga tak kurang dilontarkan kepada Doyz yang juga memiliki andil besar atas lahirnya *Demi Masa*. Bisa dibayangkan bagaimana melegakannya, ketika album ini dapat hadir dari tangan kedua epitome musik protes tanah air, di tengah kebisingan politik dan dahaga hip-hop berkualitas kala itu. Lantas hasilnya?

Setelah ini, akan saya bagikan rima-rima binal, yang bertandem pada album *Demi Masa*.

JUNTA TITIMANGSA

Melekat birama di medan martil dan gada/ Sepekat aroma kemenyan memanggil arwah Durma/ Resonansi azimat penyair Ya'umudin/ Rima nekromansi hasrat Munir dan Udin/ Kohesi integral dua unsur optima/ Kompresi koronal kawah pemancur bisa/.

Sebagai track pembuka, MV dan Doyz menempatkan "Junta Titimangsa" sebagai alinea pertama dari kitab Demi Masa. Impresi pertama ketika lagu ini terputar dalam gawai, sudah barang tentu sekujur tubuh tak kuasa menahan gerak laju birama yang dilantunkan oleh keduanya. Musik yang lebih ramah di telinga, tetapi tetap tak menanggalkan marwah MV sebagai Ucok "Homicide" dengan barisan lirik sarkastik, *nyeni*, dan mengawang.

Selesai dengan "Junta Titimangsa", perjalanan album *Demi Masa* masih panjang. Deretan nomor *"all killer, no filler"* menunggu giliran.

BREAKDAWN

Esok akan terlalu terlambat, di depan tengat yang merambat/ Waktu tak pernah berhenti meski jumudmu merapat/ Meski hasratmu sekarat dan kehabisan kerabat/ Meski terbaca gelagat penamu mulai berkarat/ Teruskan zaman beramanat/ melontar bait granat yang memberi marka pada almanak/ Yang mencatat kalam tandingan dengungan lalat/ Eh yo Doyz! Beri rentang kurun waktu ini bait perahmat/.

CSDB FM

Pada nomor ini, MV mencoba melintasi waktu. Penggalan kisah *nostalgic* turut serta menghiasi rima-rima yang lugas. Secara tersirat MV menarik kembali para pendengar untuk merasakan peristiwa lampau yang mungkin kerap kali mereka saksikan. *Ost* Catatan si Boy, iklan Termorex, dan berbagai rentetan peristiwa lainnya. Pun tak kalah klasik, MV dan Doyz turut menggandeng Iwa K. Sumbangsih nada-nada ceria nan eksotis ala Iwa K turut dihadirkan di lagu ini.

Komando sentral rima baja kelana/ Usung penanda germo-raja berdansa seirama/ Menata kata-kata perajah menara bala setara/ Pengontrol para domba yang elit menggembala/.

TESTAMENT

...Serupa preman delapan puluhan yang bertahan di era Petrus/ rap membawa dupa berkawan/ Dengan harkat bertamengkan hasrat/ berkalang sebarisan penjaga nalar dan waras/...

DI HADAPAN BABYLON

Bagi barisan mereka yang bersatu pada/ Malam yang kelabu tempat nasib kan beradu/ Takkan mati jadi dadu di hadapan serdadu/ Invasi kolosal operasi terpadu/ Mangsa keadaan rezim masa perampasan angkat kesadaran meski depan/ Kekalahan babat di hadapan,/ Barisan sombong muka doa pagi dua jari untuk Poro Duka/.

Seperti halnya pada track "Di hadapan Babylon", MV dan Doyz bertamukan Rand Slam kembali beradu rima berandal. Setumpuk lirik padat secara runtut dilempar secara berkala. Ketiganya saling bersahutan bak kepodang yang keluar dari sarang di pagi hari. Semangat, ambisi, dan dedikasi secara gamblang direpresentasikan pada nomor kali ini.

BUCKSHOT FUNK

MV x Doyz, mempersembahkan Mr. EP dan Sarkasz. Empat punggawa hip hop kenamaan tanah air, bertandem dalam satu lagu. Secara beringas, mereka saling menimpali dengan arsenal masing-masing. *Litt!*

Los Barrio Pobres y Barras de Muerto/ manifestó Neraka Jahanam macam Duo Kribo/ menyambut kombo acid inferno Ricky Kasso/ dan legacy epik macam Deddy Stanzah dan Cikaso/.

CHECK YOUR PEOPLE

Pesta belum usai. Satu *track* yang berhasil merongrong masuk dalam berisik suara otak dan turut singgah cukup lama. Nomor berdurasi empat menit empat puluh tujuh detik, bertajuk "*Check Your People*", menyoal perihal almanak kasus-kasus konflik politik agraria di Indonesia dalam catatan sejarah. Morgue Vanguard bersimpul tangan bersama Doyz, menjabarkan secara terperinci perihal cacat sistem pemerintahan feodal dan buruknya gelagat imperialis lokal. Sederet lirik diramu dalam balutan amunisi rima yang menghujam seluruh yang batil. Dentuman suara MV dan Doyz, seolah membersamai suara para proletar yang tanahnya diambil paksa oleh mafia.

Tinju di angkasa, Untuk mereka yang sagunya tergantikan sawit di papua/ Untuk mereka yang terhimpit tambang liar di Bone, Sinai, hingga Gowa/ Masyarakat adat, Petani Langkat, Mereka yang mempertahankan konservasi di Teluk Benoa, hingga mereka yang dihujani serbuan buldoser di ibukota../ Satu cinta/.

DEMI MASA

Demi setiap doa pada setiap Kamisan/ Tak semua kepergian harus diiringi tangisan/ Janji kami merekam zaman hingga waras penghabisan/ Serupa nyala Ginan dan pijaran bara Sebastian/.

(Angkat kepal di angkasa)
Keep it real!
Kabarkan!

Sumber: https://open.spotify.com/album/2xIkclJV79knxUDFkX6KYr?si=EmmACQ_tQYKXNRgg1yHX3A&nd=1

Ilustrasi: *Falarasika Paulina*

ETIK DALAM TAKTIK POLITIK

Penulis: Kristian Adi Nurpranata

"Politics is who gets what, when, and how?"

Sebuah kalimat dari Harold D. Laswell yang sederhana namun jelas artinya. Politik merupakan suatu hal yang menjadi aspek penting dalam lingkup masyarakat bahkan lingkup kenegaraan. Bagaimana tidak? Politik memiliki pengaruh yang besar dalam mempengaruhi aspek kehidupan lainnya, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain. Hukum yang idealnya menjadi kunci untuk mengatur itu semua, pada akhirnya hanya terjerat dalam pegangan politik.

Apakah politik itu kejam? Apakah politik itu jahat? Apakah politik itu licik? Saya tidak bisa mengatakan tidak, namun bukan berarti mengiyakan. Politik selalu diidentikkan dengan kepentingan kelompok atau kepentingan siapa yang diwakilkan dan power atau kekuasaan, namun sejatinya politik bukan kedua hal tersebut. Politik adalah bagaimana caranya tujuan masyarakat tentang kesejahteraan terpenuhi, keadilan bagi mereka tercapai, dan pemenuhan hak sebagai warga negara. Politik harusnya membantu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, namun dalam mewujudkannya diperlukan "sesuatu". Apakah itu? Ya, tentunya kekuasaan.

Keuasaan merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi bahkan menekan orang lain untuk melakukan sesuatu. Apakah politik itu mengenai cara mendapat kekuasaan? Ya betul, namun untuk mewujudkan tujuan masyarakat, bukan tujuan suatu kelompok atau golongan saja. Dalam mewujudkan politik yang ideal tersebut, orang memiliki cara berpolitiknya tersendiri. Realitanya, berpolitik sekarang tidak mengacu pada bagaimana kesejahteraan masyarakat tercapai, namun bagaimana orang tersebut mendapatkan kekuasaan. Cara berpolitik yang "benar" menjadi poin penting dalam mendapatkan kekuasaan tersebut.

Cara berpolitik setiap politikus tentu berbeda, sesuai kepentingan, kepentingan sendiri atau kelompoknya, ATAU kepentingan masyarakat nusa dan bangsa. Jika kita lihat kondisi politik sekarang, partai politik memiliki 1001 cara unik untuk menarik hati masyarakat. Misalnya, partai televisi yang marsnya melekat di kepala dan mencalonkan artis sebagai calon legislatif, sebut saja Aldi Taher yang belakangan ini sedang viral karena lirik lagunya yang *nyeleneh*. Ada juga partai politik yang mengklaim dirinya "terdepan" karena telah membuat lagu yang cukup menggelitik perut dan viral di jagat maya. Beralih pada kasus politik pada institusi pendidikan, kampus Ultraman (nama samaran) yang mengalami pembatalan rektor karena Permendikbud yang tidak jelas. Tidak hanya itu, rektor kampus Ultraman juga melaporkan dugaan korupsi oleh guru besar kampus, yang berakhir pencabutan gelar guru besar tersebut dengan alasan kedisiplinan.

Semua peristiwa tersebut mungkin bisa dibilang tidak berbobot, melihat bagaimana cara mereka mempertahankan kekuasaan atau meraih kekuasaan. Peristiwa tadi tentunya membuat kita *jeleh*, sehingga menurunkan minat dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik nasional. Padahal partisipasi politik ini penting dalam menjaga iklim demokrasi politik agar tujuan masyarakat tentang kesejahteraan dan keadilan dapat dicapai. Hal ini yang dikhawatirkan berimbas masa depan negara.

Namun tidak perlu jauh-jauh sampai politik nasional, jika kita bisa melihat partisipasi politik di lingkup kampus. Contohnya di kampus Ultraman, lagi, yang pemilihan raya mahasiswa (pemira) pada lingkup fakultas, yaitu Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), bahkan universitas, hanya mencalonkan satu pasangan calon sehingga melawan kotak kosong. Lalu apakah mahasiswa atau bahkan masyarakat yang acuh dan tidak memilih itu salah? Apakah menjadi golongan putih itu salah?

Sederhananya, golongan putih (golput) adalah orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Golongan putih selalu dipandang sebagai ketidakpedulian terhadap pemilihan umum, padahal hal tersebut belum tentu sepenuhnya benar. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi mereka yang golput dalam pemilihan umum, contohnya kualitas calon yang dinilai tidak memiliki kapabilitas, kekhawatiran terhadap program yang dijanjikan oleh pasangan calon yang pada akhirnya hanya menjadi omong kosong, *buzzer* politik yang sudah merebak luas di media sosial, dan banyak lagi. Menjadi golongan putih tentu tidak salah, ini merupakan tindakan politik dari masyarakat sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemilihan, perlu ditegaskan bahwa kita menggunakan suara kita adalah HAK, bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Akan tetapi, apakah dengan kita golput karena alasan di atas menjadi dibenarkan? Tentu saya menjawab dengan lantang, "TIDAK!".

Jika memahami dinamika politik sekarang yang mungkin tidak sesuai harapan, tetap saja golput bukanlah opsi yang tepat untuk menyuarakan bentuk kekecewaan. Dengan kata lain, jika Anda menjadi golput setidaknya Anda harus paham mengenai kondisi perpolitikan yang ada, sementara acuh? Itu artinya Anda sama sekali tidak mau peduli dan memilih untuk tidak menggunakan hak suara sebagai warga negara. Hal ini jelas tertuang pada Pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang dinyatakan, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". "Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan". Peraturan lainnya terdapat pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sudah dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Lantas bagaimana menghadapi politik yang makin hari makin tidak jelas? Apakah kita harus mengiyakan semua cara berpolitik yang tidak berbobot tersebut? Saya hanya bisa menjawab, "Begitulah politik". Politik tidak mengatur apa yang benar dan salah, melainkan cara seseorang dalam meraih kekuasaan tersebut. Politik hanya mengenal apakah cara tersebut berhasil atau tidak, lalu apa hasilnya. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas dan tegas, namun masih banyak orang yang mengesampingkan hal tersebut. Contohnya seperti melakukan kampanye di institusi pendidikan, adanya berita palsu terkait pasangan lawan, memberikan "bantuan" terhadap masyarakat agar dipilihnya politikus tersebut, dan lain-lain.

Maka, tulisan ini saya tutup dengan inti sari dari kalimat Harold D. Laswell bahwa memang politik pada realitanya jauh dari kata ideal. Namun, bukan berarti kita tidak memerlukan unsur politik dan acuh pada keadaan. Politik merupakan bidang penting dalam menegakkan aspek demokrasi warga negara.

TEKA TEKI SILANG

MENDATAR

5. Pemegang suatu jabatan politik tertentu yang sedang atau masih menjabat

10. Ideologi politik yang menekankan pada kelestarian nilai-nilai tradisional, otoritas, dan stabilitas sosial

13. Partai atau kelompok politik yang berseberangan dengan partai ataupemerintahan yang berkuasa

16. Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum

18. Kemampuan atau kecakapan untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan

21. Paham politik yang menolak otoritas pemerintah dan mendukung penghapusan negara

23. Kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian

25. Nama jabatan resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, atau pimpinan suatu negara

27. Tujuan manusia berpolitik

28. Sebuah mekanisme demokrasi kampus yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di berbagai perguruan tinggi

29. Tindakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa

30. Keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/ memerintah dalam pemerintahan suatu negara

MENURUN

1. Ideologi politik yang menekankan kebebasan individu, kebebasan sipil, dan batasan pemerintahan

2. Salah satu alat politik paling efektif di Indonesia

3. Sistem pemerintahan yang dikuasai oleh satu individu atau kelompok dengan kekuasaan yang kuat dan sedikit oposisi politik.

4. Penyebaran informasi atau pandangan yang dipengaruhi oleh pihak tertentu untuk memengaruhi opini publik

6. Sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum sebagai sebuah upaya penekanan secara politik danbukan sebagai sarana untuk membuat konten atau pencitraan

7. Ideologi politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kepemilikan pribadi dan di mana sumber daya dipergunakan berdasarkan kebutuhan

8. Istilah lain dari Ormek

9. Bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka

11. Pendekatan politik yang menekankan kepentingan rakyat biasa dan mengkritik elit politik

12. Proses memengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dengan cara memberikan informasi, dorongan, dan pengaruh kepada pejabat terkait

14. Sentimen atau ideologi yang menekankan pentingnya identitas dan kepentingan nasional dalam politik

15. Orang yang memperjuangkan visi misi yang diyakininya sesuai dengan kepentingan organisasi, baik organisasi lingkungan, sosial, politik maupun organisasi massa lainnya

17. Sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih

19. Aliansi atau gabungan partai politik yang bekerja sama untuk membentuk pemerintahan atau mencapai tujuan bersama

20. Organisasi yang berfungsi untuk mengoordinasikan dan mewakili kepentingan politik sekelompok orang

22. Suatu penilaian terhadap permasalahan untuk sebuah perbaikan tanpa harus disertai saran

24. Pengikut partai politik, paham atau golongan tertentu

26. Sebuah permainan di mana uang berbicara, eksploitasi menjadi seni, dan persaingan menjadi ibadah

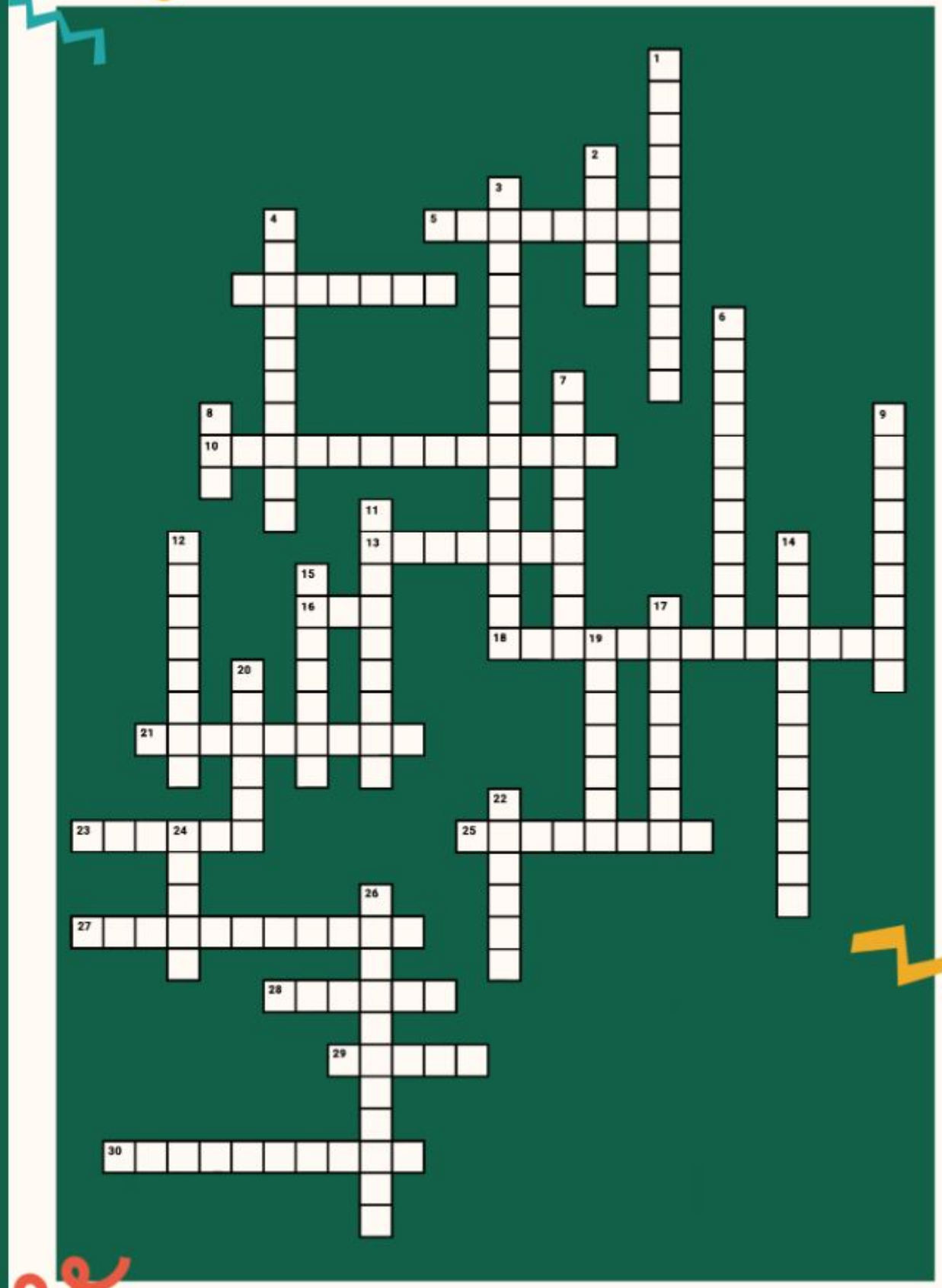

Oleh: Raditya Putera Wirawan

Ilustrasi: *Raditya Putera Wirawan*

campaign

Siapa Bilang Donasi Harus Pakai Uang?

Pengen donasi, tapi gak punya uang

Di aplikasi Campaign #ForABetterWorld, kamu bisa berdonasi tanpa uang!

Dukung Kampanye Sosial yang Kamu Suka!

Unduh aplikasinya sekarang!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Together #ForABetterWorld

www.campaign.com